



UNIVERSITAS INDONESIA

**DISTRIBUSI MANFAAT BELANJA PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN DISEKTOR PENDIDIKAN
TAHUN 2010**

TESIS

BENNY HIDAYAT
1006791474

**FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH
JAKARTA JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DISTRIBUSI MANFAAT BELANJA PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN DISEKTOR PENDIDIKAN
TAHUN 2010**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E)**

BENNY HIDAYAT

1006791474

**FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH
JAKARTA JANUARI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

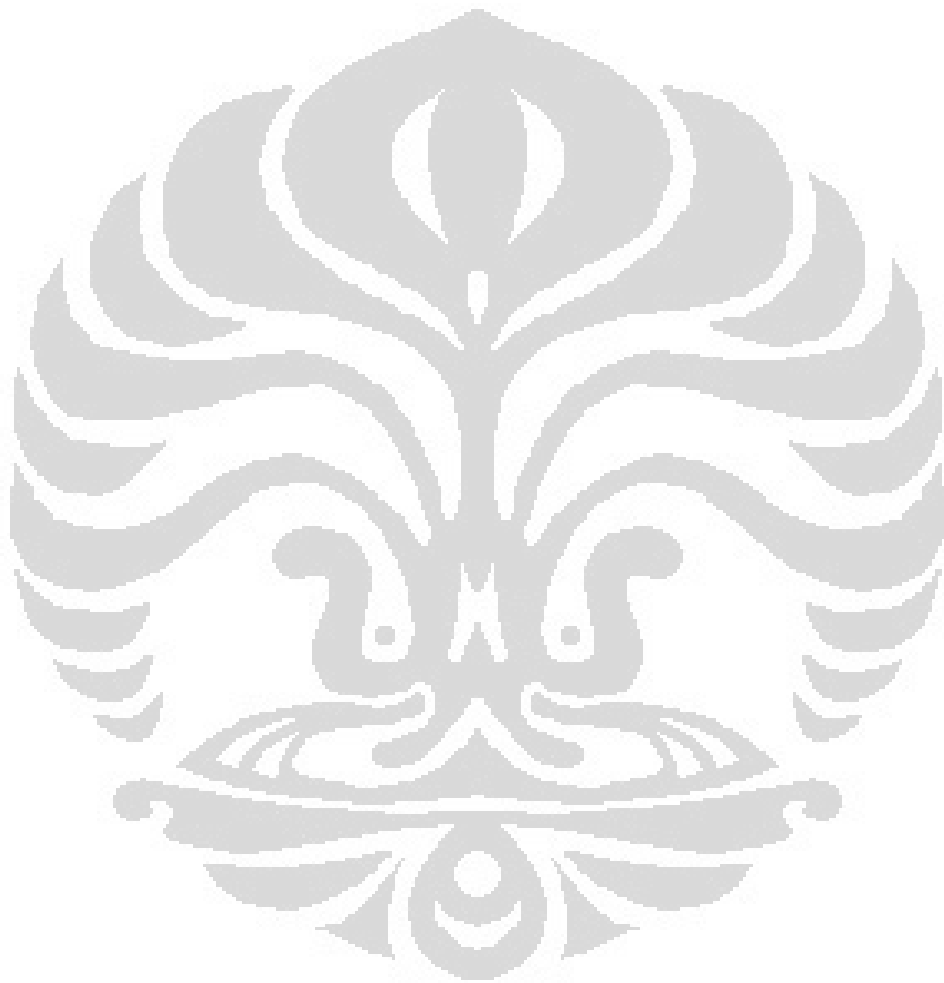
Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa Tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya

Jakarta, Januari 2012



(Benny Hidayat)



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : BENNY HIDAYAT
NPM : 1006791474
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Distribusi Manfaat Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Di Sektor Pendidikan Tahun 2010

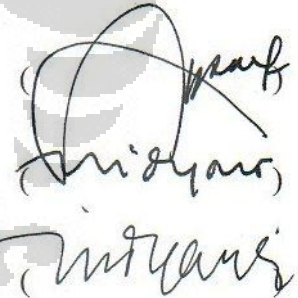
Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Iman Rozani, SE, M. Soc. Sc

Penguji : Dr. Ir. Widyono Soetjipto

Penguji : Widyanti Soetjipto, SE, M. Sc.



Ditetapkan di : Jakarta

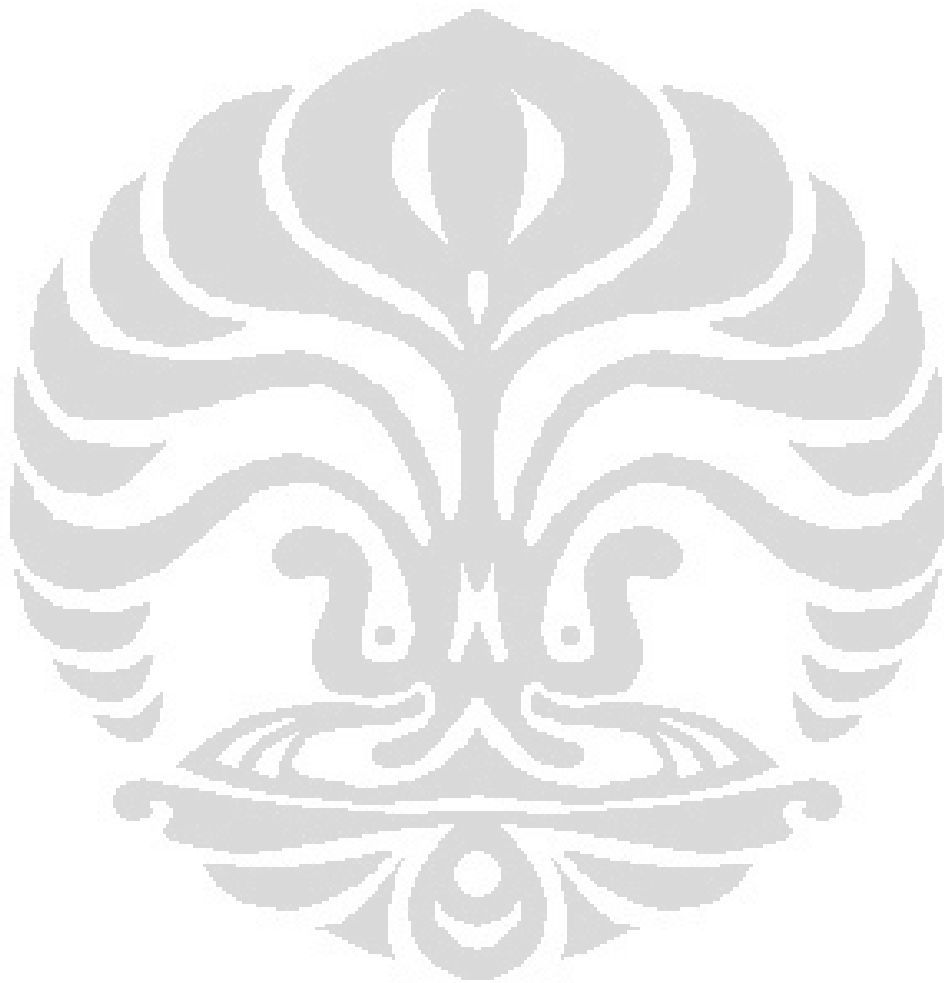
Tanggal :

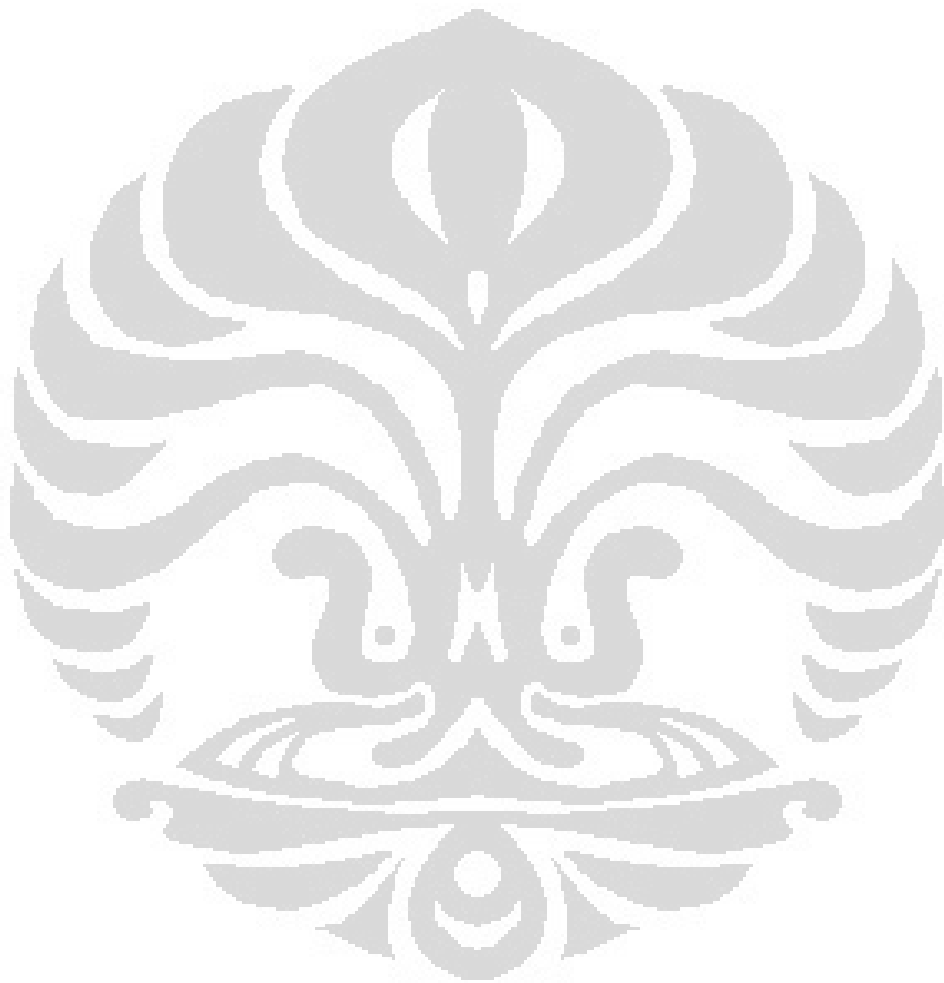
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat Iman, Islam dan Ihsan dalam kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selain itu, salam dan sholawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa obor kebenaran sampai ke akhir zaman.

Penelitian tesis yang berjudul Distribusi Manfaat Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Di Sektor Pendidikan Tahun 2010 merupakan sebagian persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dengan setulus hati kepada penulis kepada :

1. Bapak Iman Rozani, SE, M. Soc. Sc sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran kepada penulis;
2. Bapak Arindra Artasya Zainal S.E, M.Sc., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
3. Bapak Dr. Ir. Widyono Soetjipto selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan untuk kesempurnaan tesis ini;
4. Ibu Widyanti Soetjipto, SE, M. Sc. selaku Anggota Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan untuk kesempurnaan tesis ini;
5. Bapak Prof. Dr. Nurdin Abdullah, M. Agr, selaku Bupati Bantaeng yang telah memberikan tugas belajar dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan;
6. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantaeng beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dengan motivasi dan semangat untuk secepatnya menyelesaikan studi ini;
7. Seluruh Dosen/Pengajar dan staf MPKP FE UI yang telah memberi





ABSTRAK

Oleh : **BENNY HIDAYAT**

Program Studi : **MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

Pembimbing : **Iman Rozani, M. Soc, Sc**

Judul : **DISTRIBUSI MANFAAT BELANJA PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN DI SEKTOR
PENDIDIKAN TAHUN 2010**

Latar belakang: Pada tahun 2010 dari seluruh penduduk berusia lima tahun dan lebih di Sulawesi Selatan terdapat 24,38 persen yang masih sekolah di berbagai tingkatan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Anak-anak usia SD (7-12 tahun) yang masih sekolah ada 96,53 persen. Anak-anak usia SLTP (13-15 tahun) yang masih sekolah ada 80,99 persen dari seluruh anak usia SLTP. Di tingkat SLTA terdapat 51,67 persen dari seluruh anak usia 16-18 tahun. Pada tingkatan perguruan tinggi yang masih sekolah ada 15,82 persen dari seluruh anak usia 19-24 tahun.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menghitung distribusi pendapatan masyarakat dan menganalisis distribusi manfaat belanja pendidikan di 24 kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan untuk rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12 tahun) dan sekolah menengah pertama (13 – 15 tahun).

Metode: Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggambarkan tentang belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan di sektor pendidikan. Pendekatan yang dipakai adalah *Benefit Incidence Analysis* untuk melihat sebaran distribusi manfaat belanja pemerintah terhadap kalangan masyarakat miskin di Sulawesi Selatan.

Hasil: Tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga usia sekolah dasar (7 – 12 tahun) tertinggi dengan persentase sebesar 30 persen terjadi di 6 kabupaten dan 2 kota. Sedangkan ketimpangan pendapatan untuk rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama (13 – 15 tahun), ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi di Kabupaten Gowa. Manfaat yang bersifat progresif terjadi di Kabupaten Sidrap, Luwu Utara dan Kota Palopo. Sedangkan manfaat yang bersifat netral terjadi di Kabupaten Maros. Untuk manfaat yang bersifat regresif terjadi di Kabupaten Pinrang dan Kota Makassar.

Kesimpulan: Distribusi manfaat belanja pemerintah di Sulawesi Selatan umumnya bersifat progresif untuk sekolah dasar namun untuk sekolah menengah pertama umumnya bersifat regresif.

Kata kunci: Benefit Incidence Analysis, Progresif, Netral, Regresif

ABSTRACT

Name : Benny Hidayat

Study Program : Magister Of Planning And Public Policy

Title : **BENEFIT INCIDENCE ANALYSIS OF BUDGET OF SOUTH SULAWESI GOVERNMENT IN EDUCATION SECTOR IN 2010**

Background: In the year 2010 from all resident have age five year and more in South Sulawesi there are 24,38 percent which still at various level of school start of elementary school until college. Children of age SD (7 – 12 year) there are 96,53 percent still at school. Children of age SLTP (13 – 15 year) there are 80,99 percent still at school. Children of age SMU (16 – 18 year) there are 51,67 percent still at school. Children of age College (19 - 24 year) there are 15,82 percent still at school.

Objective: This research aim to calculate the distribution of society earnings and analysis the benefit incidence of education expense in 24 regency/town in South Sulawesi Province for the domestic of owning elementary school age child (7 – 12 year) and junior high school (13 – 15 year).

Method: This research have the character of descriptive qualitative by depicting governmental expense of regency and town of South Sulawesi Province in education sector in 2010. Approach by using Benefit Incidence Analysis to see the benefit distribution of education budget to rural society in South Sulawesi.

Result: Household income did not flatten in highest level with 30 percent happen 6 regency and 2 town for household have child age SD. Meanwhile, for household income did not flatten in highest level happen in Gowa Regency with 40 percent for household have child age of SMP. Benefit with progressive happen in Sidrap, North Luwu and Palopo. Meanwhile, benefit with neutral happen in Maros Regency. And, benefit with regressive happen in Pinrang Regency and Makassar City.

Conclusion: In general, benefit incidence of government budget in education sector in South Sulawesi Province in 2010 for child age SD is progressive but for child age SMP still regressive.

Keywords: Benefit Incydenca Analysis, Progressive, Neutral, Regressive

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
1. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Permasalahan	10
1.3.Tujuan Penelitian	11
1.4.Ruang Lingkup	11
1.5.Metodologi	11
1.6.Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	12
1.7.Sistematika Penulisan	13
2. KAJIAN LITERATUR	15
2.1.Belanja Pemerintah	15
2.2.Pendidikan Sebagai Barang Publik	18
2.3.Desentralisasi Fiskal	19
2.4.Desentralisasi Pendidikan	21
2.5.Anggaran Pendidikan	24
2.6.Benefit Incidence Analysis	29
2.7.Kurva Lorenz	33
2.8.Penelitian Sebelumnya	34
3. DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN	37
3.1.Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Sulawesi Selatan	37
3.2.Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Usia Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	37
3.2.1. Kabupaten Kepulauan Selayar	37
3.2.2. Kabupaten Bulukumba	38
3.2.3. Kabupaten Bantaeng	39
3.2.4. Kabupaten Jeneponto	40
3.2.5. Kabupaten Takalar	41
3.2.6. Kabupaten Gowa	42

3.2.7. Kabupaten Sinjai	43
3.2.8. Kabupaten Maros	44
3.2.9. Kabupaten Pangkep	45
3.2.10. Kabupaten Barru	46
3.2.11. Kabupaten Bone	47
3.2.12. Kabupaten Soppeng	48
3.2.13. Kabupaten Wajo	49
3.2.14. Kabupaten Sidrap	50
3.2.15. Kabupaten Pinrang	51
3.2.16. Kabupaten Enrekang	52
3.2.17. Kabupaten Luwu	53
3.2.18. Kabupaten Tana Toraja	54
3.2.19. Kabupaten Luwu Utara	55
3.2.20. Kabupaten Luwu Timur	55
3.2.21. Kabupaten Toraja Utara	57
3.2.22. Kota Makassar	58
3.2.23. Kota Pare – Pare	59
3.2.24. Kota Palopo	60
3.3. Pengelompokan Daerah Berdasarkan Pusat-Pusat Kegiatan	61
3.3.1. Pusat Kegiatan Nasional	61
3.3.2. Pusat Kegiatan Wilayah	63
3.3.3. Pusat Kegiatan Lokal	66
3.3.3.1. Pusat Kegiatan Lokal Selatan – Tengah	66
3.3.3.2. Pusat Kegiatan Lokal Utara	69
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	71
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	71
4.1.1. Letak Geografis	71
4.1.2. Topografi	71
4.1.3. Penggunaan Lahan	72
4.1.4. Kependudukan	73
4.1.5. Kesehatan	73
4.1.6. Fertilitas dan Keluarga Berencana	74
4.1.7. Perumahan	74
4.1.8. Pengeluaran Rumah Tangga	75
4.2. Analisis Distribusi Manfaat Belanja Pemerintah Sulawesi Selatan di Sektor Pendidikan	75
4.2.1. Kondisi Pendidikan di Sulawesi Selatan	75
4.2.2. Belanja Pendidikan Per Murid	78
4.2.3. Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan	79
4.2.3.1. Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan	79
4.2.3.2. Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan SD dan SMP di 24 Kabupaten/Kota	81
4.2.3.2.1. Pusat Kegiatan Nasional	82
4.2.3.2.1.1. Kota Makassar	82
4.2.3.2.1.2. Kabupaten Maros	83

4.2.3.2.1.3.Kabupaten Gowa	85
4.2.3.2.1.4.Kabupaten Takalar	86
4.2.3.2.2.Pusat Kegiatan Wilayah	88
4.2.3.2.2.1.Kota Palopo	88
4.2.3.2.2.2.Kabupaten Bone	89
4.2.3.2.2.3.Kabupaten Jeneponto	91
4.2.3.2.2.4.Kabupaten Barru	93
4.2.3.2.2.5.Kota Pare – Pare	94
4.2.3.2.2.6.Kabupaten Bulukumba	96
4.2.3.2.2.7.Kabupaten Pangkep	97
4.2.3.2.3.Pusat Kegiatan Lokal	99
4.2.3.2.3.1.Pusat Kegiatan Lokal Selatan – Tengah	99
4.2.3.2.3.1.1.Kabupaten Selayar	99
4.2.3.2.3.1.2.Kabupaten Bantaeng	101
4.2.3.2.3.1.3.Kabupaten Sinjai	102
4.2.3.2.3.1.4.Kabupaten Soppeng	103
4.2.3.2.3.1.5.Kabupaten Wajo	105
4.2.3.2.3.1.6.Kabupaten Sidrap	106
4.2.3.2.3.2.Pusat Kegiatan Lokal Utara	107
4.2.3.2.3.2.1.Kabupaten Pinrang	108
4.2.3.2.3.2.2.Kabupaten Enrekang	109
4.2.3.2.3.2.3.Kabupaten Luwu	110
4.2.3.2.3.2.4.Kabupaten Tana Toraja	112
4.2.3.2.3.2.5.Kabupaten Luwu Utara	113
4.2.3.2.3.2.6.Kabupaten Luwu Timur.	115
4.2.3.2.3.2.7.Kabupaten Toraja Utara.	116
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN.	119
5.1.Kesimpulan	119
5.2.Rekomendasi Kebijakan	120

**DAFTAR REFERENSI
LAMPIRAN - LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

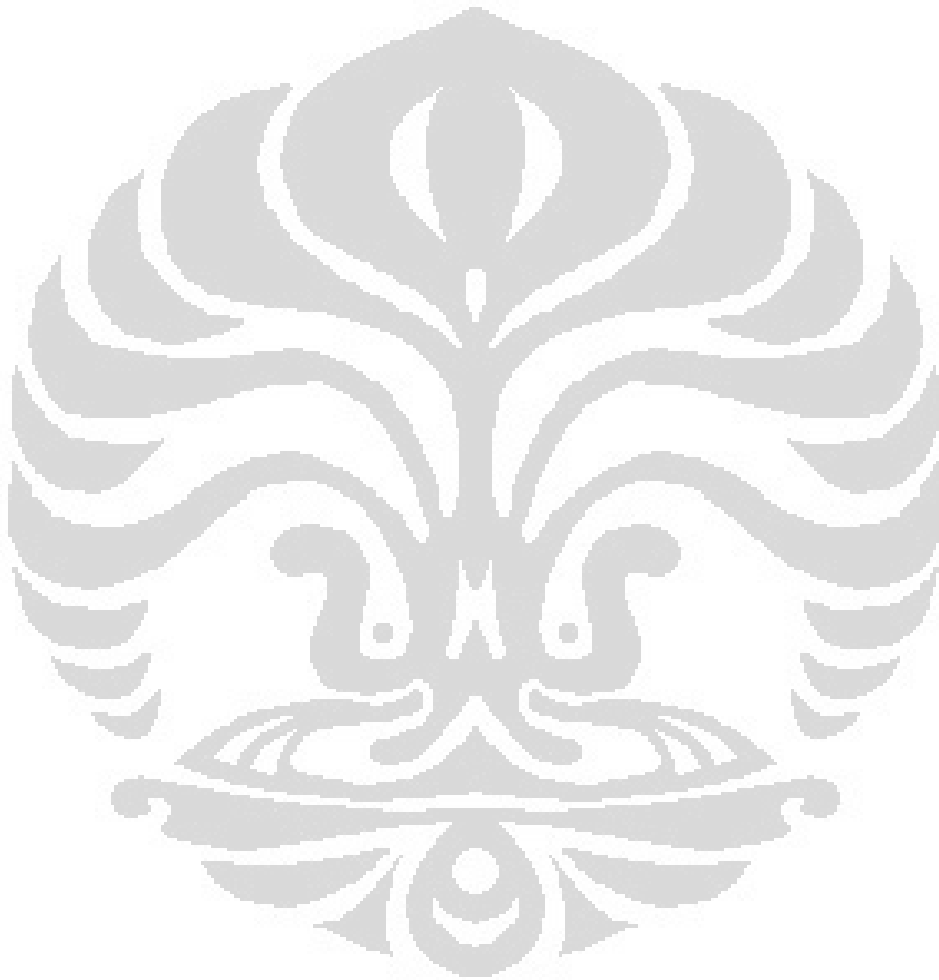
	Hal
Gambar 2.1. Kurva Permintaan Pendidikan Oleh Masyarakat Miskin dan Masyarakat Kaya	28
Gambar 3.1. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Selayar Tahun 2010	37
Gambar 3.2. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Bulukumba Tahun 2010	38
Gambar 3.3. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Bantaeng Tahun 2010	39
Gambar 3.4. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Jeneponto Tahun 2010	40
Gambar 3.5. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Takalar Tahun 2010	41
Gambar 3.6. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Gowa Tahun 2010	42
Gambar 3.7. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Sinjai Tahun 2010	43
Gambar 3.8. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Maros Tahun 2010	44
Gambar 3.9. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Pangkep Tahun 2010	45
Gambar 3.10. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Barru Tahun 2010	46
Gambar 3.11. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Bone Tahun 2010	47
Gambar 3.12. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Soppeng Tahun 2010	48

Gambar 3.13.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Wajo Tahun 2010	49
Gambar 3.14.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Sidrap Tahun 2010	50
Gambar 3.15.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Pinrang Tahun 2010	51
Gambar 3.16.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Enrekang Tahun 2010	52
Gambar 3.17.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Luwu Tahun 2010	53
Gambar 3.18.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010	54
Gambar 3.19.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010	55
Gambar 3.20.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010	56
Gambar 3.21.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010	57
Gambar 3.22.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kota Makassar Tahun 2010	58
Gambar 3.23.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kota Pare - Pare Tahun 2010	59
Gambar 3.24.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kota Palopo Tahun 2010	60
Gambar 3.25.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga yang memiliki Anak Usia SD di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010	62

Gambar 3.26.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga yang memiliki Anak Usia SMP di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010	63
Gambar 3.27.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga yang memiliki Anak Usia SD di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010	65
Gambar 3.28.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga yang memiliki Anak Usia SMP di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010	66
Gambar 3.29.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga yang memiliki Anak Usia SD di Pusat Kegiatan Lokal Selatan - Tengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010	67
Gambar 3.30.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga yang memiliki Anak Usia SMP di Pusat Kegiatan Lokal Selatan – Tengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010	68
Gambar 3.31.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga yang memiliki Anak Usia SD di Pusat Kegiatan Lokal Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010	69
Gambar 3.32.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga yang memiliki Anak Usia SMP di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Utara di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010	70

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Alokasi anggaran pendidikan dalam APBN Periode Tahun Anggaran 2001 – 2010	25
Tabel 4.1. Besaran Dana BOS Untuk Setiap Jenjang Pendidikan Berdasarkan Lokasi Tahun 2010	78



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pendidikan adalah merupakan salah satu faktor utama pembangunan manusia dan merupakan layanan dasar bagi seluruh warga negara. Menurut UNESCO dalam (Toyamah, 2004) Pendidikan merupakan elemen penting dalam rangka memerangi kemiskinan, memberdayakan wanita, dan menyelamatkan anak-anak dari berbagai upaya eksploitasi. Dengan pendidikan diharapkan masyarakat dapat memahami setiap permasalahan yang melingkupi diri dan masyarakatnya. Setiap individu diharapkan untuk ikut serta mengikuti semua jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah dan atas serta perguruan tinggi. Selain kemiskinan, hal yang penting untuk dilawan adalah kebodohan. Kebodohan hanya akan dapat diatasi dengan pendidikan.

Ketiadaan akses terhadap pendidikan merupakan hal utama yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan dan ketiadaan akses terhadap pendidikan memiliki korelasi yang kuat terhadap pendapatan yang tidak merata. Satu dari setiap lima anak di negara berkembang atau sekitar 113 juta anak tidak memiliki akses terhadap pendidikan sekitar 880 juta orang dewasa mengalami buta huruf. Dua per tiga dari anak yang putus sekolah dan orang dewasa yang buta huruf adalah perempuan. Satu dari setiap empat anak yang bersekolah mengalami putus sekolah pada level pendidikan dasar. Pada tahun 2015, diperkirakan lebih dari 100 juta anak usia sekolah tidak bisa menikmati pendidikan dasar (Aya Aoki dkk, 2001).

Kegagalan dalam menyediakan layanan dasar berupa pendidikan adalah masalah yang serius bagi negara berkembang untuk mengurangi kemiskinan. Banyak penelitian yang menggambarkan bahwa persoalan penyediaan layanan dasar berupa pendidikan kepada semua individu banyak terkendala oleh faktor terutama bagi kalangan perempuan, suku minoritas, anak panti asuhan, orang yang memiliki kelainan mental dan fisik dan mereka yang hidup di daerah perdesaan. Pendidikan dasar atau pemberantasan buta huruf, sangat penting untuk dilakukan sehingga memberikan kontribusi maupun manfaat terhadap pertumbuhan

ekonomi. Pendidikan juga merupakan instrumen penting bagi masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan potensi dan kualitas kehidupan, meningkatkan mobilitas pekerja, meningkatkan tingkat kesehatan anak dan orang tua, mengurangi tingkat kesuburan dan kematian anak dan memberdayakan potensi demokrasi dalam sistem politik sebuah masyarakat (Aya Aoki dkk, 2001).

Ada empat (4) hal yang berpengaruh besar terhadap pendidikan seperti dikemukakan oleh Aya Aoki dkk (2001), sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan masyarakat, meliputi tingkat pendidikan dasar yang diikuti, perbedaan gender dalam partisipasi pendidikan, hasil belajar, tingkat baca tulis orang dewasa.
2. Karakteristik individu, rumah tangga dan masyarakat. Karakteristik individu berupa gender, kemampuan dasar, kesehatan, nutrisi, adanya cacat tubuh, pendidikan anak usia dini. Karakteristik rumah tangga berupa pendidikan orang tua, pendapatan, status kesehatan rumah tangga, kesadaran orang tua terhadap pendidikan dan kehidupan masyarakat. Karakteristik masyarakat berupa kondisi geografi dan lingkungan masyarakat (desa/kota), basis ekonomi dan sumber daya yang tersedia, kondisi tenaga kerja, budaya dan agama, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, pengembangan infrastruktur.
3. Sistem pendidikan dan sektor yang terkait. Meliputi pendidikan formal, pendidikan nonformal dan sektor lainnya yang terkait. Pendidikan formal meliputi sekolah dasar negeri dan swasta yang tersedia, kualitas pendidikan, efisiensi dan akuntabilitas pendidikan, adanya program yang mampu mengatasi berbagai macam kendala pendidikan seperti ketidakmampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan, budaya dan sebagainya, serta keseimbangan antara pendidikan menengah dan tinggi. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan dasar bagi orang dewasa. Sektor lainnya yang terkait, misalnya pengembangan ekonomi masyarakat, layanan kesehatan, program bagi anak-anak dan perempuan, bantuan sosial, infrastruktur, dan teknologi komunikasi dan informasi.

4. Kebijakan dan tindakan pemerintah. Hal ini meliputi kebijakan makroekonomi dan fiskal, stabilitas dan keterbukaan politik, strategi pendidikan secara menyeluruh, alokasi sumber daya untuk pendidikan, system pemerintahan dan desentralisasi, kualitas layanan sosial, perencanaan pengembangan negara berupa infrastruktur, ekonomi dan layanan sosial.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan menurut Kartono (1992) dalam Daulay (2008) pendidikan merupakan komponen ekonomi yang penting, karena dapat memproduksi tenaga kerja terampil yang dapat memasuki pasaran kerja, disamping membentuk manusia-manusia ekonomis untuk pembangunan masyarakat demi kelestarian hidup bangsa.

Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil dan terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Investasi pendidikan sangat penting dalam memberikan ransangan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi terutama bagi negara yang berpendapatan rendah. Tanpa pendidikan, usaha untuk mengurangi kemiskinan dalam jangka waktu panjang adalah sesuatu yang tidak mungkin. Pendidikan memberikan pengaruh langsung terhadap produktifitas tenaga kerja, meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam, adaptasi teknologi dan inovasi yang cepat. Hal ini merupakan hal yang fundamental dalam menciptakan iklim yang kompetitif, pengetahuan berbasis ekonomi, tidak hanya pada produksi secara

langsung dan produktifitas para pekerja tetapi juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu ekonomi yang demikian cepat yang tentunya berpengaruh besar terhadap para pekerja dan penduduk baik sektor modern maupun tradisional dalam meningkatkan produktifitasnya (Porter, 1998 dan Hanushek and Kimko, 2000 dalam Aya Aoki dkk, 2000).

Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan, baik dari segi mutu maupun alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan Negara lain, Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan, dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Humas Kementerian Riset dan Teknologi (2011) bahwa dalam era otonomi daerah, layanan pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Sejak diterapkan pada tahun 2001, tanggungjawab pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan kepada masyarakat semakin tinggi. Kewenangan pendidikan dasar dan menengah telah sepenuhnya diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota.

Salah satu peran negara adalah menyediakan fasilitas pendidikan bagi seluruh rakyatnya. Keberadaan negara menjadi demikian penting untuk ikut mencerdaskan bangsa dan seluruh penduduknya. Setiap warga negara bersamaan haknya untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan bermutu.

Menurut Brodjonegoro, (2011) bahwa pendidikan sebagai salah satu dari 11 program prioritas nasional 2010 – 2014 selain daripada reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.

Pemerintah Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang telah mempersyaratkan anggaran sebesar 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

mulai tahun 2010. Kebijakan anggaran sebesar itu diperuntukkan untuk ketersediaan layanan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia disemua level dan tingkatan pendidikan. Layanan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia diharapkan memberikan solusi terhadap persoalan sumber daya manusia Indonesia yang selama ini dianggap jauh tertinggal dari negara – negara lainnya dikawasan Asia Tenggara.

Semakin tingginya anggaran pendidikan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan seperti yang diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar 1945. Seiring dengan hal tersebut, desentralisasi pendidikan diharapkan dapat lebih mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan, serta mendekatkan kebijakan pendidikan pada masalah riil di daerah.

Salah satu ukuran keberhasilan pendidikan adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri. Angka partisipasi kotor (APK) dan angka partisipasi murni (APM) sebagai ukuran aksesibilitas meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun. APM SD meningkat dari 91,5 pada tahun 1995 menjadi 92,3 pada tahun 2000. Kemudian 93,2 pada tahun 2005 dan menjadi 94,4 pada tahun 2009. Demikian juga dengan APM SMP yang meningkat dari 51,0 pada tahun 1995 menjadi 62,2 pada tahun 2005 dan menjadi 67,4 pada tahun 2009.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 disebutkan bahwa karena terbatasnya anggaran pemerintah untuk pendidikan, maka strategi pembiayaan pendidikan nasional selama kurun waktu lima tahun kedepan disusun dalam skala prioritas. Penetapan prioritas pembangunan pendidikan diprioritaskan pada :

1. Keberpihakan pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga kurang beruntung karena faktor – faktor ekonomi, geografi dan sosial budaya untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Tuntutan prioritas karena adanya perubahan kebijakan pendidikan termasuk dalam pemenuhan hak – hak konstitusional warga negara pada setiap satuan,

jenjang dan jenis pendidikan baik pada jalur formal maupun non formal serta untuk menjaga komitmen internasional dan kepentingan nasional.

3. Prediksi perkembangan kemampuan keuangan negara dan potensi kontribusi masyarakat terhadap pendidikan.

Dalam renstra pendidikan tersebut juga disebutkan bahwa kebijakan desentralisasi pendidikan menuntut peningkatan kemampuan daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat menyusun strategi pembiayaan untuk dapat mencapai target-target program yang disusun dalam perencanaan pendidikan untuk lima tahun kedepan. Strategi pembiayaan disusun dengan memperhitungkan proyeksi a) pendapatan asli daerah (PAD), b) dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), c) dana otonomi khusus dan penyeimbang, dan d) perkiraan alokasi belanja pemerintah pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan (DTP). Sumber pendanaan lainnya yang dapat diperhitungkan adalah bantuan luar negeri, khususnya untuk pembiayaan program-program prioritas.

Pembiayaan pendidikan menurut renstra pendidikan tahun 2005 – 2009 adalah melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin dan atau masyarakat kurang beruntung lainnya.
2. Memperkuat otonomi dan desentralisasi pendidikan.
3. Memberikan insentif dan disinsentif bagi : a) perluasan dan pemerataan akses pendidikan, b) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan secara berkelanjutan, c) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra public pengelola pendidikan.

Menurut Ibnu Purna dkk (2011) pada tahun 2005 alokasi anggaran Depdiknas ini mencapai Rp. 23.117,4 Milyar atau 19,23 % dari total APBN. Selanjutnya terus mengalami kenaikan pada tahun 2006 mencapai Rp. 37.095,1 Milyar atau 22,44% dari total APBN, Rp. 40.476,8 Milyar atau 18,95% pada tahun 2007, Rp. 45.296,7 tahun 2008 atau 16,67% dan pada tahun 2009 anggaran Depdiknas adalah sebesar Rp. 62.098,3 Milyar atau 19,76% dari APBN.

Menurut Toyamah et al. (2004) bahwa secara umum saat ini pendidikan nasional dihadapkan pada beberapa persoalan mendasar yakni :

1. Rendahnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, baik antar wilayah, antar tingkat pendapatan penduduk, maupun antar gender.
2. Rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan antara lain karena kurikulum yang tidak terkait dengan kebutuhan lapangan kerja, rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga pengajar, serta terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.
3. Lemahnya manajemen penyelenggaraan pendidikan, baik di lembaga formal maupun masyarakat.

Dengan besaran alokasi anggaran untuk pendidikan tersebut memiliki manfaat yang cukup besar bagi pemerataan kesejahteraan dan peningkatan akses pendidikan oleh masyarakat miskin Indonesia bukan hanya setelah orde reformasi, namun pada saat orde baru pun demikian. Berdasarkan hasil penelitian Van De Walle (1992) belanja pemerintah dalam bidang pendidikan lebih banyak menyentuh masyarakat miskin daripada belanja pemerintah terhadap kesehatan. Subsidi pendidikan terhadap pendidikan dasar dan menengah paling banyak menyentuh masyarakat miskin Indonesia dan meningkatkan standar hidup mereka. Pendidikan juga telah membuka ketertutupan masyarakat miskin di daerah terpencil.

Lebih jauh Van De Walle, (1992) mengemukakan bahwa dengan subsidi pendidikan menyentuh masyarakat miskin dengan dua alasan : 1) keluarga miskin memiliki lebih banyak anak, 2) keluarga kaya akan berusaha untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta.

Akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial terutama pendidikan telah lama menjadi isu yang mendunia, tidak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan kadangkala membuat keluarga miskin tidak mendapatkan akses terhadap fasilitas-fasilitas umum yang disediakan pemerintah jika dibanding dengan mereka yang hidup berkecukupan. Selain itu, faktor tempat tinggal (urban dan rural), tinggal di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa, gender juga berbeda. (Van De Walle, 1992).

Lebih lanjut Van De Walle (1992), mengemukakan bahwa standar hidup rumah tangga tergantung pada dua hal, pertama apa yang mereka miliki sebagai sebuah keluarga dan manfaat yang mereka terima dari layanan public yang dibiayai oleh pemerintah seperti pendidikan dan kesehatan.

Klasifikasi pengeluaran pemerintah menurut Suparmoko dalam Desi Dwi Bastias, (2010) adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas.

Masih menurut Suparmoko dalam Desi Dwi Bastias (2010) ada bermacam-macam pengeluaran pemerintah seperti :

1. Pengeluaran yang *self liquidating* sebagian atau sepenuhnya artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa atau barang-barang yang bersangkutan. Misalnya, pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek-proyek produktif.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya, pengeluaran untuk bidang pertanian, pendidikan, dan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan perekonomian masyarakat.
3. Pengeluaran yang tidak termasuk *self liquidating* dan tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambahkan kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. misalnya untuk mendirikan fasilitas rekreasi, monumen dan sebagainya.

4. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa datang. Misalnya, pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 disebutkan bahwa misi pembangunan Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2008 - 2013 ada 5 (lima) masing-masing sebagai berikut, *Pertama*, meningkatkan kualitas pelayanan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat yang meliputi: (1) ketersediaan pangan terjangkau dan aman; (2) layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas; (3) layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas; (4) kesempatan kerja dan lapangan usaha; (5) layanan perumahan dan sanitasi; (6) akses air bersih; (7) kepastian pemilikan dan penguasaan tanah; (8) sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (9) rasa aman dan tenteram; (10) partisipasi dalam kehidupan sosial-politik. *Kedua*, mengakselerasi laju peningkatan dan pemerataan kesejahteraan melalui penguatan ekonomi berbasis masyarakat. *Ketiga*, mewujudkan keunggulan lokal untuk memicu laju pertumbuhan ekonomi wilayah. *Keempat*, menciptakan iklim kondusif bagi kehidupan yang inovatif dan *kelima*, menguatkan kelembagaan dalam perwujudan tatakelola yang baik.

Dalam misi pertama yakni meningkatkan kualitas pelayanan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat yang tertera pada tujuan ketiga yang berbunyi peningkatan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan program pendidikan gratis untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan mengalokasikan anggaran pendidikan untuk komponen yang tidak dibiayai oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terutama dengan memberikan insentif kepada seluruh guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga kontrak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan layanan dan pemerataan pendidikan di Sulawesi Selatan. Selain itu, Pemerintah Sulawesi Selatan bersama-sama dengan 24 Pemerintah Kabupaten/Kota telah membuat Nota Kesepahaman (MOU) tentang Program Pendidikan Gratis dengan mengalokasikan minimal 20 %

anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing – masing Kabupaten/Kota untuk sektor pendidikan.

Besarnya anggaran tersebut tentunya akan berimplikasi nyata dalam peningkatan Angka Partisipasi Kotor (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) terhadap pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan. Layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas penting untuk dijadikan prioritas utama dalam pembangunan pendidikan. Terjangkau berarti dapat diakses oleh seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan tanpa ada kecuali baik dari sisi tingkat ekonomi/pendapatan rumah tangganya, agama, suku dan latar belakang rumah tangganya.

Berdasarkan Statistik Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Sulawesi Selatan Tahun 2010, dari 6,3 juta jiwa penduduk Sulawesi Selatan sekitar 10,1 % diantaranya tidak/belum pernah sekolah, 22,4 % yang tidak memiliki ijazah, 27,12 % penduduk yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD), 15,6 % yang hanya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 18,8 % yang tamat Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan hanya 6,5 % yang tamat pendidikan dilevel Sarjana dan Pasca Sarjana (D1 – S3).

Kondisi ini tentu memprihatinkan jika melihat realitas tersebut diatas. Apalagi jumlah yang belum/tidak pernah sekolah yang demikian besar. Demikian juga dengan jumlah penduduk yang tidak memiliki ijazah sama sekali. Padahal, kebijakan pemerintah saat ini untuk membebaskan biaya pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun sudah lama diterapkan.

Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan kajian penelitian tentang distribusi manfaat belanja pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di sektor pendidikan tahun 2010.

1.2.Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana distribusi pendapatan masyarakat di 24 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010 ?
2. Bagaimana distribusi manfaat belanja pendidikan menurut kelompok pendapatan rumah tangga untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan ?

1.3.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan bahasan yang dikemukakan dalam rumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menghitung distribusi pendapatan masyarakat di 24 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Menganalisis distribusi manfaat belanja pendidikan di 24 kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan untuk rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12 tahun) dan sekolah menengah pertama (13 – 15 tahun).

1.4.Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas distribusi manfaat belanja pemerintah di 24 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di sektor pendidikan tahun 2010 dengan ruang lingkup belanja pendidikan per murid di level sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Selain itu akan menganalisis distribusi manfaat belanja pendidikan untuk setiap kelompok rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12 tahun) dan anak usia sekolah menengah pertama (13 – 15 tahun) dan manfaat belanja pendidikan tersebut terhadap kelompok masyarakat miskin.

1.5.Metodologi

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggambarkan tentang belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan di sektor pendidikan. Pendekatan yang dipakai adalah *Benefit Incidence Analysis* untuk melihat sebaran distribusi manfaat belanja pemerintah terhadap kalangan masyarakat miskin di Sulawesi Selatan. Selain itu, dilakukan analisis berupa

kurva Lorenz untuk melihat ketimpangan pendapatan di masing-masing kabupaten/kota se Sulawesi Selatan.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui beberapa lembaga pemerintah sebagai berikut :

1. Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2010 dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Data SUSENAS yang dipakai adalah data SUSENAS untuk Provinsi Sulawesi Selatan baik untuk rumah tangga maupun individu. SUSENAS tahun 2010 mencakup 24 kabupaten/kota, 304 kecamatan dan 2965 desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 62.802 individu atau sekitar 14.595 rumah tangga. Dalam penelitian ini, survey ini digunakan untuk mengestimasi ukuran kesejahteraan berupa pendapatan rumah tangga dan jumlah partisipasi sekolah.
2. Data realisasi belanja pemerintah di sektor pendidikan baik di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan untuk data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan diperoleh melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Selatan dan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
3. Data partisipasi sekolah di tiap level pendidikan, jumlah sekolah dan guru didapatkan melalui Kementerian Pendidikan Nasional.

1.6.Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini mempunyai bertujuan mengetahui belanja per murid, distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12 tahun) dan sekolah menengah pertama (13 – 15 tahun) dan distribusi manfaat belanja pendidikan di 24 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan ini akan berhasil jika penelitian ini dapat mendefinisikan obyek

pengamatan penelitian secara tepat. Untuk itu penelitian ini menetapkan variabel-variabel penelitian sebagai berikut :

1. Belanja pendidikan adalah belanja pendidikan yang tercatat pada realisasi belanja Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk SD dan SMP ditambah dengan dana dekonsentrasi berupa dana BOS dari Kemendiknas tahun 2010 yang diterima oleh SD/SMP yang ada di Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Jumlah murid adalah jumlah orang yang tercatat dalam data Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai murid SD/SMP pada tahun ajaran 2009/2010.
3. Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan masing-masing rumah tangga per bulan yang tercatat dalam Susenas Kor tahun 2010.
4. Pengguna layanan pendidikan adalah jumlah orang yang berasal dari tiap desil kelompok pendapatan yang terdata sebagai murid SD/SMP dalam Susenas Kor tahun 2010 di Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Individu usia sekolah adalah individu usia 7-12 tahun untuk SD, individu usia 13-15 tahun untuk SMP, yang tercatat dalam Susenas Kor tahun 2010.

1.7.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini tersusun dalam lima bab yakni pada Bab 1 berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang yang mendasari penelitian ini, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel dan sistematika penulisan penelitian.

Pada Bab 2 berisi tinjauan pustaka yang membahas tentang teori yang mendasari distribusi dampak belanja pemerintah dan hasil penelitian sebelumnya terutama di Indonesia. Untuk Bab 3 berisi pembahasan tentang distribusi pendapatan rumah tangga di 24 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedangkan pada Bab 4 membahas tentang distribusi manfaat belanja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010. Dalam

bab ini adalah pembahasan terhadap data yang didapatkan dalam penelitian ini menyangkut distribusi manfaat belanja pemerintah di sektor pendidikan terhadap rumah tangga miskin di masing – masing di 24 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010.

Pada bagian terakhir yakni Bab 5 membahas tentang kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan pada bab 4 dan rekomendasi kebijakan yang berisi kebijakan publik yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kesimpulan yang didapatkan sebelumnya.



BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1. Belanja Pemerintah

Distribusi adalah proses pemerataan barang dan jasa kesuatu wilayah tertentu. Proses pemerataan itu sendiri bisa melalui alat transportasi maupun melalui kebijakan. Dampak adalah pengaruh yang dihasilkan dari suatu perbuatan atau tindakan.

Menurut Demery (2000) pemberian layanan dasar kepada masyarakat miskin merupakan salah satu instrumen yang paling efektif dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

Demery (2000) dalam Galata Conda Prihastanto (2011) belanja pemerintah dapat memberikan dampak bagi masyarakat dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal ini mempengaruhi keseimbangan perekonomian makro seperti defisit fiskal dan perdagangan dan tingkat inflasi. Perubahan ini mempengaruhi standar hidup baik secara langsung melalui peningkatan pendapatan riil dan tidak langsung melalui perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi.
2. Belanja publik menciptakan pendapatan secara langsung dan mungkin diantaranya memberikan manfaat untuk keluarga miskin. Pendapatan ini akan menciptakan pendapatan lain melalui efek berganda pendapatan dan pengeluaran tersebut.
3. Belanja publik merupakan transfer kepada masyarakat, transfer dapat berupa uang tunai, seperti bantuan sosial atau pembayaran asuransi sosial dan in kind seperti subsidi pada layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Transfer dalam bentuk in kind dapat meningkatkan standar hidup penerima manfaat secara langsung dan juga potensi pendapatannya dalam jangka panjang.

Menurut Lionel Demery, (2000) belanja publik akan banyak bermanfaat bagi masyarakat miskin apabila :

1. Belanja pemerintah akan efektif mengurangi tingkat kemiskinan ketika kebijakan yang diambil itu tepat. Belanja publik dalam pendidikan dasar

terhadap kaum perempuan akan sia-sia jika ada pembatasan terhadap kaum perempuan ketika akan memasuki dunia kerja dan jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Bagaimana mungkin meningkatkan anggaran untuk pertanian dan penelitian tapi hasil pertaniannya tidak memberikan hasil yang menguntungkan. Belanja yang pro masyarakat miskin harus disinkronisasikan dengan kebijakan yang pro masyarakat miskin.

2. Proses belanja pemerintah (termasuk manajemen anggaran, akuntabilitas, transparansi, dan lain lain) harus berorientasi pada hasil akhir dan dampak langsungnya terhadap masyarakat miskin dan bukan terfokus pada berapa banyak yang dibelanjakan.
3. Kebijakan publik harus umum dan belanja pemerintah harus secara khusus, harus berdasar pada analisa kebutuhan dan tingkat populasi penduduk yang menjadi sasaran. Dalam hal ini penting untuk dilakukan kolaborasi antara pemerintah dengan masing-masing rumah tangga. Agar kolaborasi tersebut efektif maka perlu dilakukan komunikasi dua arah antara keduanya. Pemerintah wajib mendengarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat/rumah tangga dan masyarakat/rumah tangga harus mengetahui tujuan daripada kebijakan pemerintah tersebut.

Menurut Aaron dan Mc Guire (1970) dalam Lionel Demery, bahwa solusi yang tepat untuk mengetahui apakah dampak belanja pemerintah itu dirasakan langsung oleh masyarakat miskin adalah bahwa masyarakat miskin yang menjadi sasaran belanja pemerintah harus bisa melakukan evaluasi secara individu terhadap nilai barang/jasa publik tersebut dengan melihat pada kebutuhannya dan harga normalnya. Hal ini terjadi karena perbedaan kebutuhan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Hal lain dikemukakan oleh Brennan (1976) bahwa pendekatan kebutuhan tidak terlalu baik tapi yang penting adalah menilai barang/jasa publik berdasar pada marginal costnya. Akibat dari perbedaan pendapat ini, akhirnya berkembang dua pendekatan dalam menilai manfaat belanja pemerintah terhadap masyarakat miskin. *Pertama*, Aaron dan Mcguire (1970) mendasarkan pada preferensi individu terhadap kebutuhannya akan barang/jasa publik. Hal ini diistilahkan oleh Van Den Walle (1998) sebagai

Behavioral Approach. Pendekatan ini dibangun atas dasar teori makro ekonomi bahwa kebutuhan dan pengetahuan terhadap barang/jasa tergantung pada rumah tangga/individu. *Kedua*, melalui pendekatan Benefit Incidence Analysis (BIA) yang mengkombinasikan antara biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan distribusi manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini di populerkan melalui penelitian oleh Selowsky (1979) di Kolombia dan Meerman (1979) di Malaysia.

Masalah seputar keuangan daerah muncul seiring dengan perkembangan sistem dan tata nilai otonomi. Pada tahun 2002 muncul Kepmendagri Nomor 29 yang mengenalkan sistem penyusunan anggaran baru yang dikenal dengan sistem penganggaran berbasis kinerja. Penyusunan anggaran berbasis kinerja mempunyai dampak yang signifikan bagi pelaksanaan program pembangunan, karena sistem ini mengaitkan antara pemanfaatan anggaran daerah dengan nilai manfaat program yang diterima masyarakat, sehingga penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan diharapkan menjadi lebih efektif. Namun demikian pada awal tahun penerapannya, sistem ini menimbulkan kendala ketidaksiapan aparat di daerah dalam pengaplikasiannya. Melalui sistem penganggaran yang baru ini diharapkan terjadi perubahan volume belanja publik untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, karena selama ini volume belanja publik selalu tidak proporsional dibandingkan dengan belanja aparatur (Nurdin, 2006).

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 telah mengubah manajemen pelayanan publik. Semula, semua bidang pelayanan pemerintah merupakan kewenangan pemerintah pusat sekarang bergeser ke pemerintah daerah kecuali untuk beberapa bidang yang masih menjadi wewenang pusat seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, fiskal, moneter dan agama. Pembagian kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2000 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi

dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Utami, 2010 (Galata Conda Prihastanto, 2011).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 (1), bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial (Mutiar Maemunah, 2006).

2.2.Pendidikan Sebagai Barang Publik

Rosen (2002) dalam Prihastanto (2011) barang publik mempunyai ciri *non rivalry* dan *non excludable*. *Non rivalry* berarti sekali suatu barang disediakan maka biaya tambahan bagi orang lain yang mengkonsumsi barang tersebut adalah nol. *Non excludable* berarti sulit atau sangat mahal mencegah orang lain untuk menikmati barang tersebut.

Stiglitz (2000) dalam Prihastanto (2011) menggolongkan pendidikan sebagai barang privat karena bersifat *rivalry* dan *excludable*. Pendidikan merupakan barang yang mempunyai *marginal cost* lebih dari nol berbeda dengan barang publik yang memiliki *marginal cost* sebesar nol. Hal ini berarti penambahan setiap individu yang menggunakan pendidikan akan meningkatkan biaya secara signifikan. Jika penyediaan pendidikan hanya diserahkan kepada pasar dengan mekanisme harga maka pasar akan menetapkan harga tinggi. Penyediaan pendidikan oleh swasta saja akan menciptakan kondisi jumlah pemerataan pendidikan di bawah permintaannya. Kondisi tersebut disebabkan masyarakat tidak dapat mengakses pendidikan akibat harga penawaran yang diberikan oleh pihak swasta sebagai penyedia layanan pendidikan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat.

Manasan (2007) dalam Prihastanto (2011) ada beberapa hal yang mendasari pemerintah melakukan belanja publik untuk sektor pendidikan yaitu :

1. Pendidikan khususnya pendidikan dasar secara umum memberikan keuntungan bagi masyarakat daripada pribadi atau dengan arti lain pendidikan dasar mempunyai eksternalitas positif yang kuat.
2. Keuntungan dari pendidikan tidak sepenuhnya diterima oleh orang tua maka sebagian besar dari mereka khususnya kelompok miskin mengambil keputusan untuk tidak memberikan kesempatan kepada anaknya bersekolah.
3. Biaya pendidikan khususnya pendidikan tinggi biasanya tidak dapat dijangkau oleh keluarga miskin di banyak negara dan mereka juga mengalami kesulitan meminjam uang untuk biaya sekolah dari lembaga keuangan.
4. Pendidikan merupakan faktor yang menentukan tingkat pendapatan individu kedepan dan resep utama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

2.3.Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wasitohadi, 2008).

Desentralisasi dapat didefinisikan sebagai transfer wewenang atau kekuasaan dalam perencanaan publik manajemen dan pembuatan keputusan dari level nasional ke level sub nasional atau secara umum dari level yang tinggi ke level yang lebih rendah dalam pemerintahan. Desentralisasi juga meliputi perubahan hubungan kekuasaan dan distribusi tindakan diantara level pemerintahan (Mills, 1984 dalam Afridian Wirahadi Ahmad, 2008). Sedangkan menurut Hirawan (2007) desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Semakin besar suatu negara, (dilihat dari penduduk dan luas wilayah) maka biasanya semakin kompleks dan “heterogen” pemerintahannya yang tercermin dari tingkatan pemerintah daerah. Litvack (1999) dalam Hirawan (2007) membagi desentralisasi itu menjadi 3 jenis yakni :

1. Desentralisasi politik, melimpahkan kepada daerah kewenangan yang lebih besar menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standard an berbagai peraturan.
2. Desentralisasi administrasi, berupa redistribusi kewenangan, tanggungjawab dan sumber daya diantara berbagai tingkat pemerintahan. Kapasitas yang memadai disertai kelembagaan yang cukup baik disetiap tingkat merupakan syarat agar hal ini bisa efektif.
3. Desentralisasi fiskal, menyangkut kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

Syahrudin (2006) dalam Afridian (2008) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai wewenang (*authority*) dan tanggungjawab (*responsibility*) dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah (APBD) oleh pemerintah daerah. Sedangkan Ferdiana dkk (2008) dalam Afridian (2008) desentralisasi fiskal adalah pemindahan kekuasaan untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya *financial* dan fiskal. Sidik (2002) dalam Afridian (2008) Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk surcharge of taxes, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.

Hirawan (2007) mengemukakan bahwa secara eksplisit, manfaat dari kebijakan desentralisasi terhadap layanan publik dan orang miskin adalah :

1. Desentralisasi dapat mendorong partisipasi dari orang miskin yang difasilitasi dengan pengeluaran investasi pemerintah yang pro orang miskin.
2. Desentralisasi dapat membantu pemerintah daerah memperbaiki efisiensi dari pelaksanaan layanan publik untuk rakyat (miskin) dan pentargetan dari program transfer secara efisien.

2.4.Desentralisasi Pendidikan

Menurut Djalal (2001) dalam Wasitohadi (2008) era otonomi daerah telah mengakibatkan terjadinya pergeseran arah paradigme pendidikan dari paradigme lama ke paradigme baru meliputi berbagai aspek mendasar yang saling berkaitan yaitu; 1) dari sentralistik menjadi desentralistik, 2) dari kebijakan yang top down ke kebijakan yang bottom up, 3) dari orientasi pengembangan parsial menjadi orientasi pengembangan holistic, 4) dari peran pemerintah sangat dominan ke meningkatnya peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif serta 5) lemahnya peran institusi non sekolah ke pemberdayaan institusi masyarakat, baik keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pesantren maupun dunia usaha.

Kasih dan Suganda (1999) dalam Daulay (2008) mengemukakan ada beberapa hal yang berkaitan dengan pemerataan pendidikan yaitu *pertama*, pemerataan atau perluasan kesempatan belum bisa diartikan sebagai pemerataan partisipasi karena dari pemerataan kesempatan menjadi pemerataan partisipasi masyarakat ada dua hal yang penting, 1) kemauan dan 2) kemampuan calon partisipan. Dengan demikian, meskipun kesempatan untuk berpartisipasi dibuka seluas-luasnya, pasti tidak mungkin seluruh angkatan usia 14 – 19 tahun menjadi partisipan. *Kedua*, ide tentang perluasan kesempatan banyak mendapat dukungan dan kenyataannya memang sudah banyak diperbincangkan. Ide pemerataan juga disadari oleh kalangan stakeholder akan tetapi masih belum berani melakukan koreksi internal radikal terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan tetapi tidak sejalan dengan konsep pemerataan itu. *Ketiga*, dalam praktek pelaksanaan pengelolaan pendidikan SMK sehari-hari, ide pemerataan makin terbenam dengan adanya aturan-aturan operasional serta system seleksi diterapkan dalam menerima siswa baru. *Keempat*, besarnya jumlah lulusan sekolah menengah tidak dapat dipungkiri dapat menjadi investasi keliru, menimbulkan pengangguran dan dapat menjadi beban pembangunan. *Kelima*, pemerataan dan kualitas memang merupakan dua hal yang berkaitan, tetapi ada pendapat spekulasi yang menyatakan bahwa dengan pemerataan maka kualitas pendidikan akan menurun. Barangkali yang benar bukanlah “akan” tetapi “bisa”.

Daulay (2008) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan didalamnya tergantung tiga (3) hal yaitu equalitas, aksesibilitas dan equitas. Equalitas berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis. Aksesibilitas berarti bahwa setiap orang tanpa memandang asal usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis, jenjang maupun jalur pendidikan. Equitas berarti keadilan yang mengandung implikasi adanya “perbedaan” perlakuan menurut kondisi internal dan eksternal peserta didik.

Dari keadaan perekonomian saat ini, kiranya perlu untuk mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan yang berakses terhadap kemiskinan dan keterbelakangan menurut Daulay (2008) yang terdiri dari :

1. Pendidikan untuk masyarakat kurang mampu yang jumlahnya masih cukup besar dapat menjadi lebih ekonomis, sebab dapat digunakan untuk membangun angkatan kerja terdidik atau terlatih secara teknis.
2. Menjadi kebutuhan sosial untuk merangsang dinamika serta pengembangan yang sesuai dengan sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” juga asas demokrasi pancasila.

Dampak kebijakan menurut Rein (1976) dan Usman (1993) dalam Daulay (2008) tergantung pada dua (2) perspektif yaitu; 1) perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada alokasi sumber daya (*resources allocation*) dan 2) perspektif yang memfokuskan perhatiannya kepada penampilan kelembagaan (*institutional performance*).

Kotter (1997) dalam Wasitohadi (2008) lembaga yang terdesentralisasi memiliki beberapa keunggulan antara lain; 1) lebih fleksibel, dapat memberikan respon yang lebih cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan yang selalu berubah, 2) lebih efektif, 3) lebih inovatif dan 4) menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih komitmen dan lebih produktif.

Bray dan Fiske (Depdiknas, 2001) desentralisasi pendidikan adalah suatu proses dimana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan

pendidikan termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan. Sedangkan Husen & Postlethwaite (1994) mengartikan desentralisasi pendidikan sebagai pembagian kewenangan dari level pemerintah yang lebih tinggi seperti departemen pendidikan nasional kepada daerah otonom atau bisa juga dari daerah otonom kepada organisasi sekolah yang ada di bawahnya. Gaffar (1990) menyarankan desentralisasi pendidikan merupakan sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada keberagaman dan sekaligus sebagai pelimpahan wewenang dan kekuasaan dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan berbagai problematika sebagai akibat ketidaksamaan geografis dan budaya baik menyangkut substansi nasional, internasional maupun universal sekalipun (Wasitohadi, 2008).

Pendidikan perlu untuk didesentralisasikan, Husen & Postlethwaite (1994) menguraikan alasan pentingnya desentralisasi pendidikan yakni; 1) peningkatan kapasitas sekolah, 2) partisipasi lokal sebagai sebuah bentuk logis dari pemerintahan yang demokratis, 3) berhubungan nilai-nilai fundamental seperti kebebasan, kesamaan hak, *fraternity*, efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Fiske (1998) menyebutkan ada empat (4) alasan rasional diterapkannya system desentralisasi termasuk pendidikan yakni; 1) alasan politis, seperti untuk mempertahankan stabilitas dalam rangka memperoleh legitimasi pemerintah pusat dari masyarakat daerah, sebagai wujud penerapan ideology sosialis dan *laissez-faire* dan untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi, 2) alasan sosio-kultural, yakni untuk memberdayakan masyarakat lokal, 3) alasan teknis administrative dan paedagogies, seperti untuk memangkas manajemen lapisan tengah agar dapat membayar gaji guru tepat waktu atau untuk meningkatkan antusiasme guru dalam proses belajar mengajar, 4) alasan ekonomi-finansial, seperti meningkatkan sumber daya tambahan untuk pembiayaan pendidikan dan sebagai alat pembangunan ekonomi. Huda (1998) desentralisasi pendidikan di Indonesia dimaksudkan untuk mencapai efisiensi pendidikan dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal dengan alasan; 1) secara politik, desentralisasi adalah cara mendemokratiskan manajemen urusan-urusan publik, 2) secara teknis adalah sulit untuk mengelola pendidikan secara efisien di dalam

sebuah wilayah yang luas yang berisi banyak pulau, 3) efisiensi dan efektifitas dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan, 4) untuk mengurangi beban administrasi yang berlebihan dari pemerintah pusat (Wasitohadi, 2008).

Tujuan desentralisasi pendidikan adalah untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan dengan melibatkan lebih banyak stakeholder di daerah untuk menghasilkan integrasi sekolah dengan masyarakat lokal secara terus menerus, untuk mendekatkan sekolah dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dan akhirnya untuk memperbaiki motivasi, kehadiran dan pencapaian murid. Selain itu, desentralisasi pendidikan juga memberikan kesempatan kepada rakyat atau masyarakat luas untuk berpartisipasi secara aktif dan kreatif sehingga pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan bermanfaat bagi pembangunan daerah (Wasitohadi, 2008).

2.5. Anggaran Pendidikan

Dalam garis besarnya, pemerintah mempunyai dua kelompok fungsi yaitu, fungsi ekonomi dan fungsi non ekonomi. Fungsi ekonomi oleh Musgrave (1973) dalam Syaharuddin (2006) disebut sebagai fungsi anggaran yang terdiri dari :

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Function*). Fungsi alokasi ini dilakukan untuk menjaga efisiensi anggaran. Efisiensi dapat terwujud apabila memenuhi 4 (empat) isu penting yakni: a) barang dan jasa apa yang akan disediakan oleh pemerintah, 2) berapa jumlahnya, 3) bagaimana cara penyediaannya, dan 4) siapa yang bertanggungjawab dalam mengambil keputusan penyediaan barang dan jasa tersebut.
2. Fungsi Distribusi (*Distribution Function*). Fungsi distribusi dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi perbedaan-perbedaan pendapatan antar individu dalam masyarakat. Distribusi pendapatan yang optimal adalah merupakan isu utama dalam pelaksanaan fungsi ini. Distribusi yang optimal sulit untuk dijelaskan secara tepat. Oleh karena itu, kebijakannya mengarah kepada mempercepat pertambahan pendapatan masyarakat kelompok berpenghasilan rendah (masyarakat miskin).

3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilisation Function*). Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan kestabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi dapat tercipta bila ekonomi berada pada posisi seimbang.

Ketiga fungsi ini perlu mendapat tempat yang sesuai dengan pengambilan keputusan penyediaan barang publik bagi kesejahteraan masyarakat baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Wahyudi (2004) mengemukakan bahwa upaya untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan harus dilakukan secara terintegrasi baik dari sisi proses penyelenggaraan maupun pembiayaannya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. dalam hal dukungan financial, pada kondisi dimana kontribusi pemerintah masih kecil daripada partisipasi masyarakat, maka komitmen pemerintah pusat maupun daerah dengan meningkatkan pengalokasian anggaran untuk mendukung keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun sangat diperlukan.

Tabel 2.1.
Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN Periode
Tahun Anggaran 2001 – 2010

Tahun	Anggaran Pendidikan (dalam Milyar)	Persentase Anggaran Pendidikan terhadap APBN
2001	13.945	4,42
2002	19.512,93	5,87
2003	20.435,80	5,98
2004	21.628,80	6,18
2005	33.397,60	6,18
2006	44.109,50	10,10
2007	53.067,10	10,50
2008	158.520,10	18,50
2009	207.413,50	20,00
2010	225.200,00	20,00

Sumber : APBN TA 2001-2010 (Utami 2010, Prihastanto, 2011)

Perihal pembiayaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2007, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk memberikan pedoman menyeluruh tentang dukungan keuangan bagi setiap tingkat pendidikan program. Pemerintah pusat bertanggung jawab utama untuk menyediakan sumber dana bagi tingkat pendidikan tinggi. Selain tugas utama tersebut pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab tambahan dalam pembiayaan pendidikan yakni memberikan bantuan tambahan atau subsidi untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal serta layanan pendidikan khusus. Sementara bagi pemerintah provinsi, tanggung jawab utamanya mencakup penyediaan keuangan bagi pendidikan menengah umum dan pendidikan kejuruan serta pendidikan luar biasa. Pemerintah provinsi juga mendapatkan tanggung jawab tambahan untuk memberikan bantuan tambahan atau subsidi bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal serta pendidikan tinggi. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab utama untuk menyediakan sumber dana bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal. Pemerintah kabupaten/kota tidak bertanggung jawab untuk memberikan bantuan tambahan atau subsidi pada layanan pendidikan lainnya seperti tanggung jawab yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dengan demikian, belanja pendidikan pemerintah kabupaten/kota hanya fokus pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal (Prihastanto, 2011).

Menurut Mawardi dan Sumarto (2003) mengemukakan bahwa dalam wacana yang lebih luas, kebijakan *pro-poor budget* sebenarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip-prinsip penganggaran yang baik. IMF (International Monetary Fund), dan FITRA (Forum Transparansi Anggaran) (2001), mengidentifikasi prinsip-prinsip umum penganggaran yang baik antara lain dicirikan oleh faktor – faktor sebagai berikut :

- a. **Transparan:** Beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan antara lain, *pertama*, dokumen anggaran dapat dengan mudah diakses oleh publik. *Kedua*, dibukanya akses/partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan. Hal ini antara lain diindikasikan oleh; 1) Dalam

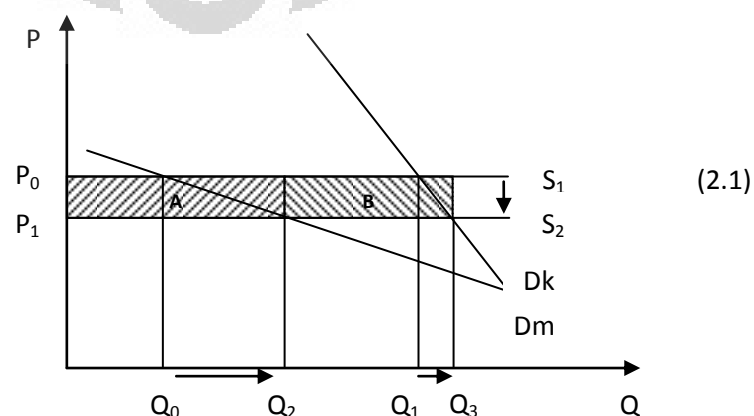
proses penyusunan anggaran dibuka ruang bagi keterlibatan publik secara langsung; 2) Adanya hubungan yang kuat antara program dan nilai alokasi anggaran dengan kondisi aktual kebutuhan masyarakat; dan 3) Prosentase usulan publik yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan penetapan nilai anggaran. Hal ini akan tercermin dari nilai keputusannya itu sendiri, seperti seberapa besar penetapan anggaran mengakomodir kepentingan publik, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. *Ketiga*, adanya kebijakan yang memberikan tempat/ruang kontrol dan monitoring oleh lembaga independen dan masyarakat, baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media "*checks and balances*". *Keempat*, adanya prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan/pengelolaan keuangan (negara dan daerah) yang transparan dan menjamin hak informasi publik.

- b. **Rasional** : Perhitungan besaran penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan cermat berdasarkan data yang akurat sesuai dengan kondisi aktual ekonomi makro dan mikro. Perhitungan dilakukan dengan metode yang jelas dan terukur, bukan dengan perkiraan-perkiraan dan kepentingan pihak tertentu.
- c. **Akuntabel**: Adanya tanggungjawab yang tinggi dari pemerintah (daerah) dalam mengelola anggaran sebagai amanat rakyat. Hal ini dicerminkan oleh:
 1. Adanya komitmen pemerintah untuk mengelola anggaran secara transparan;
 2. Adanya jaminan yang jelas terhadap hak-hak masyarakat dalam pelaksanaan anggaran; dan
 3. Adanya prosedur pertanggungjawaban anggaran oleh pemerintah kepada publik yang diatur dalam suatu kebijakan/peraturan (daerah).
- d. **Keadilan dan Proporsional**: Anggaran dialokasikan secara proporsional pada sektor-sektor tertentu yang sifatnya mendesak dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, sekaligus sebagai kompensasi pemerintah kepada kelompok masyarakat tertentu (miskin) untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang telah menciptakan ketidakadilan ekonomi. Selain menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kebijakan anggaran yang baik harus pula disertai dengan memberikan ruang yang cukup bagi kegiatan yang

berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dalam tahapan proses evaluasi anggaran, beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya adalah: Setiap pelaksanaan anggaran dibuat laporannya dan disampaikan kepada lembaga audit dan publik. Adanya audit pelaksanaan anggaran oleh lembaga independen. Hasil audit disampaikan kepada legislatif dan publik. Setiap temuan audit ditindaklanjuti. Adanya keterlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol pelaksanaan dan menindaklanjuti hasil audit anggaran. Adanya evaluasi dampak, baik dampak umum yang mencakup aspek ekonomi, politik dan sosial, maupun dampak khusus yang terjadi dalam suatu sektor atau program/proyek tertentu. Hasil evaluasi dampak ini kemudian dijadikan acuan untuk merumuskan anggaran pada siklus (tahun) anggaran berikutnya.

Olehnya itu, anggaran pendidikan harusnya lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah kebawah apalagi dengan adanya subsidi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pendidikan itu sendiri. Demand untuk pendidikan lebih elastis terhadap kalangan masyarakat kaya daripada terhadap masyarakat miskin. Untuk itu, dibutuhkan subsidi agar kuantitas masyarakat miskin dalam menikmati pendidikan jauh lebih banyak, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa subsidi yang diberikan langsung kepada sekolah membuat masyarakat kaya jauh lebih banyak menikmati anggaran pendidikan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam kurva berikut ini :

Gambar 2.1.
Kurva Permintaan Pendidikan oleh
Masyarakat Miskin dan Kaya



Berdasarkan gambar 2.1. diatas, dapat dijelaskan bahwa permintaan pendidikan oleh masyarakat miskin ada pada kurva D_m sedangkan permintaan pendidikan untuk masyarakat kaya ada pada kurva D_k . Jika biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh sebesar P_0 maka jumlah murid dari masyarakat miskin akan ada di Q_0 dan jumlah murid dari masyarakat kaya akan sebesar Q_1 . Namun dengan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah karena pendidikan merupakan barang publik, maka murid baik dari kalangan miskin maupun kaya akan menikmati turunnya biaya pendidikan ke P_1 sehingga jumlah murid miskin dapat bersekolah akan naik dari Q_0 ke Q_2 , selain itu jumlah murid dari masyarakat kaya akan bertambah dari Q_1 ke Q_3 . Namun, karena subsidi itu diberikan kesekolah bukan kepada murid maka subsidi untuk kalangan murid miskin hanya dinikmati sebesar arsiran A, sedangkan manfaat subsidi yang diterima oleh murid dari kalangan masyarakat kaya adalah sebesar arsiran A dan arsiran B.

Oleh karena itu perlu dilakukan analisa terhadap distribusi manfaat belanja pemerintah di sektor pendidikan dengan menggunakan Benefit Incidence Analysis (BIA) untuk melihat sejauhmana manfaat anggaran pendidikan tersebut terhadap kalangan masyarakat miskin.

2.6. Benefit Incidence Analysis

Shelden dan Wasylengko (1992) menjelaskan bahwa literatur yang menjelaskan tentang Benefit Incidence Analysis (BIA) memiliki tiga (3) periode berdasarkan karakteristiknya. Periode pertama, sebelum 1975, BIA digunakan untuk menghitung manfaat yang diterima rumah tangga baik berdasarkan pada income per capita ataupun proporsi pendapatan pada rumah tangga. Periode kedua ditandai dengan tiga (3) pendekatan utama; 1) menggunakan data mikro yang menggambarkan tingkat kepuasan rumah tangga terhadap ketersediaan barang publik yang dibiayai dari belanja publik, 2) menggambarkan pentingnya criteria pendapatan rumah tangga dan menghitungnya berdasarkan pada ukuran rumah tangga, 3) pentingnya layanan sosial bagi masyarakat. Periode ketiga ditandai dengan mengistemasi kurva demand untuk berbagai macam layanan sosial.

Penelitian tentang distribusi dampak belanja pemerintah dalam sektor pendidikan telah dilakukan oleh banyak peneliti di dunia. Menurut Juswanto (2010), Selowsky (1979) yang melakukan penelitian tentang distribusi dampak belanja pemerintah dalam bidang pendidikan di Kolombia dan Meerman (1979) yang melakukan penelitian di Malaysia. Keduanya merupakan pionir dari metode Benefit Incidence Analysis (BIA) ini.

Shelden dan Wasylengko (1992) Benefit Incidence Analysis menguji belanja publik dengan berdasar pada tiga (3) kategori utama; 1) belanja publik terhadap barang umum, seperti pertahanan, 2) belanja publik pada barang publik khusus seperti layanan pendidikan dan kesehatan, 3) cash dan in kind transfer atau transfer ke daerah baik yang sifatnya cash maupun non cash.

Cuenca (2008) Benefit Incidence Analysis (BIA) merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan pajak dan subsidi pemerintah berpengaruh terhadap distribusi kesejahteraan terhadap para penduduk. Dengan kata lain, mengevaluasi distribusi subsidi pemerintah terhadap beberapa kelompok masyarakat yang berbeda didalam sebuah komunitas besar khususnya kelompok masyarakat berdasarkan pada tingkat pendapatannya.

Benefit Incidence Analysis (BIA) menurut Demery (2000) memberikan gambaran tentang siapa yang paling banyak menerima manfaat dari layanan publik, dan memberikan gambaran dampak kesejahteraan yang secara langsung diterima oleh kelompok dan rumah tangga individu yang berbeda.

Benefit Incidence Analysis menurut Florencia CL dkk (1999) memiliki tiga langkah:

1. Mengistemasi biaya per unit barang/jasa dalam menyediakan layanan publik
2. Menjumlahkan subsidi yang diberikan kepada masing-masing individu/rumah tangga sebagai pemakai dari layanan publik tersebut.
3. Mengelompokkan individu-individu penerima layanan publik kedalam kelompok-kelompok yang berbeda kemudian di dibandingkan. Perbedaan kelompok tersebut dapat berdasar pada tingkat pendapatan, wilayah dan lain-lain.

Manfaat langsung menurut Janet S. Cuenca (2008) tergantung pada sikap rumah tangga/individu dalam menggunakan layanan publik pemerintah dan komposisi belanja pemerintah. Studi tentang BIA juga menggambarkan bahwa nilai suatu barang publik dapat diidentifikasi dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan barang publik tersebut. Hal ini juga ditandai dengan manfaat yang diterima oleh penerima layanan publik berdasarkan pada tingkat pendapatan para penerima manfaat tersebut.

BIA lebih mudah dipahami dalam hubungannya dengan konsep targeting dan progresivitas dari belanja publik. Targeting sebagai suatu alat untuk menganalisis berbagai macam manfaat dari intervensi pemerintah dalam hal belanja publik. Semua targeting harus berdasar pada tujuan dasar yakni mengidentifikasi dengan benar rumah tangga/individu yang masuk kategori miskin atau tidak miskin. Targeting dalam arti peningkatan efisiensi program dengan peningkatan manfaat yang diterima oleh masyarakat miskin dengan berdasar pada anggaran yang baku (Coady, Grosh dan Haddinott, 2004 dalam Janet S. Cuenca, 2008).

Juswanto, (2010) Benefit Incidence Analysis (BIA) dapat diilustrasikan dalam aljabar sederhana yang dapat diaplikasikan dalam masalah belanja pemerintah di sektor pendidikan. Manfaat dari belanja pemerintah pada level pendidikan (sekolah dasar, menengah dan pendidikan tinggi) berdasarkan pada kelompok pendapatan (j) sebagai berikut:

$$X_j \equiv \sum_{i=1}^3 E_{ij} \frac{S_i}{E_i} \equiv \sum_{i=1}^3 \frac{E_{ij}}{E_i} S_i$$

Keterangan :

X_j : nilai total belanja pendidikan yang diterima kelompok j

E_{ij} : jumlah murid dari kelompok j yang masuk tingkat pendidikan i

S_i : belanja pendidikan pada tingkat pendidikan i

E_i : jumlah total murid pada tingkat pendidikan i

i (1,,3) : tanda tingkat pendidikan (dasar, menengah, dan universitas)

Berdasarkan metode di atas ada empat (4) proses yang dapat diimplementasikan sebagai berikut :

1. Membuat rata-rata biaya per unit dalam menyiapkan layanan publik dengan membagi belanja pemerintah pada layanan tersebut dengan jumlah total pengguna layanan tersebut; S_i/E_i . belanja pemerintah harus berdasar pada belanja aktual dan bukan pada alokasi anggaran.
2. Membuat ranking dari penduduk pengguna dari yang paling miskin ke yang paling kaya dengan menggunakan ukuran kesejahteraan dan menggabungkannya dalam kelompok dengan jumlah pengguna yang sama. Pendapatan total rumah tangga sebulan dapat diambil sebagai ukuran kesejahteraan
3. Menggambarkan jumlah partisipasi sekolah di tiap level pendidikan dalam setiap kelompok
4. Menderivasi/menghitung distribusi manfaat dengan merata – ratakan manfaat yang diterima oleh pengguna layanan dalam setiap kelompok.

Dari hasil perhitungan tersebut maka pengeluaran publik akan dikelompokkan kedalam tiga (3) kelompok yakni progresif, netral dan regresif. Menurut Mawardi dan Sumarto (2003) bahwa analisa mengenai penerima proporsi manfaat dari belanja publik dapat dibedakan menurut kelompok penghasilan. Untuk membuat analisa demikian, metode umum yang biasa dipakai adalah dengan mengelompokkan masyarakat ke dalam 5 (*quintiles*) atau sepuluh (*deciles*) kelompok (dikelompokkan dari yang paling miskin sampai paling kaya). Berdasarkan pengelompokkan ini, dapat dilihat proporsi manfaat yang diterima oleh masing-masing kelompok. Dengan metode ini kemudian dapat disimpulkan apakah kebijakan belanja publik bersangkutan bersifat:

- a. Pro orang miskin (progressive), jika kelompok masyarakat miskin mendapatkan proporsi manfaat yang lebih besar daripada kelompok masyarakat kaya;
- b. Netral, jika proporsi manfaat yang dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya relatif sama

- c. Pro orang kaya (regressive), jika proporsi manfaat untuk kelompok masyarakat miskin lebih kecil daripada yang dinikmati oleh kelompok masyarakat kaya.

Namun ada beberapa keterbatasan dari Benefit Incidence Analysis (BIA) menurut Van De Walle (1992) yakni sebagai berikut :

1. Setiap biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki hubungan yang kecil terhadap nilai manfaat yang diterima masing-masing individu.
2. Studi yang menggunakan BIA memberikan representasi yang tidak lengkap dari pengaruh kesejahteraan akibat belanja publik.
3. Membahas hanya pada dampak langsung dari belanja publik sementara dampak tidak langsungnya tidak mendapat porsi sama sekali. Padahal, banyak pengaruh tidak langsung yang dapat memberikan manfaat yang lebih banyak terhadap masyarakat.

Sejalan dengan Van De Walle (1992), yakni Manasan (2007) dalam Prihastanto (2011) mengungkapkan empat keterbatasan dari metode BIA. Empat keterbatasan BIA tersebut adalah sebagai berikut:

1. BIA mengasumsikan bahwa manfaat dari layanan publik sama dengan biaya rata-rata penyediaan layanan publik tersebut.
2. BIA tidak dapat menggambarkan efek putaran kedua pada kesejahteraan yang dihasilkan oleh layanan publik tersebut. Manfaat tidak langsung dari beberapa layanan publik dimungkinkan berdampak bagi distribusi kesejahteraan sepanjang waktu.
3. BIA secara umum menetapkan distribusi pada manfaat rata-rata. Padahal distribusi manfaat marginal yang mencerminkan keadilan adalah penting.
4. BIA tidak menghitung pengaruh jangka panjang belanja pemerintah pada kelompok yang diuntungkan.

2.7. Kurva Lorenz

Metode lainnya yang lazim dipakai untuk menganalisa statistik pendapatan adalah Kurva Lorenz. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang

benar-benar mereka terima misalnya satu tahun. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal yang merupakan garis pemerataan sempurna, semakin timpang dan tidak merata distribusi pendapatannya. Semakin parah tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara, maka bentuk kurva Lorenznya pun akan melengkung mendekati sumbu horizontal bagian bawah.

2.8. Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang distribusi dampak belanja pemerintah dalam sektor pendidikan telah dilakukan oleh banyak peneliti di dunia. Selowsky (1979) melakukan survey terhadap 4.019 rumah tangga di Kolombia untuk meneliti siapa yang menerima manfaat dari sepertiga belanja pemerintah yang dialokasikan pada subsidi pendidikan dan kesehatan, listrik, air minum dan sewerage. Dia menemukan total subsidi pendidikan dinikmati oleh berbagai kelompok masyarakat yang telah dibagi menurut segmentasi pendapatannya. Subsidi pendidikan dasar bersifat progresif sedangkan subsidi pendidikan tinggi bersifat regresif.

Meerman (1979) sebagian besar subsidi pendidikan dasar di Malaysia terdistribusi kepada kelompok miskin sedangkan subsidi pendidikan tinggi lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi.

Demery (2000) pada tahun 1989 kelompok masyarakat miskin menikmati manfaat subsidi pendidikan dasar sebesar 22% tetapi mereka tidak menikmati subsidi pendidikan tinggi. Kelompok masyarakat dengan pendapatan tertinggi menikmati 92% subsidi pendidikan tinggi yang diberikan pemerintah.

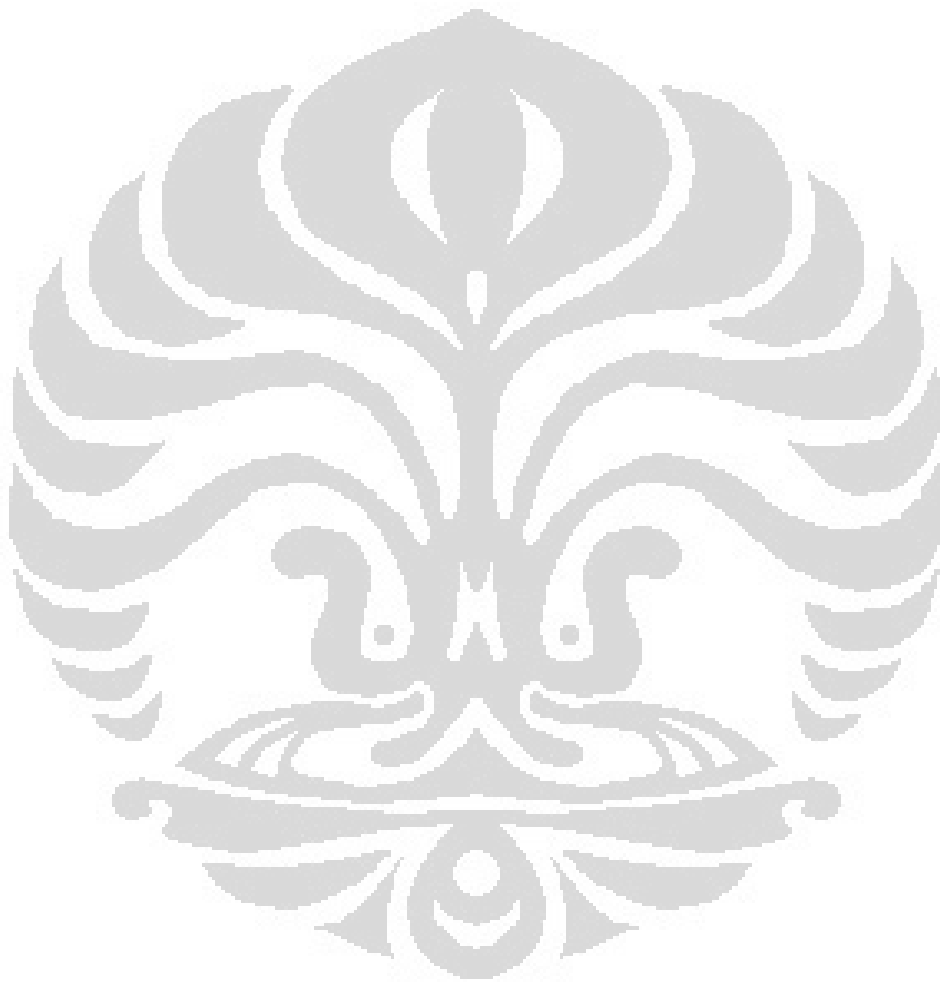
Lanjouw et al (2001) belanja pendidikan sekolah dasar di Indonesia bersifat progresif. Kelompok termiskin menikmati 24,8% subsidi pendidikan sekolah dasar. Kuintil kedua menerima manfaat sebesar 23,5%, kuintil ketiga menerima manfaat sebesar 20,7%, kuintil keempat menerima manfaat sebesar 17,8% dan kelompok terkaya menikmati manfaat paling kecil yakni 13,1%. Belanja pendidikan sekolah menengah dalam penelitian tersebut disimpulkan regresif. Kelompok terkaya menikmati paling besar subsidi pendidikan sekolah

menengah yakni 33,7% dan nilai manfaat menurun dari kuintil kelima ke kuintil pertama. Kuintil keempat menerima manfaat sebesar 23,9%, kuintil ketiga menerima manfaat sebesar 18,7%, kuintil kedua menerima manfaat sebesar 14,2% dan kelompok termiskin menerima manfaat sebesar 9,5%.

Juswanto (2010) masyarakat berpendapatan rendah memiliki share terbesar dalam partisipasi pendidikan pada level pendidikan dasar dan masyarakat berpendapatan tinggi menikmati subsidi pendidikan sampai di level pendidikan tinggi. Distribusi belanja pada level pendidikan dasar disiapkan untuk masyarakat berpendapatan rendah. Pada sisi lain, belanja pendidikan di level pendidikan menengah terdistribusi pada masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi. Bahkan, belanja pemerintah di level pendidikan tinggi tidak hanya dinikmati oleh masyarakat berpendapatan tinggi, tetapi juga menggambarkan betapa besarnya ketidakmerataan distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Pendapatan, tingkat pendidikan orang tua dan beasiswa memiliki pengaruh positif yang signifikan dalam meningkatkan peluang seorang anak untuk disekolahkan. Sedangkan umur anak dan ukuran keluarga memiliki korelasi yang negative dalam peningkatan kesadaran bersekolah. Namun demikian, gender, rasio murid dan guru dan variable perbedaan sekolah memberikan pengaruh yang berbeda terhadap partisipasi sekolah di lintas daerah dan level pendidikan.

Prihastanto (2011), melakukan penelitian tentang Benefit Incidence Analysis pada belanja pendidikan di Kabupaten Klaten. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa jika dilihat dari persentase manfaat terhadap total pendapatan rumah tangga setahun pada tiap kuintil maka belanja pendidikan di Kabupaten Klaten bersifat progresif. Manfaat yang diterima kuintil pertama sebesar 12.182% merupakan manfaat terbesar dibandingkan kuintil lainnya. Kuintil kedua menerima manfaat sebesar 9.555% dari total pendapatan rumah tangganya selama setahun, kuintil ketiga menerima manfaat sebesar 8.575% dari total pendapatan rumah tangganya setahun, dan kuintil keempat menerima manfaat sebesar 8.401% dari total pendapatan rumah tangganya setahun. Sedangkan kelompok terkaya menikmati manfaat paling kecil yakni 4.032% dari total pendapatan rumah tangganya setahun. Hal ini mengindikasikan bahwa

pemerintah sudah memberikan persentase belanja pendidikan yang berpihak kepada kelompok miskin.



BAB 3
DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA
DI SULAWESI SELATAN

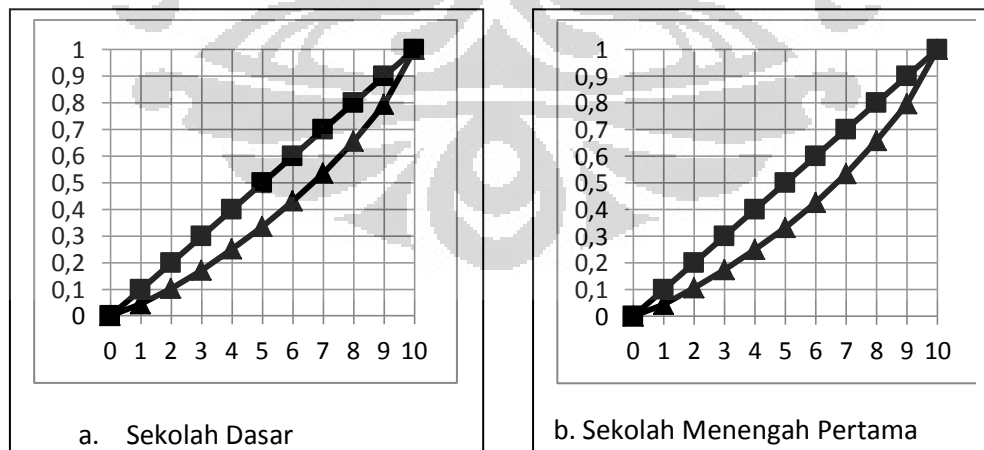
3.1. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Sulawesi Selatan

Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, dapat diketahui distribusi pendapatan rumah tangga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini difokuskan pada rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga yang berusia sekolah dasar (7 – 12 tahun) dan sekolah menengah pertama (13 – 15 tahun). Cara menghitung distribusi pendapatan tersebut dengan menggunakan Kurva Lorenz di masing – masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

3.2. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Usia Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

3.2.1. Kabupaten Kepulauan Selayar

Adapun distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat ditunjukkan sebagai berikut :



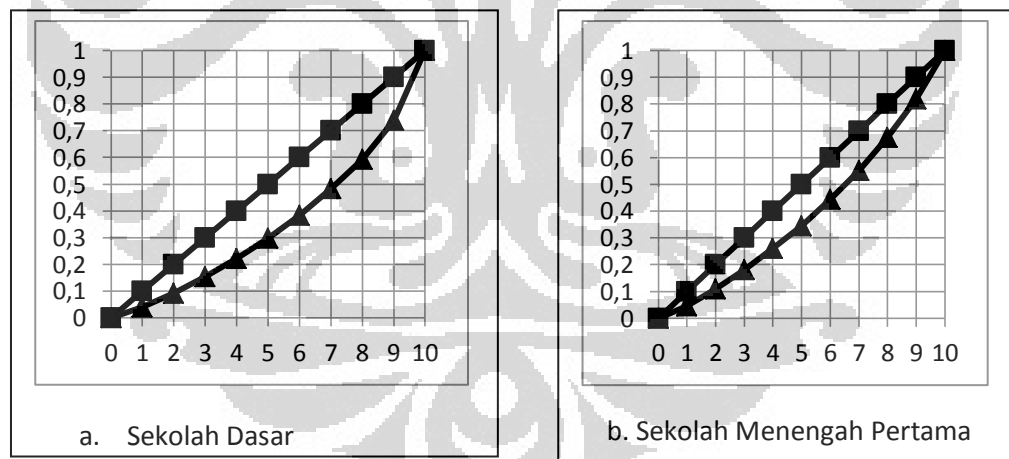
Gambar 3.1. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Selayar Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.1. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 20 persen pendapatan di Kabupaten Selayar dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 80 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang sama dimana sekitar 20 persen pendapatan di Kabupaten Selayar dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 80 persen.

3.2.2. Kabupaten Bulukumba

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Bulukumba dapat ditunjukkan sebagai berikut :



Gambar 3.2. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

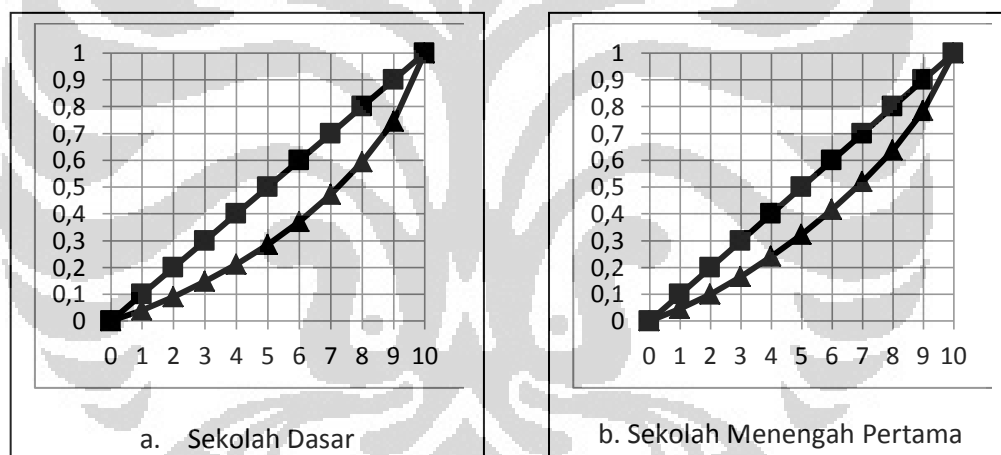
Dari gambar 3.2. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 30 persen pendapatan di Kabupaten Bulukumba dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi,

sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 70 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang berbeda dimana sekitar 20 persen pendapatan di Kabupaten Bulukumba dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 80 persen.

3.2.3. Kabupaten Bantaeng

Hal lain terjadi di Kabupaten Bantaeng. Distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Bantaeng dapat ditunjukkan sebagai berikut :



Gambar 3.3. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

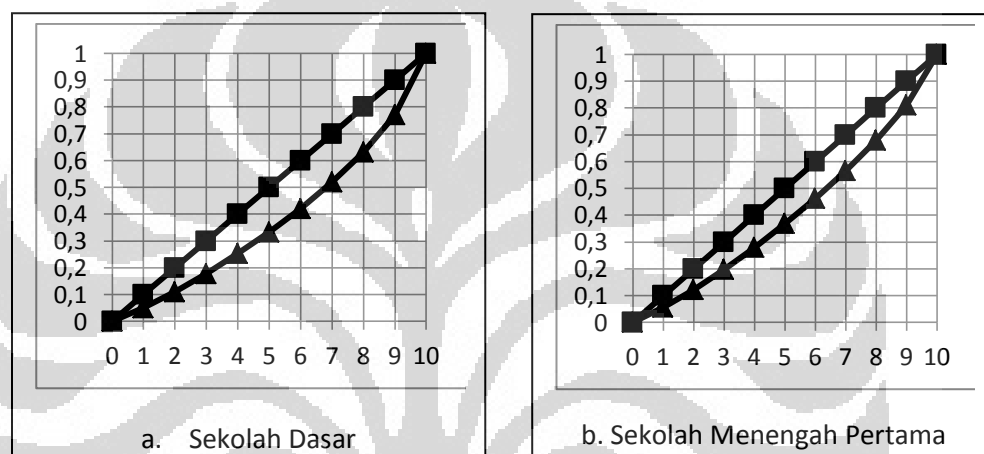
Dari gambar 3.3. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 30 persen pendapatan di Kabupaten Bantaeng dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 70 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang berbeda dimana hanya sekitar 20 persen pendapatan di Kabupaten Bantaeng dikuasai oleh 10 persen rumah tangga

yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 80 persen.

3.2.4. Kabupaten Jeneponto

Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Jeneponto. Distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Jeneponto dapat ditunjukkan sebagai berikut :



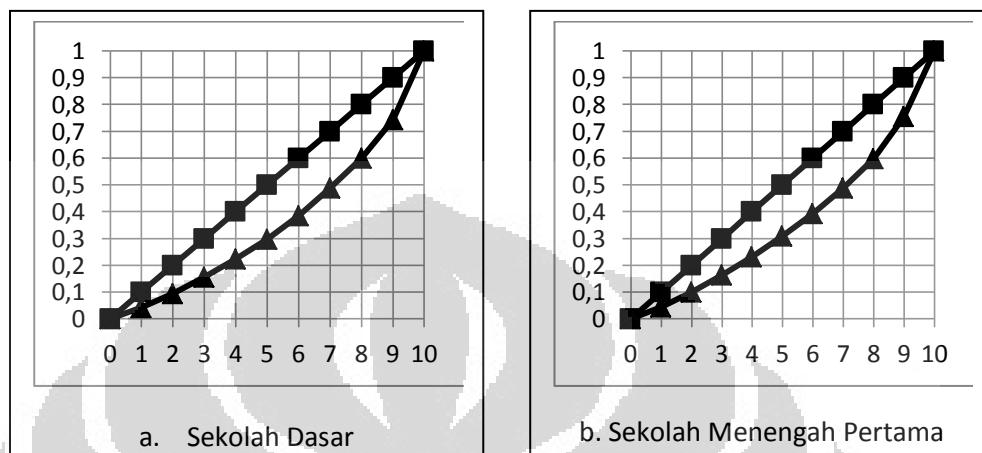
Gambar 3.4. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.4. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 25 persen pendapatan di Kabupaten Jeneponto dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 75 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang berbeda dimana sekitar 20 persen pendapatan di Kabupaten Jeneponto dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 80 persen.

3.2.5. Kabupaten Takalar

Untuk Kabupaten Takalar, distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun dapat ditunjukkan sebagai berikut :



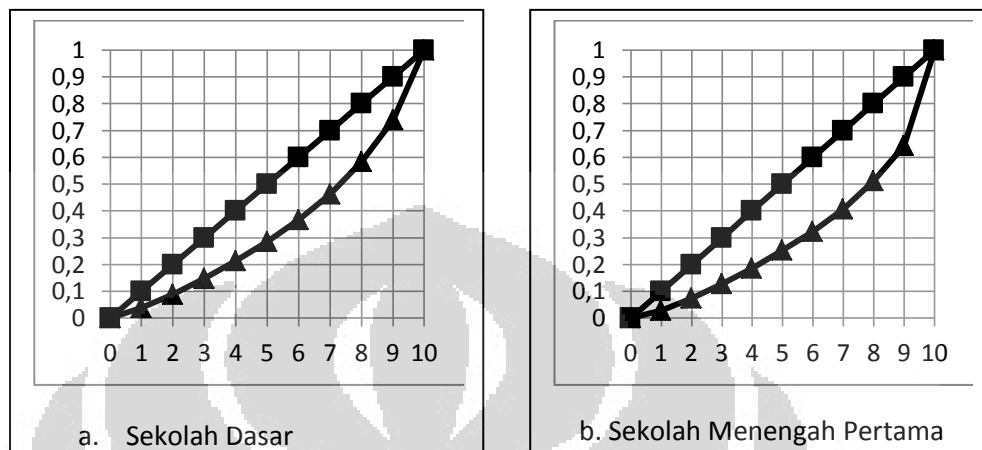
Gambar 3.5. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Takalar Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.5. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 28 persen pendapatan di Kabupaten Takalar dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 72 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang berbeda dimana sekitar 25 persen pendapatan di Kabupaten Takalar dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 75 persen.

3.2.6. Kabupaten Gowa

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Gowa dapat ditunjukkan sebagai berikut :



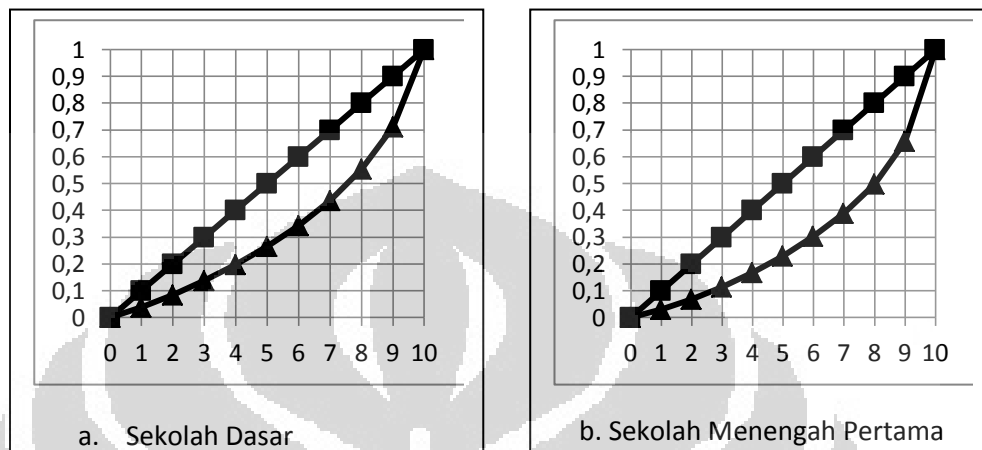
Gambar 3.6. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Gowa Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.6. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 30 persen pendapatan di Kabupaten Gowa dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 70 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang berbeda dimana hampir 40 persen pendapatan di Kabupaten Gowa dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 60 persen.

3.2.7. Kabupaten Sinjai

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Sinjai dapat ditunjukkan sebagai berikut :



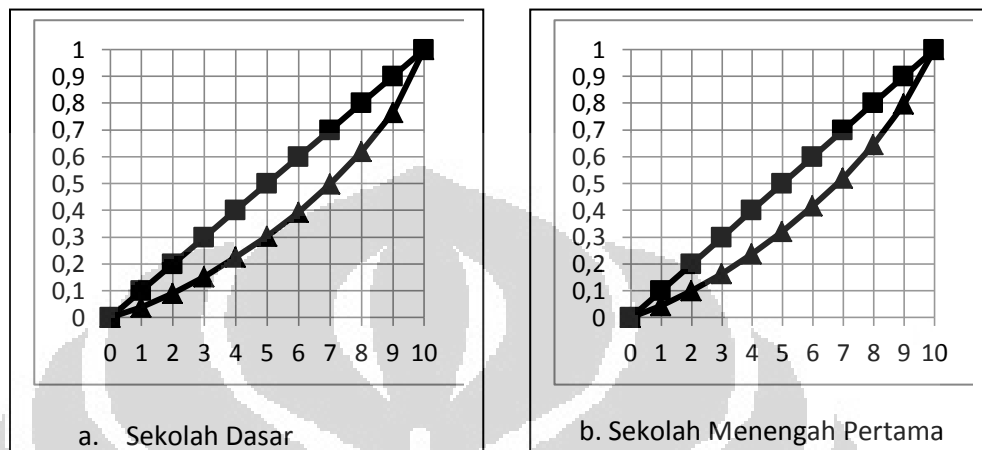
Gambar 3.7. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kabupaten Sinjai Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.7. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 30 persen pendapatan di Kabupaten Sinjai dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 70 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang berbeda dimana 35 persen pendapatan di Kabupaten Sinjai dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 65 persen.

3.2.8. Kabupaten Maros

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Maros dapat ditunjukkan sebagai berikut :



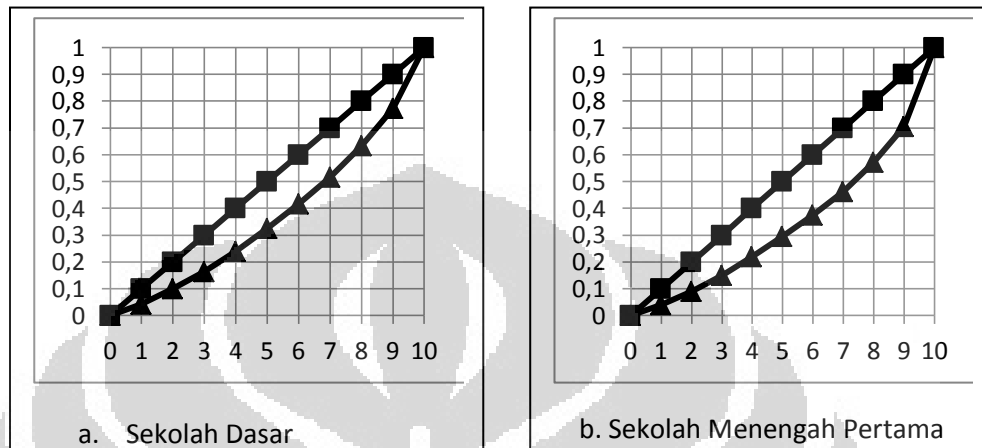
Gambar 3.8. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Maros Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.8. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 25 persen pendapatan di Kabupaten Maros dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 75 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang berbeda dimana 20 persen pendapatan di Kabupaten Maros dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 80 persen.

3.2.9. Kabupaten Pangkep

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Pangkep dapat ditunjukkan sebagai berikut :



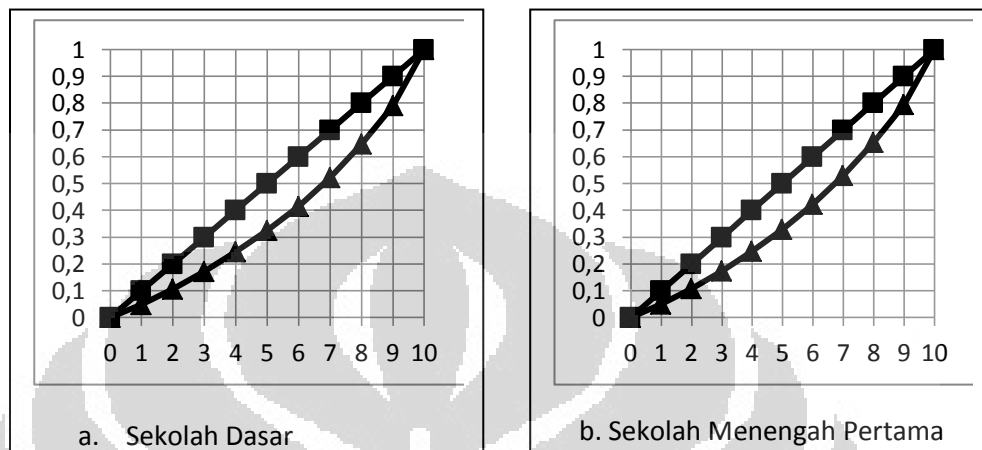
Gambar 3.9. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Pangkep Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.9. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 25 persen pendapatan di Kabupaten Pangkep dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 75 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang berbeda dimana 30 persen pendapatan di Kabupaten Pangkep dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 70 persen.

3.2.10. Kabupaten Barru

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Barru dapat ditunjukkan sebagai berikut :



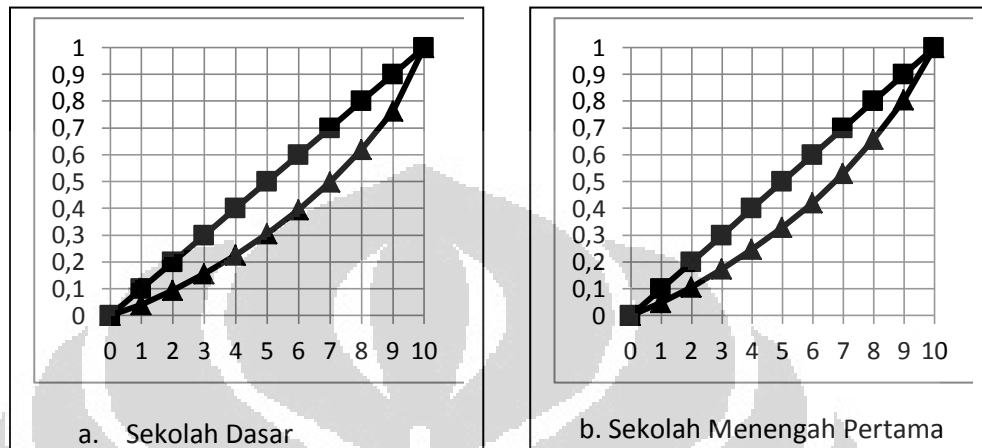
Gambar 3.10. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Barru Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.10. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 22 persen pendapatan di Kabupaten Barru dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 78 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang sama dimana 22 persen pendapatan di Kabupaten Barru dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 78 persen.

3.2.11. Kabupaten Bone

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Bone dapat ditunjukkan sebagai berikut :



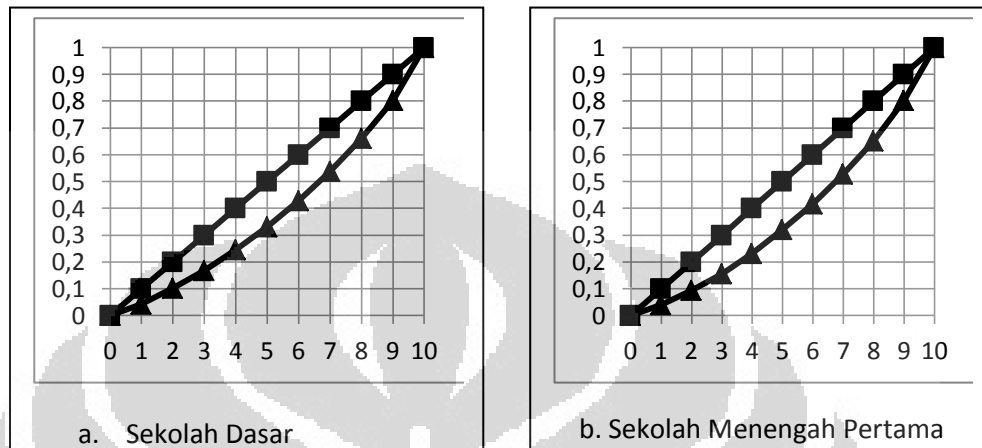
Gambar 3.11. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bone Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.11. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 25 persen pendapatan di Kabupaten Bone dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 75 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang berbeda dimana 20 persen pendapatan di Kabupaten Bone dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 80 persen.

3.2.12. Kabupaten Soppeng

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Soppeng dapat ditunjukkan sebagai berikut :



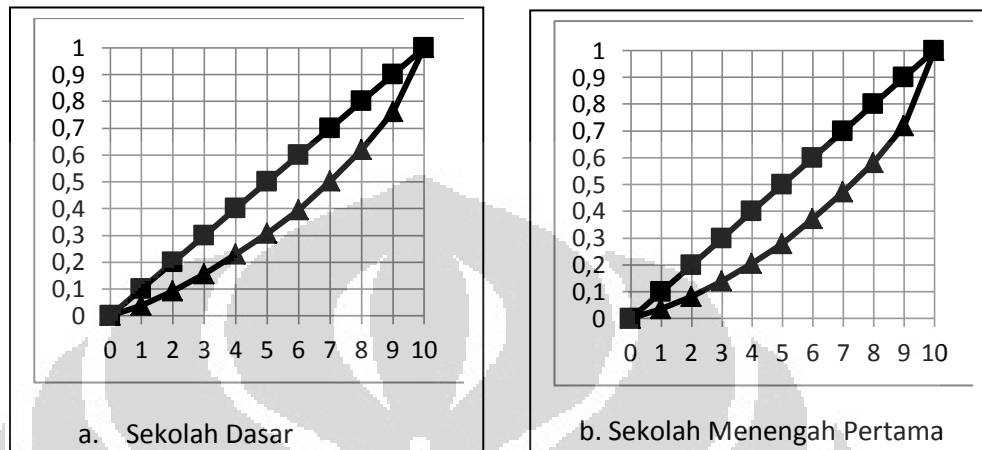
Gambar 3.12. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Soppeng Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.12. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 20 persen pendapatan di Kabupaten Soppeng dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 80 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang sama dimana 20 persen pendapatan di Kabupaten Soppeng dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 80 persen.

3.2.13. Kabupaten Wajo

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Wajo dapat ditunjukkan sebagai berikut :



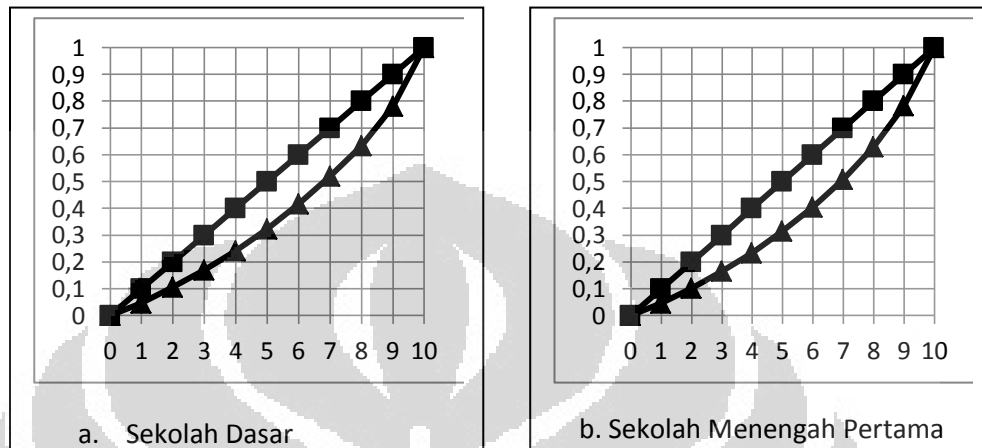
Gambar 3.13. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Wajo Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.13. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 25 persen pendapatan di Kabupaten Wajo dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 75 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang berbeda dimana 30 persen pendapatan di Kabupaten Wajo dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 70 persen.

3.2.14. Kabupaten Sidrap

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Sidrap dapat ditunjukkan sebagai berikut :



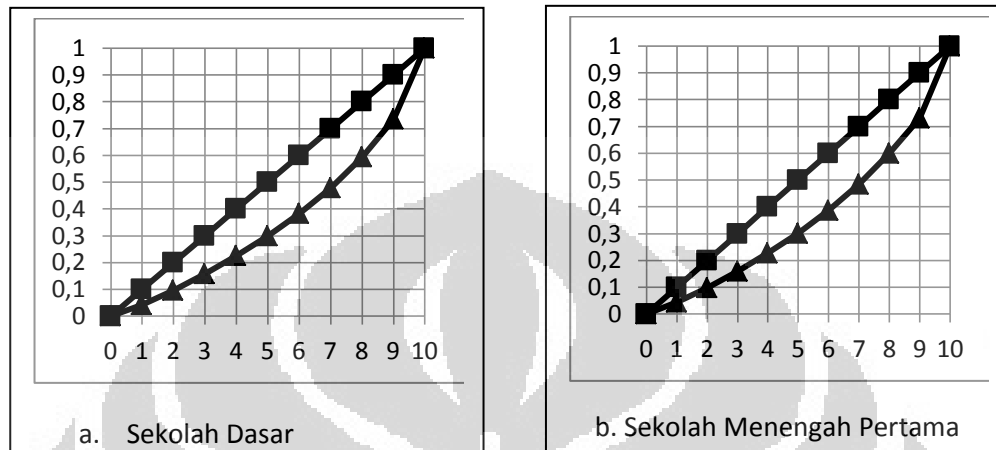
Gambar 3.14. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Sidrap Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.14. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 22 persen pendapatan di Kabupaten Sidrap dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 78 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang sama dimana 22 persen pendapatan di Kabupaten Sidrap dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 78 persen.

3.2.15. Kabupaten Pinrang

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Pinrang dapat ditunjukkan sebagai berikut :



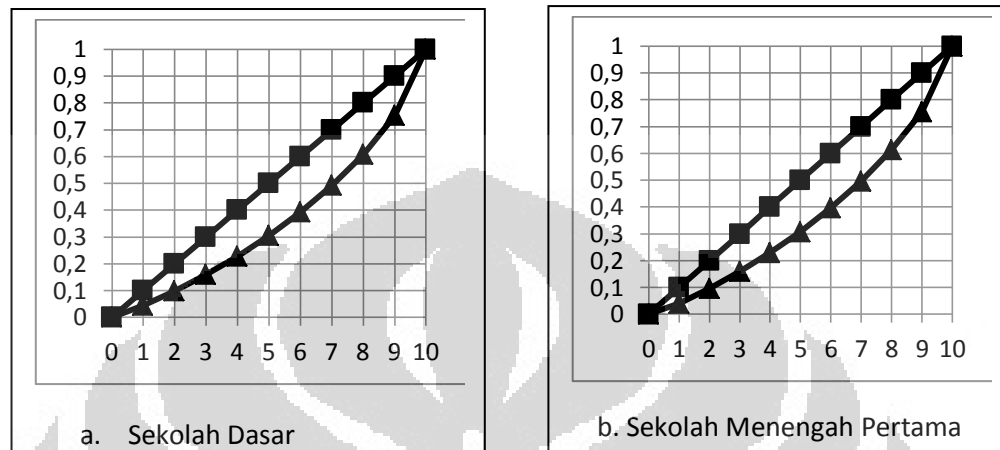
Gambar 3.15. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Pinrang Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.15. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 27 persen pendapatan di Kabupaten Pinrang dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 73 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang sama dimana 27 persen pendapatan di Kabupaten Pinrang dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 73 persen.

3.2.16. Kabupaten Enrekang

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Enrekang dapat ditunjukkan sebagai berikut :



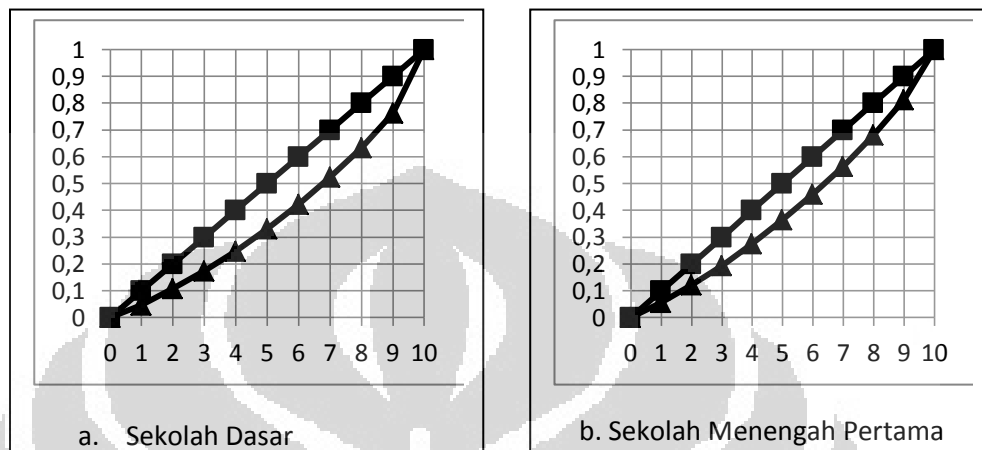
Gambar 3.16. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Enrekang Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.16. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 27 persen pendapatan di Kabupaten Enrekang dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 73 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang sama dimana 27 persen pendapatan di Kabupaten Enrekang dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 73 persen.

3.2.17. Kabupaten Luwu

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Luwu dapat ditunjukkan sebagai berikut :



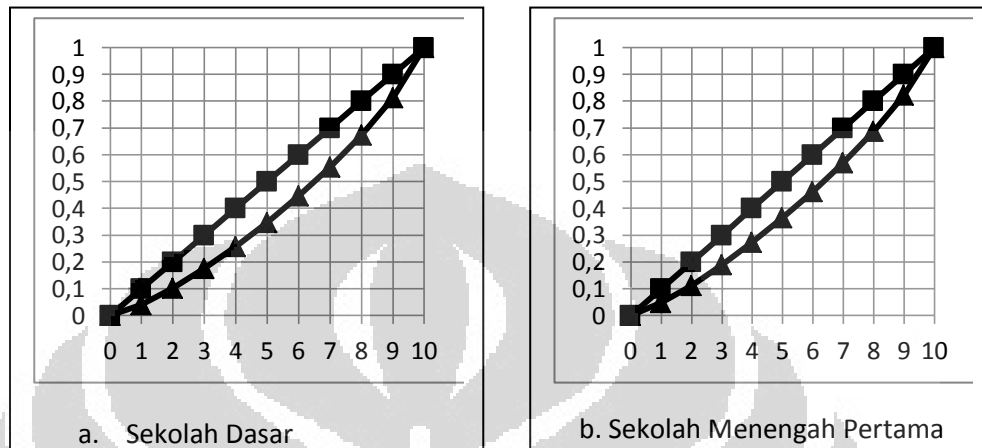
Gambar 3.17. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Luwu Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.17. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 25 persen pendapatan di Kabupaten Luwu dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 75 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang berbeda dimana 20 persen pendapatan di Kabupaten Luwu dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 80 persen.

3.2.18. Kabupaten Tana Toraja

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Tana Toraja dapat ditunjukkan sebagai berikut :



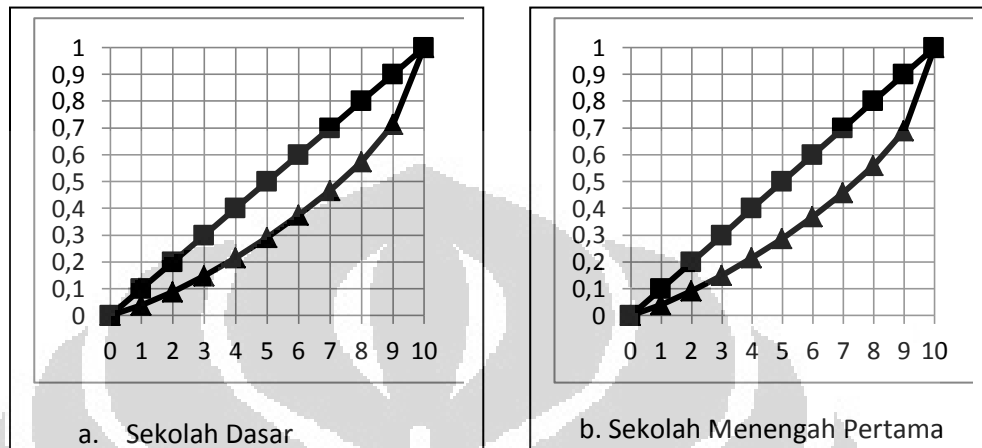
Gambar 3.18. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.18. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 20 persen pendapatan di Kabupaten Tana Toraja dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 80 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang berbeda dimana 18 persen pendapatan di Kabupaten Tana Toraja dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 82 persen.

3.2.19. Kabupaten Luwu Utara

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Luwu Utara dapat ditunjukkan sebagai berikut :



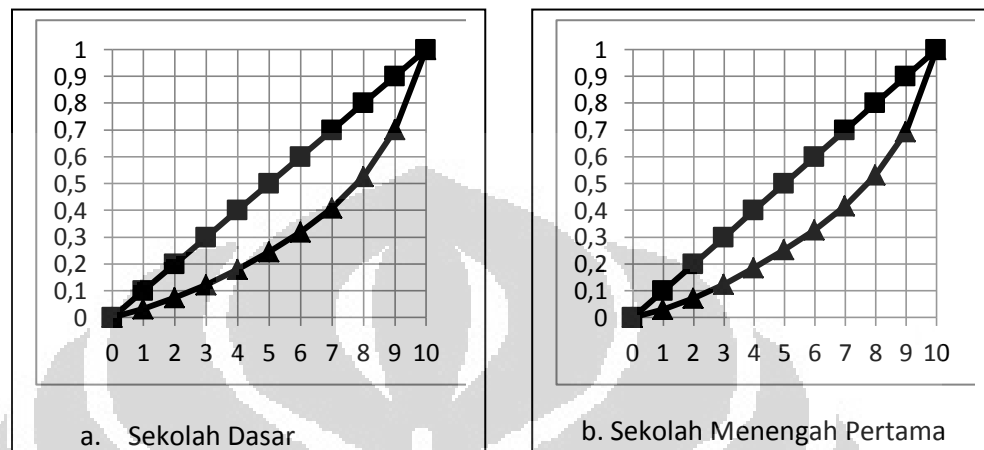
Gambar 3.19. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.19. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 30 persen pendapatan di Kabupaten Luwu Utara dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 70 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang berbeda dimana 32 persen pendapatan di Kabupaten Luwu Utara dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 68 persen.

3.2.20. Kabupaten Luwu Timur

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Luwu Timur dapat ditunjukkan sebagai berikut :



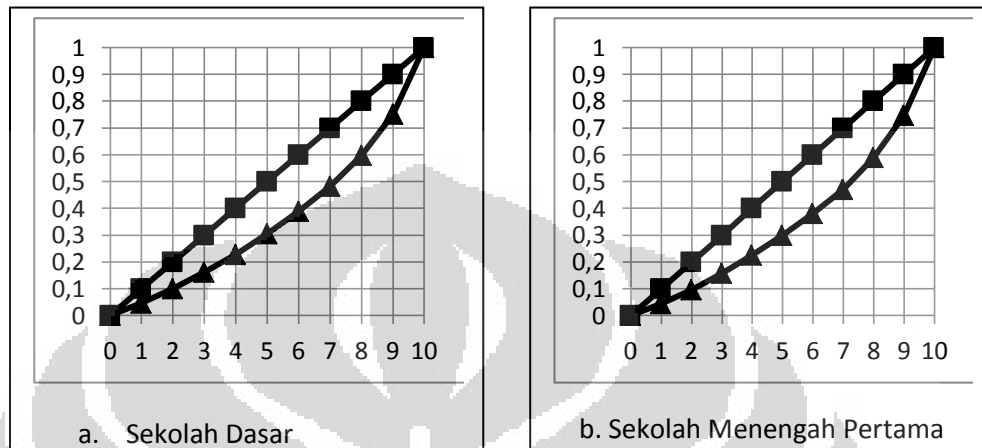
Gambar 3.20. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.20. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 30 persen pendapatan di Kabupaten Luwu Timur dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 70 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang berbeda dimana 32 persen pendapatan di Kabupaten Luwu Timur dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 68 persen.

3.2.21. Kabupaten Toraja Utara

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kabupaten Toraja Utara dapat ditunjukkan sebagai berikut :



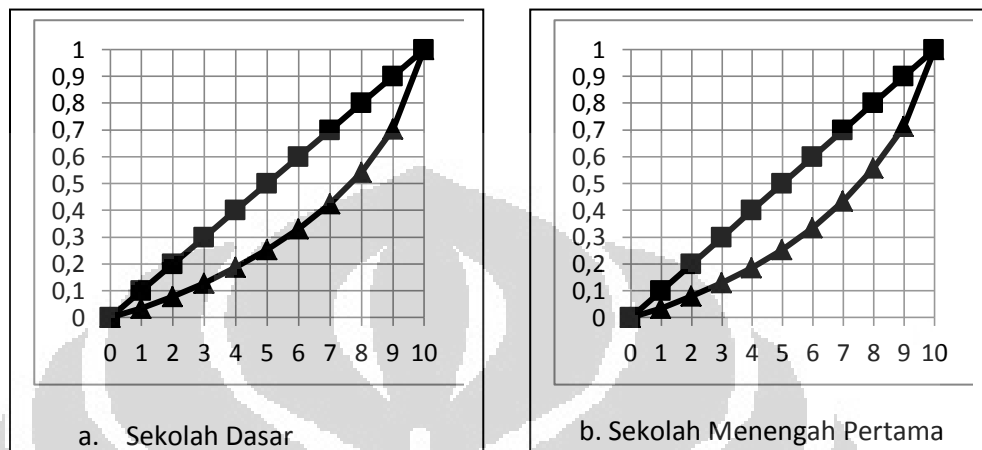
Gambar 3.21. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.21. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 25 persen pendapatan di Kabupaten Toraja Utara dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 75 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang berbeda dimana 27 persen pendapatan di Kabupaten Toraja Utara dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 73 persen.

3.2.22. Kota Makassar

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kota Makassar dapat ditunjukkan sebagai berikut :



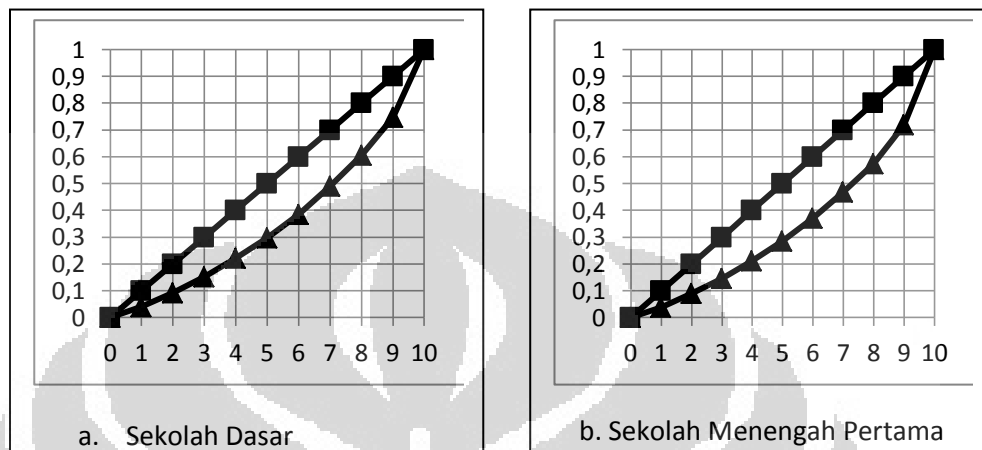
Gambar 3.22. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kota Makassar Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.22. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 30 persen pendapatan di Kota Makassar dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 70 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang sama dimana 30 persen pendapatan di Kota Makassar dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 70 persen.

3.2.23. Kota Pare – Pare

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kota Pare – Pare dapat ditunjukkan sebagai berikut :



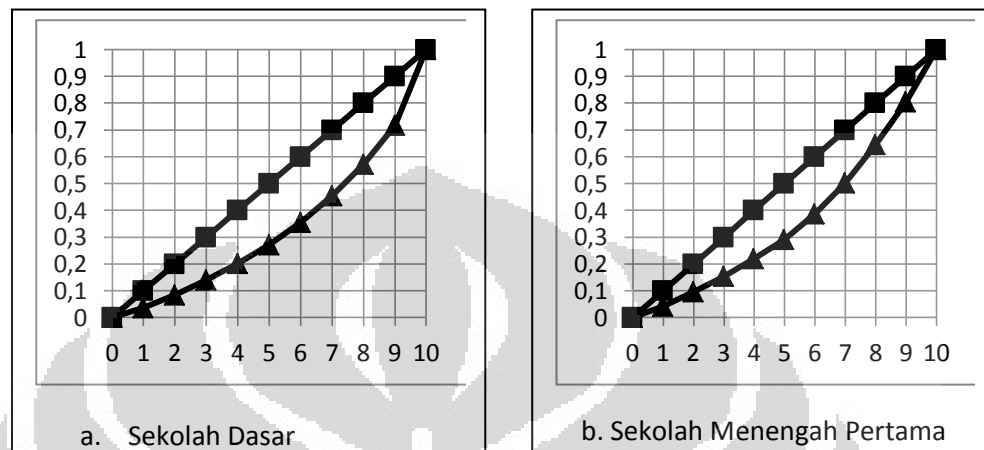
Gambar 3.23. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kota Pare – Pare Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz (Sumber : Data sekunder, diolah)

Dari gambar 3.23. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 27 persen pendapatan di Kota Pare – Pare dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 73 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang berbeda dimana 30 persen pendapatan di Kota Pare - Pare dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 70 persen.

3.2.24. Kota Palopo

Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12) tahun dan sekolah menengah pertama (13 – 15) tahun di Kota Palopo dapat ditunjukkan sebagai berikut :



Gambar 3.24. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kota Palopo Tahun 2010 dengan menggunakan Kurva Lorenz

Dari gambar 3.24. diatas dapat dijelaskan bahwa pada gambar a menunjukkan bahwa sekitar 30 persen pendapatan di Kota Palopo dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya yakni dari desil kesatu sampai dengan desil kesembilan harus berbagi pendapatan sebesar 70 persen.

Pada gambar b menunjukkan hal yang berbeda dimana 20 persen pendapatan di Kota Palopo dikuasai oleh 10 persen rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di desil kesepuluh rumah tangga yang berpendapatan tinggi, sedangkan 90 persen rumah tangga sisanya harus berbagi pendapatan sebesar 80 persen.

Dari distribusi pendapatan rumah tangga yang tersebar di 24 kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga usia sekolah dasar (7 – 12 tahun) tertinggi dengan persentase sebesar 30 persen terjadi di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten

Bantaeng, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar dan Kota Palopo. Sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Selayar, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Tana Toraja dengan persentase sebesar 20 persen.

Sedangkan ketimpangan pendapatan untuk rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama (13 – 15 tahun), ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi di Kabupaten Gowa dengan 40 persen dan ketimpangan pendapatan terendah di Kabupaten Tana Toraja dengan persentase 18 persen.

3.3. Pengelompokan Daerah Berdasarkan Pusat-Pusat Kegiatan

Dari pembahasan diatas, maka dari 24 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Sulawesi Selatan dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) wilayah yang menjadi pusat kegiatan yakni :

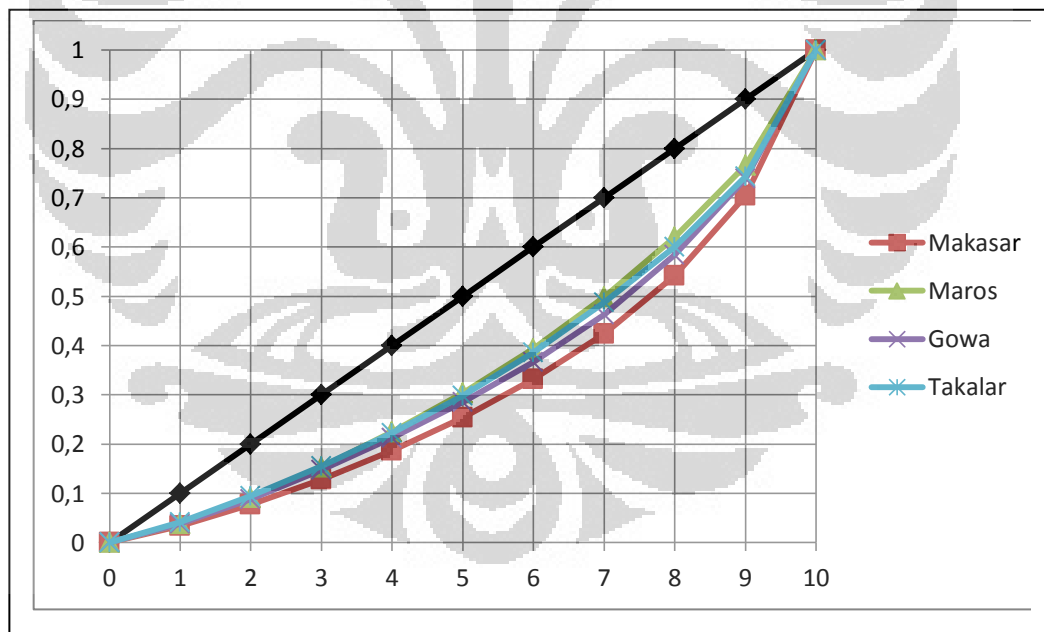
3.3.1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional dan sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. Peraturan zonasi untuk PKN dengan memperhatikan:

1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya. Kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional, antara lain meliputi perdagangan, jasa, industri atau pariwisata. Fasilitas perkotaan, antara lain, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau. Infrastruktur perkotaan, antara lain, meliputi jaringan air bersih, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal tipe A, stasiun kelas besar, jaringan pengendalian limbah (padat, cair, dan gas), tempat pembuangan sampah akhir (TPA), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan drainase.

2. Pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya ke arah vertikal. Pengembangan ruang ke arah vertikal harus mempertimbangkan dimensi fisik dan non fisik. Dimensi fisik, antara lain, meliputi karakteristik lahan, topografi dan daya dukung lahan. Dimensi nonfisik, antara lain, meliputi ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk mewujudkan pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya ke arah vertikal, pengembangan permukiman di PKN dapat dilakukan dengan berdasarkan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun.

Kawasan ini meliputi wilayah Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar) yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. Jika kawasan ini digambarkan dalam bentuk kurva Lorenz maka dapat digambarkan sebagai berikut :

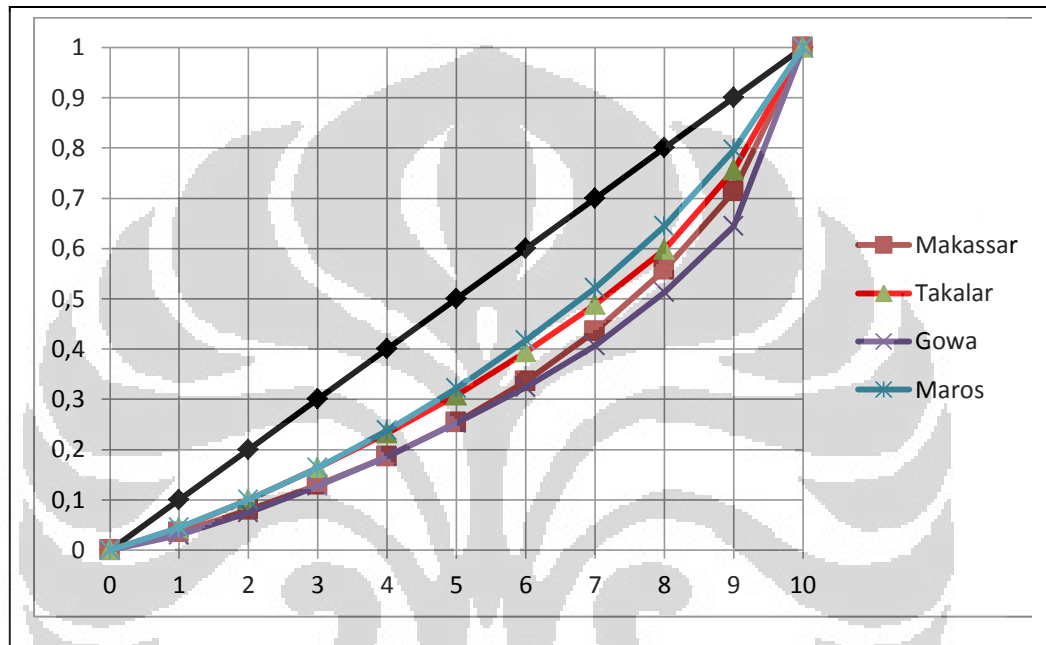


Gambar 3.25. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga yang memiliki anak Usia SD di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

Dari gambar 3.25. diatas, dapat dijelaskan bahwa Kota Makassar memiliki tingkat distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar yang paling tinggi dibandingkan dengan 3 (tiga) daerah lain yang masuk dalam

kawasan Mamminasata yakni Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. Sedangkan yang paling rendah tingkat perbedaan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar terjadi di Kabupaten Maros.

Sedangkan untuk distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) di PKN ini dapat dilihat dalam Kurva Lorenz berikut ini :



Gambar 3.26. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga yang memiliki anak Usia SMP di Pusat Kegiatan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

Dari gambar 3.26 diatas, dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Gowa memiliki tingkat distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama yang paling tinggi dibandingkan dengan 3 (tiga) daerah lain yang masuk dalam kawasan Mamminasata yakni Kota Makassar Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar. Sedangkan yang paling rendah tingkat perbedaan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama terjadi di Kabupaten Maros.

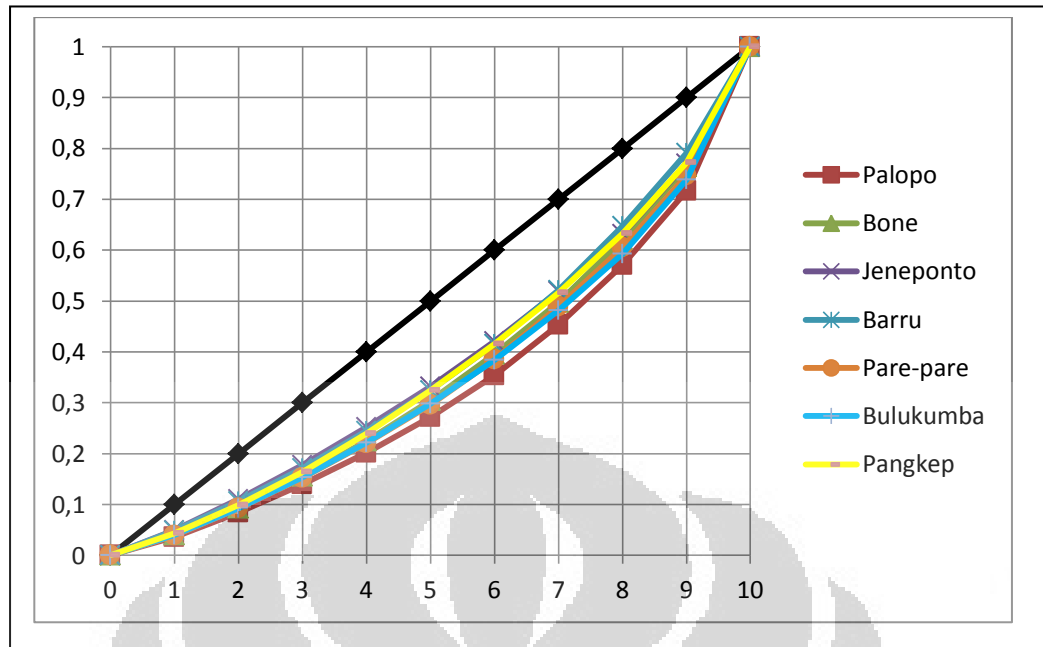
3.3.2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor impor yang mendukung PKN dan sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang

melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan:

1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya. Kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi, antara lain, meliputi pertanian/perkebunan/perikanan, perdagangan dan jasa, pertambangan atau industri. Fasilitas perkotaan, antara lain, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga dan ruang terbuka hijau. Infrastruktur perkotaan, antara lain, meliputi jaringan air bersih, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal tipe B, stasiun kelas menengah, jaringan pengendalian limbah (padat, cair dan gas), tempat pembuangan sampah akhir (TPA), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan drainase.
2. Pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.

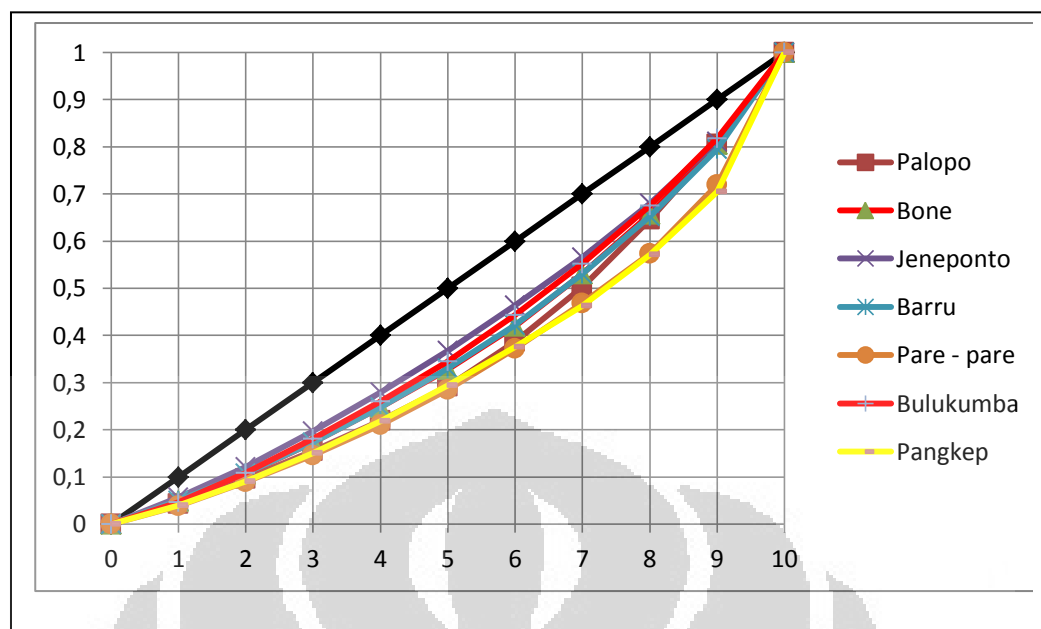
Kawasan ini meliputi wilayah Kota Palopo, Kabupaten Bone, Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bulukumba. Jika kawasan ini digambarkan dalam bentuk kurva Lorenz maka dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.27. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga yang memiliki anak Usia SD di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

Dari gambar 3.27. diatas, dapat dijelaskan bahwa Kota Palopo memiliki tingkat distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar yang paling tinggi dibandingkan dengan 6 (enam) daerah lain yang masuk dalam kawasan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yakni Kabupaten Bone, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru, Kota Pare-pare, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Pangkep. Sedangkan yang paling rendah tingkat perbedaan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar terjadi di Kabupaten Bulukumba.

Sedangkan untuk distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) di PKW ini dapat dilihat dalam Kurva Lorenz berikut ini :



Gambar 3.28. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga yang memiliki anak Usia SMP di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

Dari gambar 3.28. diatas, dapat dijelaskan bahwa Kota Pare-pare dan Kabupaten Pangkep memiliki tingkat distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama yang paling tinggi dibandingkan dengan 5 (lima) daerah lain yang masuk dalam kawasan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yakni Kota Palopo, Kabupaten Bone, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru dan Kabupaten Bulukumba. Sedangkan yang paling rendah tingkat perbedaan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama terjadi di Kabupaten Jeneponto.

3.3.3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan daerah kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 13 (tiga belas) kabupaten. PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Kabupaten dan sebagai simpul transportasi yang melayani skala Kabupaten.

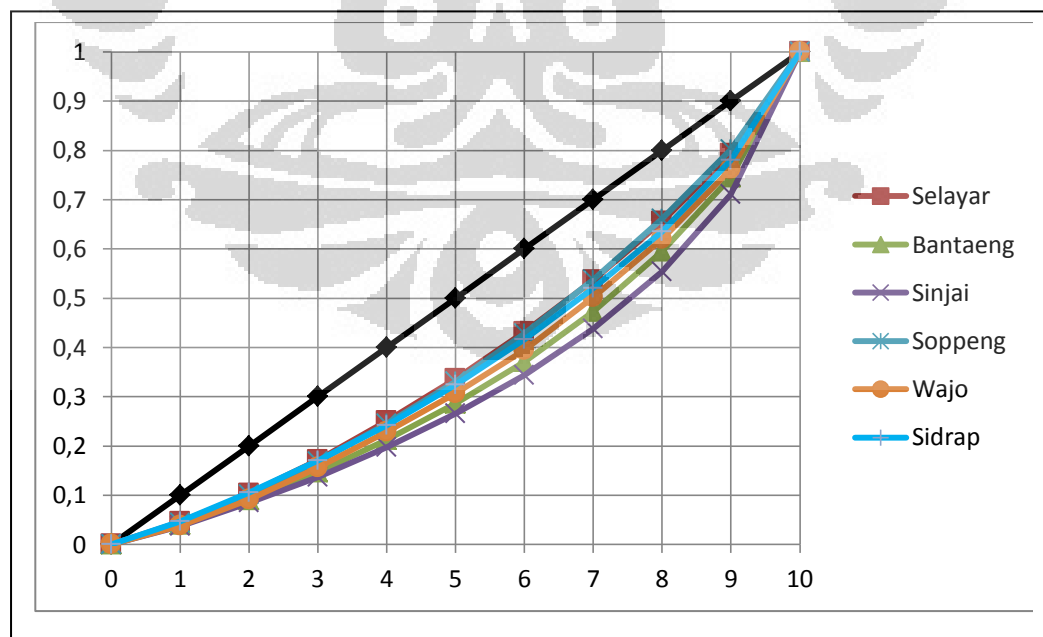
Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Kabupaten/Kota yang didukung dengan

fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya. Kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten/kota, antara lain, meliputi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, atau pertambangan. Fasilitas perkotaan, antara lain, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang-ruang terbuka hijau. Infrastruktur perkotaan antara lain meliputi jaringan air bersih, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal tipe C, stasiun kelas kecil, tempat pembuangan sampah dan drainase.

Untuk memudahkan dalam membaca kurva Lorenz, maka dilakukan pengelompokan lagi dengan membaginya kedalam 2 (dua) kategori yakni *pertama*, Pusat Kegiatan Lokal Selatan dan Tengah dan *kedua*, Pusat Kegiatan Lokal Utara.

3.3.3.1. Pusat Kegiatan Lokal Selatan dan Tengah

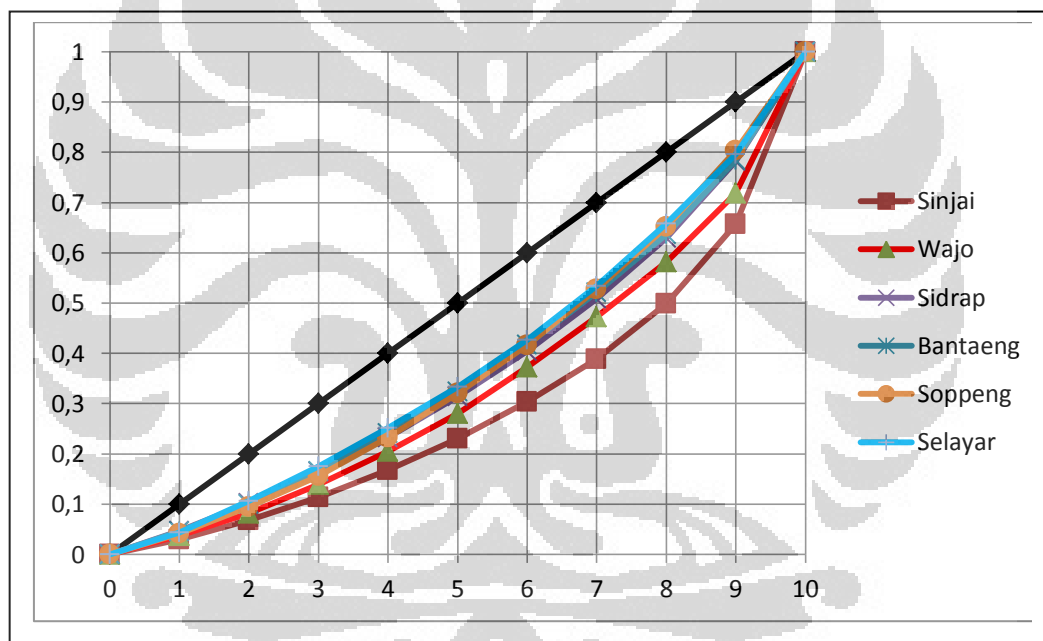
Kawasan ini meliputi wilayah selatan dan tengah dari Provinsi Sulawesi Selatan yakni Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap. Jika kawasan ini digambarkan dalam bentuk kurva Lorenz maka dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.29. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga yang memiliki anak Usia SD di Pusat Kegiatan Lokal Selatan - Tengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

Dari gambar 3.29. diatas, dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Sinjai memiliki tingkat distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar yang paling tinggi dibandingkan dengan 5 (lima) daerah lain yang masuk dalam kawasan Pusat Kegiatan Lokal Selatan–Tengah yakni Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap. Sedangkan yang paling rendah tingkat perbedaan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar terjadi di Kabupaten Selayar.

Sedangkan untuk distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) di PKL Selatan-tengah ini dapat dilihat dalam Kurva Lorenz berikut ini :



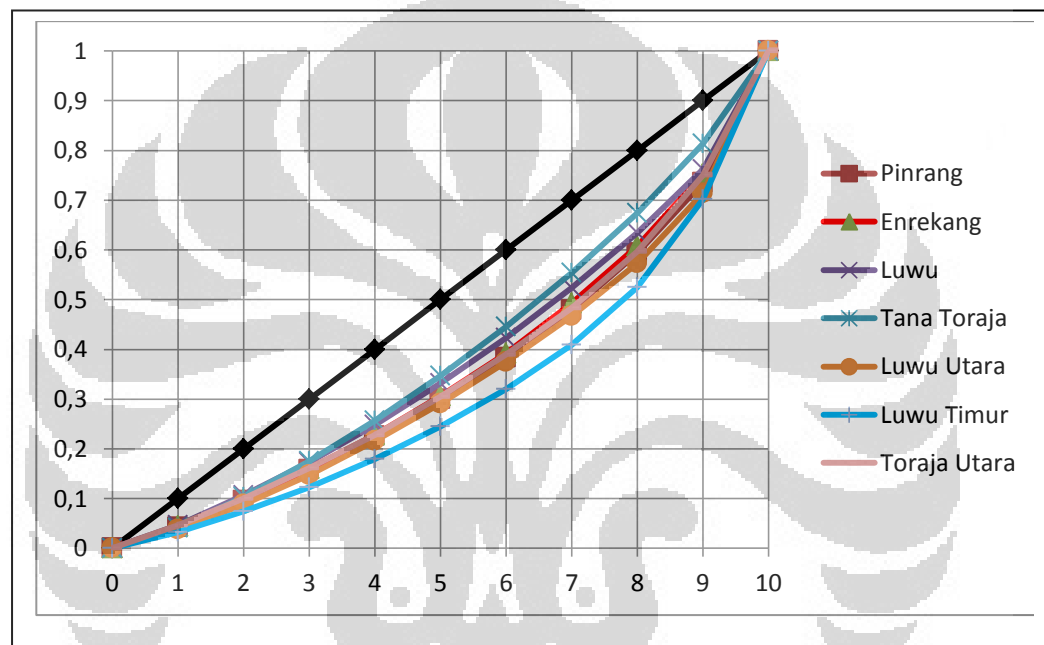
Gambar 3.30. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga yang memiliki anak Usia SMP di Pusat Kegiatan Lokal Selatan - Tengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

Dari gambar 3.30. diatas, dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Sinjai memiliki tingkat distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah menengah yang paling tinggi dibandingkan dengan 5 (lima) daerah lain yang masuk dalam kawasan Pusat Kegiatan Lokal Selatan–Tengah yakni Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap. Sedangkan yang paling rendah tingkat

perbedaan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama terjadi di Kabupaten Bantaeng.

3.3.3.2. Pusat Kegiatan Lokal Utara

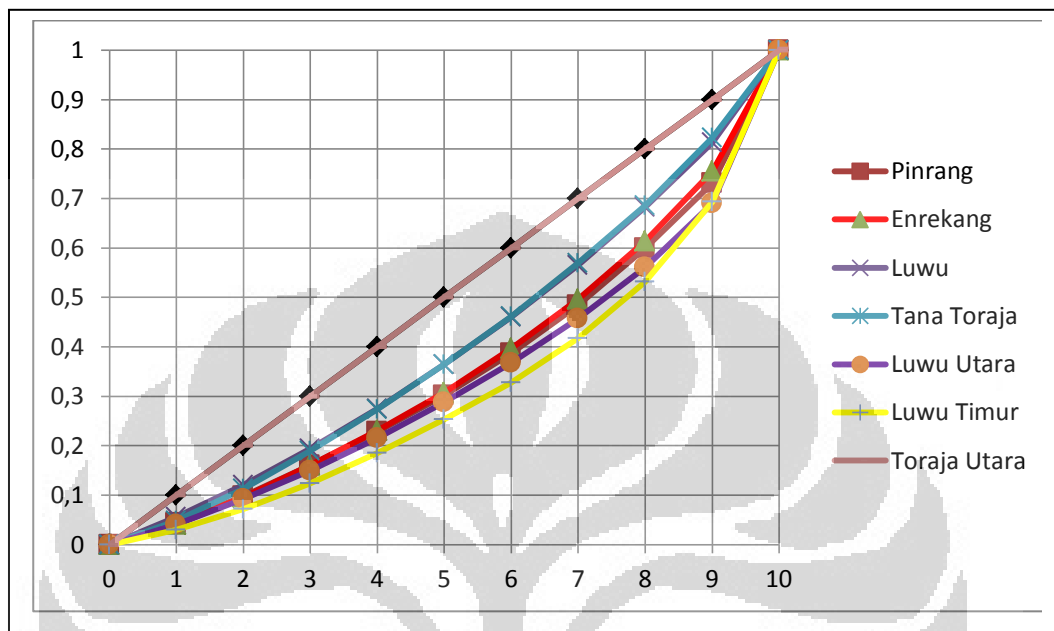
Kawasan ini meliputi wilayah Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Toraja Utara. Jika kawasan ini digambarkan dalam bentuk kurva Lorenz maka dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.31. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga yang memiliki anak Usia SD di Pusat Kegiatan Lokal Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

Dari gambar 3.31. diatas, dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki tingkat distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar yang paling tinggi dibandingkan dengan 6 (enam) daerah lain yang masuk dalam kawasan Pusat Kegiatan Lokal Utara yakni Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Toraja Utara. Sedangkan yang paling rendah tingkat perbedaan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar terjadi di Kabupaten Tana Toraja.

Sedangkan untuk distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) di PKL Utara ini dapat dilihat dalam Kurva Lorenz berikut ini :



Gambar 3.32. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga yang memiliki anak Usia SMP di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Utara di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

Dari gambar 3.32. diatas, dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki tingkat distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah menengah yang paling tinggi dibandingkan dengan 6 (enam) daerah lain yang masuk dalam kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Utara yakni Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Toraja Utara. Sedangkan yang paling rendah tingkat perbedaan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama terjadi di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Luwu.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Letak Geografis

Secara geografis wilayah darat Provinsi Sulawesi Selatan dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak antara $0^{\circ}12' \sim 8^{\circ}$ Lintang Selatan dan $116^{\circ} 48' \sim 122^{\circ} 36'$ Bujur Timur, yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah utara dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur, serta berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat dan Laut Flores di sebelah selatan. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya wilayah daratan mempunyai luas kurang lebih 45.519,24 km², dimana sebagian besar wilayah daratnya berada pada jazirah barat daya Pulau Sulawesi serta sebagian lainnya berada pada jazirah tenggara Pulau Sulawesi.

4.1.2. Topografi

Wilayah Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Kondisi Kemiringan tanah 0 sampai 3 persen merupakan tanah yang relatif datar, 3 sampai 8 persen merupakan tanah relatif bergelombang, 8 sampai 45 persen merupakan tanah yang kemiringannya agak curam, lebih dari 45 persen tanahnya curam dan bergunung. Wilayah daratan terluas berada pada 100 hingga 400 meter DPL, dan sebahagian merupakan dataran yang berada pada 400 hingga 1000 meter DPL. Terdapat sekitar 65 sungai yang mengalir di provinsi ini, dengan jumlah sungai terbesar ada di bagian utara wilayah provinsi ini. Lima danau besar menjadi rona spesifik wilayah ini, yang tiga di antaranya yaitu Danau Matana, Danau Towuti dan Danau Mahalona di Kabupaten Luwu Timur, serta dua danau lainnya yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo.

4.1.3. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45.751,91 km², penggunaan lahan dalam jumlah yang terbesar adalah hutan negara yang luasnya mencapai 28,45% dari total wilayah atau mencapai 13.014,56 km², kemudian lahan sawah yang secara keseluruhan luasnya mencapai 5.983,89 km² atau 13,08% dari total luas lahan yang ada terdiri dari lahan sawah seluas 5.983,89 km² dan lahan bukan sawah seluas 39.768,91 km². Penggunaan lahan lain yang cukup signifikan adalah kebun/tegalan yang luasnya mencapai 12,10% dari luas wilayah keseluruhan yaitu seluas 5.534,24 km². Penggunaan lahan terendah adalah kolam/empang yang hanya sebesar 145,79 km² (0,32%) dan rawa seluas 194,12 km² (0,42%).

Penggunaan lahan sebagai hutan negara terluas terdapat di Kabupaten Luwu Utara yang mencapai 3.732,79 km² atau 28,68% dari total luas hutan negara yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain Kabupaten Luwu Utara, daerah yang memiliki hutan negara yang relatif luas adalah Kabupaten Luwu Timur 2.311,25 km² atau 17,75% dari total luas hutan negara dan Kabupaten Bone yang memiliki hutan seluas 1.489,71 km² atau 11,45% dari total luas hutan negara di Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat dua kabupaten/kota yang tidak memiliki hutan negara yaitu Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Penggunaan lahan sebagai sawah terbesar terdapat di Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Luas lahan sawah di Kabupaten Bone mencapai 983,46 km² atau 16,44% dari total luas sawah sedangkan luas lahan sawah di Kabupaten Wajo mencapai 861,42 km² atau 14,40% dari total luas sawah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari keseluruhan luas sawah di kedua kabupaten tersebut, sebagian besar berupa sawah tadah hujan yang luasnya mencapai 641,95 km² di Kabupaten Bone dan 657,80 km² di Kabupaten Wajo. Penggunaan lahan sebagai sawah yang menggunakan irigasi teknis terbesar terdapat di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidenreng Rappang. Penggunaan lahan sawah irigasi mencapai 375,75 km² di Kabupaten Pinrang dan 298,90 km² di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penggunaan lahan sawah terendah terdapat di Kota Parepare yang lahan sawahnya hanya mencapai 9,33 km². Selain Kota Parepare, daerah yang memiliki lahan

sawah yang relatif sedikit adalah Kabupaten Selayar, Kota Palopo, dan Kota Makassar. Luas areal sawah di ketiga wilayah tersebut masing-masing 26,18 km² di Kabupaten Selayar, 29,84 km² di Kota Palopo, dan 30,33 km² di Kota Makassar.

4.1.4 Kependudukan

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan hasil survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2009 terdiri dari 3.808.726 laki – laki dan 4.041.356 perempuan. Struktur umur penduduk Sulawesi Selatan terdiri dari 2.405.567 (30,64 persen) penduduk berusia 0 – 14 tahun, 4.971.963 (63,34 persen) penduduk berusia 15 – 64 tahun, dan 472.552 (6,02 persen) penduduk berusia 65 tahun dan lebih. Kabupaten dengan persentase penduduk usia 0–14 tahun yang terbesar adalah Enrekang sekitar 37,91 persen, sedangkan persentase terendah adalah Kabupaten Wajo sekitar 25,17 persen.

Dilihat dari status perkawinannya, 37,62 persen penduduk Sulawesi Selatan berstatus belum kawin, sekitar 53,47 persen penduduk berstatus kawin dan sisanya lebih dari 8 persen berstatus cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Jumlah penduduk cerai hidup sekitar 2,09 persen dan yang cerai mati adalah sekitar 6,82 persen.

4.1.5. Kesehatan

Keluhan kesehatan yang paling banyak diderita penduduk adalah panas, batuk, dan pilek yang masing-masing mencapai angka 12,43 persen, 11,96 persen, dan 10,72 persen. Dari semua penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, yang perlu mendapat perhatian adalah besarnya persentase mereka yang terganggu kesehatannya selama < 4 hari yang mencapai sekitar 53,03 persen.

Sementara itu, balita yang ditolong oleh tenaga medis pada proses persalinan terakhirnya di Sulawesi Selatan mencapai 69,56 persen, sisanya sekitar 30,44 persen persalinan ditolong oleh tenaga non medis. Proses persalinan terakhir yang ditolong oleh tenaga non medis, paling banyak ditolong oleh dukun beranak yaitu sekitar 27,58 persen.

4.1.6. Fertilitas dan Keluarga Berencana

Usia perkawinan pertama pada wanita juga mempunyai pengaruh terhadap fertilitas, karena semakin muda usia perkawinana pertama semakin member peluang untuk mendapatkan anak yang lebih banyak. Di Sulawesi Selatan tahun 2009 sekitar 21,68 persen wanita pernah kawin menlangsungkan perkawinan pertama pada usia kurang dari 17 tahun. Selain itu sebagian besar wanita pernah kawin melangsungkan perkawinan pertama pada usia 19 – 24 tahun yaitu mencapai sekitar 40,76 persen dan pada usia 17-18 tahun sebanyak 22,43 persen.

Selain menunda usia perkawinanan pertama, upaya lain yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka kelahiran adalah Program Keluarga Berencana (KB). Wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin, sekitar 66,30 persen pernah mengikuti program KB dan 33,69 persen tidak pernah menggunakan alat KB. Jika diperhatikan menurut jenis alat/cara yang digunakan, ternyata persentase terbesar adalah untuk penggunaan suntikan KB yaitu sekitar 57,74 persen, disusul oleh pil KB sekitar 29,81 persen.

4.1.7. Perumahan

Rumah merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia selain sandang dan pangan. Keadaan tempat tinggal dapat menggambarkan kesejahteraan penghuninya dan juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk. Informasi penting yang dikumpulkan berkaitan dengan keadaan perumahan dalam susenas 2009 antara lain status kepemilikan rumah, luas lantai hunian, sumber air minum dan fasilitas buang air besar.

Di Sulawesi Selatan terdapat sekitar 81,32 persen yang menempati rumah dengan status milik sendiri. Apabila dilihat menurut luas lantai terbanyak, maka luas lantai 50-99 m paling banyak dimiliki oleh rumah tangga yaitu sekitar 48,09 persen. Sumber air minum yang paling banyak dipakai rumah tangga adalah mata air terlindung yaitu sekitar 24,24 persen.

Berdasarkan fasilitas buang air besar, 60,65 persen rumah tangga mempunyai fasilitas buang air besar sendiri dan 25,55 persen tidak mempunyai fasilitas buang air besar.

4.1.8. Pengeluaran Rumah Tangga

Data pengeluaran penduduk yang dikumpulkan melalui susenas dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhannya yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dari aspek ekonomi. Data jenis pengeluaran dibedakan menurut pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Pengeluaran perkapita sebulan untuk makanan adalah sebesar Rp. 233.288,- dan untuk non makanan adalah sebesar Rp. 177.381,-. Untuk pola konsumsi penduduk Sulawesi Selatan 56,81 persen adalah konsumsi makanan dan 43,19 persen untuk konsumsi non makanan.

4.2. Analisis Distribusi Manfaat Belanja Pemerintah Sulawesi Selatan Di Sektor Pendidikan

4.2.1 Kondisi Pendidikan di Sulawesi Selatan

Pada tahun 2010 dari seluruh penduduk berusia lima tahun dan lebih di Sulawesi Selatan terdapat 24,38 persen yang masih sekolah di berbagai tingkatan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Anak-anak usia SD (7-12 tahun) yang masih sekolah ada 96,53 persen, artinya ada 3,47 persen anak-anak usia SD yang tidak menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar. Anak-anak usia SLTP (13-15 tahun) yang masih sekolah ada 80,99 persen dari seluruh anak usia SLTP, artinya ada 19,01 persen anak usia Sekolah Menengah Pertama yang tidak memiliki akses ke layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Di tingkat SLTA terdapat 51,67 persen dari seluruh anak usia 16-18 tahun atau terdapat 48,33 persen anak usia SLTA tidak dapat menikmati layanan pendidikan ditingkat SLTA. Pada tingkatan perguruan tinggi yang masih sekolah ada 15,82 persen dari seluruh anak usia 19-24 tahun atau ada 84,18 persen yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi.

Sekitar 15,63 persen penduduk Sulawesi Selatan yang berumur 10 tahun ke atas yang masih sekolah, duduk di bangku SD atau lebih rendah (tidak pernah sekolah), sekitar 10,46 persen berpendidikan sekolah lanjutan dan sekitar 2,02 persen yang berpendidikan tinggi. Rendahnya pencapaian pendidikan menyebabkan masih tingginya angka buta huruf yang mencapai 11,43 persen. Selain itu, dari 6,3 juta jiwa penduduk Sulawesi Selatan sekitar 10,1 % diantaranya tidak/belum pernah sekolah, 22,4 % yang tidak memiliki ijazah, 27,12 % penduduk yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD), 15,6 % yang hanya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 18,8 % yang tamat Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan hanya 6,5 % yang tamat pendidikan di level Sarjana dan Pasca Sarjana (D1 – S3). (dapat dilihat pada lampiran 1).

Kondisi pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan juga ditandai dengan jumlah murid pada semua level pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMU dan SMK. Pada tahun 2010 jumlah murid di masing-masing Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 1,7 juta murid yang ada di Sulawesi Selatan sekitar 6,3 % diantaranya adalah murid Taman Kanak – Kanak (TK), 59 % merupakan murid Sekolah Dasar (SD), 19,9 % merupakan murid Sekolah Menengah Pertama (SMP), 10,1 % merupakan murid Sekolah Menengah Umum (SMU) dan 4,3 % merupakan murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). (lihat lampiran 2).

Dari data tersebut, Kota Makassar merupakan daerah yang memiliki jumlah murid tertinggi untuk semua level pendidikan. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk Kota Makassar adalah yang terbesar dari semua Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini berarti bahwa animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Kota Makassar sangat tinggi. Sedangkan jumlah murid terendah ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini disebabkan selain karena jumlah penduduknya yang memang relatif sedikit, kondisi geografis Kepulauan Selayar juga menjadi kendala bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jarak satu pulau

dengan pulau lainnya yang sangat berjauhan menjadi realita yang tidak dapat dipungkiri.

Perhatian pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada alokasi anggaran pendidikan yang dianggarkan oleh masing – masing dinas pendidikan di kabupaten/kota tersebut. Untuk belanja pemerintah di sektor pendidikan di masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan terbesar ada di Kota Makassar sebesar Rp. 489 Milyar. Hal ini terjadi karena jumlah sekolah di Kota Makassar juga sangat besar yang mencapai 1208 unit mulai dari Taman Kanak – Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Umum. Besarnya anggaran tersebut memudahkan Pemerintah Kota Makassar untuk membiayai sektor pendidikannya. Sedangkan anggaran pendidikan terendah ada di Kabupaten Tana Toraja. Hal ini terjadi karena pada tahun 2007 kabupaten tersebut dimekarkan menjadi Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Hal ini berimplikasi pada menurunnya anggaran pendidikan akibat dari menurunnya jumlah unit sekolah, pegawai, guru dan murid yang ada dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja. (dapat dilihat dalam lampiran 3).

Masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan telah menganggarkan anggaran untuk sektor pendidikan. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Yang termasuk belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan untuk belanja tidak langsung adalah termasuk belanja kegiatan yakni segala pengeluaran yang diakibatkan oleh pelaksanaan suatu kegiatan.

Sedangkan persentase anggaran masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terhadap total pendapatan dapat disimpulkan bahwa persentase anggaran pendidikan terbesar terjadi di Kabupaten Toraja Utara sebesar 52 % dari total pendapatannya. Hal ini terjadi karena Kabupaten ini baru dimekarkan dari Kabupaten Tana Toraja. Penyediaan Prasarana dan sarana pendidikan menjadi perhatian utama Kabupaten Toraja Utara. Jika sebuah daerah baru dimekarkan tentunya membutuhkan kantor baru dan sarana penunjang lainnya. Apalagi kalau

pemekaran kabupaten tersebut diikuti dengan pemekaran kecamatan. Sedangkan persentase terendah terjadi Kabupaten Tana Toraja. Daerah induk Kabupaten Toraja Utara ini, hanya menganggarkan 16 % dari pendapatannya di sektor pendidikan karena berkurangnya jumlah tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan serta murid yang banyak pindah ke wilayah Kabupaten Toraja Utara. (dapat di lihat pada lampiran 4).

4.2.2. Belanja Pendidikan Permurid

Untuk mendapatkan belanja pendidikan permurid maka dapat dicari melalui jumlah total anggaran APBN (dana BOS) ditambah dengan total anggaran pendidikan masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Selatan kemudian dibagi dengan jumlah murid yang bersekolah pada level Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). SMU dan SMK dikeluarkan dari perhitungan ini karena biaya operasional pendidikan untuk SMU dan SMK ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan orang tua murid (melalui SPP dll). Olehnya itu, dalam penelitian ini tidak memasukkan murid SMU/SMK sebagai bagian yang harus ditanggung pembiayaannya baik oleh dana BOS maupun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kecuali untuk gaji tenaga kependidikan yang ada di level SMU/SMK tersebut.

Adapun besaran dana BOS yang dialokasikan untuk seluruh murid SD dan SMP dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1.
Besaran Dana BOS Untuk Setiap Jenjang Pendidikan
Berdasarkan Lokasi Tahun 2010

Tingkat Pendidikan	Kabupaten	Kota
SD/SDLB	Rp. 397.000/Siswa	Rp. 400.000/Siswa
SMP/SMPLB/SMPT	Rp. 570.000/Siswa	Rp. 575.000/Siswa

Sumber : Kementerian Pendidikan Nasional 2010

Berdasarkan pada tabel 4.1. diatas, maka belanja pendidikan permurid di masing masing kabupaten/kota akan berbeda di tiap level pendidikan. Belanja pendidikan permurid merupakan perkiraan total belanja setiap murid setiap tahun.

Belanja pendidikan permurid tersebut menjadi biaya operasional sekolah dalam menjalankan kegiatan belajar dan pembelajaran.

Jika dilihat dari belanja pendidikan permurid baik SD maupun SMP semuanya berada di kisaran antara 1 juta sampai 1,4 juta. Belanja pendidikan permurid Sekolah Dasar (SD) terbesar di Kabupaten Pangkep sebesar Rp. 1.171.425,-, sedangkan belanja pendidikan murid SD terendah terjadi di Kota Palopo sebesar Rp. 1.007.759,-. Sedangkan untuk level Sekolah Menengah Pertama, belanja pendidikan terbesar ada di Kabupaten Pangkep sebesar Rp. 1.344.425, dan terendah terjadi di Kota Palopo sebesar Rp. 1.182.759,-. Selain itu, secara keseluruhan belanja pendidikan permurid SMP lebih tinggi daripada belanja pendidikan permurid SD. Hal ini terjadi karena besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Menengah Pertama lebih tinggi daripada Sekolah Dasar (lampiran 5).

4.2.3. Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan

4.2.3.1. Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan

Jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010 terdiri dari 3.808.726 laki – laki dan 4.041.356 perempuan. Dari total penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut penduduk yang berusia Sekolah Dasar (7 – 12 tahun) sebesar 1.039.874 orang atau sebesar 13,29 % dari jumlah penduduk atau 14,59 % dari total penduduk usia sekolah. Sedangkan jumlah penduduk usia 13– 15 tahun sebanyak 490.508 orang atau 6,27 % dari jumlah penduduk atau 6,88 % dari jumlah penduduk usia sekolah. Dalam hal ini, usia sekolah TK, SMU/SMK tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Untuk menghasilkan hasil BIA yang komprehensif maka penelitian ini hanya akan fokus pada rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga (ART) yang berusia sekolah, yakni 7–15 tahun. Hal ini berdasarkan bahwa belanja pendidikan khususnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditujukan khusus kepada setiap warga negara usia sekolah (7–15 tahun). Selanjutnya penelitian ini menggunakan data pengguna layanan pendidikan di 24 Kabupaten/Kota dalam

Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Susenas Kor pada tahun 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik.

Jumlah sampel survei tersebut sebanyak 9626 individu dari 7244 rumah tangga. Untuk anak usia Sekolah Dasar (7 – 12 Tahun) persentase terbesar ada di Kabupaten Bone dan Kabupaten Luwu Utara masing – masing sebesar 80,7 %, sedangkan persentase terendah ada di Kabupaten Soppeng sebesar 68,7 %. Untuk anak usia Sekolah Menengah Pertama (13 – 15 tahun) persentase terbesar ada di Kabupaten Soppeng sebesar 31,3 % dan persentase terendah di Kabupaten Bone dan Kabupaten Luwu Utara masing – masing sebesar 19,3 % (lampiran 6).

Selanjutnya dari 7244 rumah tangga yang tersebar di 24 kabupaten/kota tersebut diatas, kemudian dibagi 10 kelompok pendapatan (desil). Pembagian ini berdasarkan pada tingkat pendapatan rumah tangga perbulan dimulai dari kelompok berpendapatan rendah ke kelompok berpendapatan tinggi. Jumlah rumah tangga tersebut kadangkala tidak genap dibagi kedalam 10 kelompok pendapatan (desil) sehingga ada desil yang mempunyai anggota lebih banyak daripada desil lainnya.

Selain itu, perlu juga diperhatikan pendapatan perkapita masing-masing rumah tangga berdasarkan pada garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010. Besaran garis kemiskinan itu berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya tergantung pada tinggi – rendahnya harga di daerah yang bersangkutan. Dari perhitungan tersebut didapatkan jumlah rumah tangga serta anggota rumah tangga miskin yang menikmati anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Hal ini penting untuk menjelaskan pada desil mana saja rumah tangga dan murid miskin itu berada dan seberapa besar persentasenya dalam menikmati layanan pendidikan yang tersedia.

Adapun besaran garis kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp. 249.111,-. Hal ini menjadi indikasi bahwa harga barang-barang konsumsi di Kabupaten Toraja Utara relatif mahal dibandingkan dengan daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Sedangkan jumlah rumah tangga miskin terbesar ada di Kabupaten Pangkep sebesar 59 rumah tangga yang berada di bawah garis

kemiskinan. Adapun jumlah rumah tangga miskin terendah ada di Kabupaten Pinrang sebanyak 17 rumah tangga yang berada dibawah garis kemiskinan.

Selain itu jumlah murid miskin terbesar ada di Kabupaten Toraja Utara sebanyak 108 murid yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan jumlah murid miskin terendah ada di Kabupaten Pinrang sebanyak 25 orang murid yang berada di bawah garis kemiskinan. (lihat lampiran 7).

Jika dilihat pada (lampiran 7) itu pula, memberikan gambaran berapa banyak rumah tangga yang berada dibawah garis kemiskinan yang ikut menikmati layanan pendidikan baik ditingkat Sekolah Dasar maupun yang ada ditingkat Sekolah Menengah Pertama di setiap kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan berdasarkan pada tingkat pendapatan perkapitanya. Pendapatan perkapita tersebut didapatkan dengan membagi jumlah pendapatan rumah tangga sebulan dengan jumlah anggota rumah tangga yang ada dalam rumah tangga tersebut.

Selain itu, juga memberikan gambaran persentase murid yang berasal dari rumah tangga yang berada dibawah garis kemiskinan yang ikut menikmati layanan pendidikan baik ditingkat Sekolah Dasar maupun ditingkat Sekolah Menengah Pertama di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya hasil perhitungan diatas masing – masing akan diuraikan pada penjelasan distribusi manfaat belanja pendidikan baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama dengan menjelaskan pada desil mana saja murid miskin itu berasal.

4.2.3.2. Distribusi Manfaat Belanja Pendidikan SD dan SMP di 24 Kabupaten/Kota

Besar kecilnya manfaat yang diterima oleh tiap kelompok pendapatan di masing-masing tingkat pendidikan akhirnya ditentukan oleh persentase anggota rumah tangga mereka yang bersekolah di SD dan SMP. Pembahasan mengenai distribusi manfaat belanja pendidikan SD dan SMP di 24 Kabupaten/Kota akan dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok besar berdasarkan pada pusat-pusat kegiatan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yakni Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pusat

Kegiatan Lokal (PKL) ini kemudian dibagi 2 (dua) agar memudahkan dalam pembahasannya.

4.2.3.2.1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ini terdiri dari Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. Adapun pembahasan distribusi manfaat belanja pendidikan SD dan SMP untuk seluruh daerah yang ada dalam Pusat Kegiatan Nasional adalah sebagai berikut :

4.2.3.2.1.1. Kota Makassar

Setelah dilakukan perhitungan, desil pertama, ketiga, kelima, dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,67 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil keenam, ketujuh, dan kedelapan sebesar 10,04 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kedua, keempat dan kesembilan yakni sebesar 10,41 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 192 rumah tangga (269 murid), terdapat 13 rumah tangga (23 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 6,8 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kota Makassar. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil keempat. Persentase desil pertama sebagai kalangan paling miskin dan persentase desil kesepuluh sebagai kalangan paling kaya di Kota Makassar adalah sama yakni sebesar 9,67 persen maka ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat netral atau keberpihakan kepada rumah tangga miskin dan kaya adalah sama. Salah satu faktor yang membuat persentase tersebut sama karena subsidi pendidikan terutama dana BOS tidak membedakan antara murid dari kalangan rumah tangga miskin dengan murid yang berasal dari rumah tangga kaya.

Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), desil keenam dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 8,82 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil pertama, kedua, ketiga, kelima dan kedelapan

sebesar 9,80 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil keempat dan kesembilan yakni sebesar 10,78 %. Manfaat paling tinggi diperoleh oleh desil ketujuh yakni sebesar 11,76 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 93 rumah tangga (102 murid), terdapat 6 rumah tangga (7 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 6,4 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Makassar. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama dan desil kedua. Jika melihat persentase desil pertama sebagai kalangan paling miskin di Kota Makassar yang sebesar 9,80 % sedangkan desil kesepuluh yang merupakan kalangan paling kaya hanya memperoleh manfaat sebesar 8,82 % yang berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat progresif artinya berpihak kepada rumah tangga miskin. (lampiran 8).

Jumlah rumah tangga miskin di Kota Makassar relatif kecil dibandingkan dengan daerah lain karena Kota Makassar merupakan daerah dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa yang sangat dinamis sehingga memudahkan penduduknya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pekerjaan dan penghidupan yang layak memungkinkan mereka untuk bisa meningkatkan tingkat pendapatannya. Dengan pendapatan yang layak memungkinkan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di berbagai jenjang persekolahan tanpa melihat status sekolah tersebut negeri atau swasta. Apalagi kebijakan Pemerintah Kota Makassar untuk tetap mensubsidi sekolah swasta dengan dana BOS di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

4.2.3.2.1.2. Kabupaten Maros

Hasil perhitungan untuk Sekolah Dasar menunjukkan bahwa desil pertama, keempat, keenam dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,75 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil kedua, ketujuh, dan kedelapan sebesar 10,03 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil ketiga, kelima dan kesembilan yakni sebesar 10,31 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 255 rumah tangga (359 murid),

terdapat 36 rumah tangga (53 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 14,1 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Maros. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil kelima. Jika melihat besaran persentase desil pertama dan kesepuluh yang sama yakni sebesar 9,75 % maka ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat netral berarti persentase yang sama antara rumah tangga miskin dan kaya.

Hasil perhitungan untuk Sekolah Menengah Pertama menunjukkan bahwa desil pertama, kelima, ketujuh dan kesembilan memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,35 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil kedua, ketiga, keempat, kedelapan dan kesepuluh sebesar 10,28 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil keenam yakni sebesar 11,21%. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 102 rumah tangga (107 murid), terdapat 13 rumah tangga (15 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 12,7 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Maros. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama, desil kedua, desil ketiga, desil keempat dan desil kelima. Jika melihat pada besaran persentase antara desil pertama sebagai pemilik pendapatan terendah sebesar 9,35 % dan desil kesepuluh sebagai representasi kalangan rumah tangga kaya yang sebesar 10,28 % maka ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat regresif artinya anggaran pendidikan lebih berpihak kepada rumah tangga kaya. (lampiran 9).

Kabupaten Maros sebagai penyanggah Kota Makassar di sebelah utara merupakan kabupaten dengan sektor unggulan transportasi udara karena dua bandara yakni Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan Bandara Mandai sebagai pintu gerbang masuk ke Sulawesi Selatan berada di daerah ini. Selain itu, sektor lain yang juga merupakan unggulan adalah industri dan pariwisata. Kabupaten Maros merupakan penghasil semen terbesar kedua setelah Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan dan memiliki kawasan pariwisata dimana Air Terjun

Bantimurung sebagai sebagai air terjun terbesar di Sulawesi Selatan berada. Daerah ini juga merupakan perlintasan utama menuju Kota Makassar dari arah utara maupun dari arah timur sehingga perekonomian daerahnya sangat dinamis.

4.2.3.2.1.3.Kabupaten Gowa

Hasil perhitungan untuk Sekolah Dasar (SD) menunjukkan bahwa desil pertama dan kelima memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,57 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil ketujuh, kesembilan dan kesepuluh sebesar 9,90 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kedua, ketiga, keempat, keenam dan kedelapan yakni sebesar 10,23 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 241 rumah tangga (303 murid), terdapat 17 rumah tangga (25 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 7,1 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Gowa. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil kelima. Jika melihat besaran persentase desil pertama sebagai kelompok rumah tangga yang memiliki pendapatan terendah memperoleh manfaat terkecil sebesar 9,57 % dan desil kesepuluh sebagai kelompok rumah tangga yang memiliki pendapatan tertinggi memperoleh manfaat sebesar 9,90 % maka ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Gowa bersifat regresif atau berpihak kepada kalangan rumah tangga yang berpenghasilan tinggi.

Sedangkan hasil perhitungan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan bahwa desil pertama, kelima dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,40 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan yakni sebesar 10,26 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 113 rumah tangga (117 murid), terdapat 10 rumah tangga (10 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 8,8 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gowa.

Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama, desil kedua, desil ketiga dan desil keempat. Besaran persentase desil pertama yang memiliki pendapatan terendah dan desil kesepuluh yang memiliki pendapatan paling tinggi menerima manfaat masing – masing sebesar 9,40 % maka ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat netral dimana distribusi manfaat untuk rumah tangga yang memiliki pendapatan terendah dan rumah tangga yang memiliki pendapatan paling tinggi memperoleh manfaat yang sama. (lampiran 10)

Kabupaten Gowa merupakan kawasan penyanggah Kota Makassar di sebelah selatan. Daerah ini merupakan perlintasan utama menuju Kota Makassar dari arah selatan. Banyak industri dan pergudangan berdiri di daerah ini setelah pemerintah Kota Makassar melarang pembangunan gudang di dalam Kota Makassar. Dengan banyaknya investasi di daerah ini, memungkinkan penduduknya memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak. Sektor lain yang juga merupakan unggulan adalah sektor jasa dan perdagangan. Namun, kondisi ini terjadi hanya disekitar ibukota kabupaten saja. Di bagian lain daerah ini, terutama daerah pegunungan cenderung kurang berkembang karena hanya mengandalkan pertanian dan perkebunan tradisional, sehingga distribusi pendapatan masyarakat di daerah ini relatif kurang merata. Perkembangan perekonomian di bagian barat dan selatan yang sangat maju pesat berbanding terbalik dengan bagian timur yang relatif kurang berkembang.

4.2.3.2.1.4. Kabupaten Takalar

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa desil pertama, kedua, keempat, keenam, kedelapan dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,87 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil ketiga, kelima, ketujuh dan kesembilan yakni sebesar 10,20%. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 234 rumah tangga (304 murid), terdapat 22 rumah tangga (30 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 9,4 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Takalar. Rumah

tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil keenam. Jika melihat persentase desil pertama yang merupakan kelompok rumah tangga yang memiliki pendapatan paling rendah dan desil kesepuluh sebagai kelompok rumah tangga yang memiliki pendapatan tertinggi memperoleh manfaat masing – masing sebesar 9,87 % maka ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat netral dimana keberpihakan anggaran kepada rumah tangga miskin dan kaya adalah sama.

Sedangkan hasil perhitungan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan bahwa desil pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, kedelapan, kesembilan dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,88 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil keenam yakni sebesar 11,11 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 79 rumah tangga (81 murid), terdapat 8 rumah tangga (8 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 10,12 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Takalar. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama, desil kedua dan desil ketiga. Desil pertama sebagai kelompok rumah tangga yang memiliki pendapatan terendah dan desil kesepuluh sebagai kelompok rumah tangga dengan pendapatan tertinggi memperoleh manfaat yang sama sebesar 9,88 %. Hal ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat netral dimana persentase manfaat yang diterima kedua kelompok tersebut adalah sama. (lampiran 11).

Sektor unggulan di Kabupaten Takalar adalah sektor pertanian. Luas areal persawahan di daerah ini sebesar 163,14 km². Luasnya wilayah lahan sawah di daerah ini mengakibatkan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Selain itu, masyarakat di daerah pesisir pantai banyak bekerja sebagai nelayan dan petani rumput laut. Sama dengan Kabupaten Gowa yang merupakan daerah perlintasan dari arah selatan, Kabupaten Takalar juga merupakan daerah persinggahan sehingga menghidupkan sektor riil terutama pedagang makanan dan minuman di sepanjang jalur perlintasan tersebut.

4.2.3.2.2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Adapun distribusi manfaat belanja pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ini adalah sebagai berikut :

4.2.3.2.2.1. Kota Palopo

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi manfaat belanja pemerintah di sektor pendidikan, desil pertama, keempat, keenam dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,82 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kedua, ketiga, kelima, ketujuh, kedelapan dan kesembilan yakni sebesar 10,12 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 210 rumah tangga (326 murid), terdapat 35 rumah tangga (62 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 16,7 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kota Palopo. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil kedelapan. Jika melihat besaran persentase manfaat yang diterima oleh desil pertama dan desil kesepuluh yang masing – masing sebesar 9,82 %, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat netral atau berpihak kepada rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya dengan persentase yang sama.

Sedangkan untuk distribusi manfaat anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama, desil pertama dan keempat memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 8,86 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil kedua, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan dan kesepuluh sebesar 10,13 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil ketiga yakni sebesar 11,39 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 72 rumah tangga (79 murid), terdapat 13 rumah tangga (18 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 18 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Palopo. Rumah tangga

miskin tersebut berada di desil pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan kedelapan. Jika melihat pada besaran persentase manfaat yang diterima oleh desil pertama yang berisi rumah tangga yang memiliki pendapatan terendah memperoleh manfaat hanya sebesar 8,86 % dan desil kesepuluh yang merupakan kelompok rumah tangga yang berpendapatan tinggi yang menikmati manfaat sebesar 10,13 % maka ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat regresif artinya berpihak kepada rumah tangga kaya. (lampiran 12).

Sifat anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar bersifat netral di Kota Palopo disebabkan karena besaran subsidi yang sama terhadap masing – masing murid SD. Sementara untuk Sekolah Menengah Pertama bersifat regresif karena jumlah rumah tangga miskin yang ada di Kota Palopo relatif kecil. Hal ini disebabkan karena Kota Palopo merupakan daerah perdagangan dan jasa yang berkembang sangat cepat dan merupakan pusat pertumbuhan di bagian utara Sulawesi Selatan, sehingga pendapatan perkapita masyarakat sangat signifikan dalam mendukung kehidupannya.

4.2.3.2.2.2.Kabupaten Bone

Dari hasil perhitungan distribusi manfaat belanja pemerintah di sektor pendidikan, desil pertama, kelima, ketujuh dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,79 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil kedua, ketiga, keempat, kedelapan dan kesembilan sebesar 10,09 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil keenam yakni sebesar 10,40 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 228 rumah tangga (327 murid), terdapat 29 rumah tangga (48 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 12,7 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Bone. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil kedelapan. Jika melihat pada besaran persentase desil pertama yang merupakan kelompok rumah tangga dengan pendapatan yang paling rendah dan desil kesepuluh yang merupakan kelompok rumah tangga yang

memiliki tingkat pendapatan tertinggi masing – masing sebesar 9,79 % maka dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat netral atau berpihak kepada rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya dengan persentase yang sama.

Sedangkan distribusi manfaat untuk belanja pendidikan di level Sekolah Menengah Pertama, desil kedua dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 8,97 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil pertama, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh kedelapan dan kesembilan yakni sebesar 10,26 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 71 rumah tangga (78 murid), terdapat 7 rumah tangga (9 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 9,8 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bone. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama, desil kedua, desil ketiga, desil keempat dan desil keenam. Jika desil pertama yang merupakan kelompok rumah tangga dengan pendapatan terendah memperoleh manfaat lebih banyak yakni sebesar 10,26 % jika dibandingkan dengan desil kesepuluh yang merupakan kelompok rumah tangga dengan pendapatan tertinggi yang hanya menerima manfaat sebesar 8,97 % maka ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat progresif artinya berpihak kepada rumah tangga miskin. (lampiran 13).

Manfaat yang diterima oleh rumah tangga untuk belanja pendidikan di Sekolah Dasar bersifat netral disebabkan karena subsidi yang diberikan kepada murid SD adalah jumlahnya sama tanpa melihat latar belakang kehidupan sosial ekonomi rumah tangga murid SD yang bersangkutan. Namun, untuk manfaat belanja pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bone yang bersifat progresif karena tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga relatif merata sehingga orang tua murid yang memiliki pendapatan tinggi dapat menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Dengan kondisi tersebut memungkinkan rumah tangga miskin memiliki peluang lebih banyak untuk menyekolahkan anaknya. Pendapatan rumah tangga di Kabupaten Bone relatif merata karena daerah ini

merupakan daerah penghasil hasil pertanian terutama padi terbesar di Sulawesi Selatan bersama dengan 5 daerah lainnya yang tergabung dalam BOSOWA SIPILU (Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu). Keenam daerah ini merupakan penyanggah utama kebutuhan pangan terutama padi karena berdasarkan perhitungan Location Question (LQ) semua daerah tersebut memiliki nilai LQ lebih dari 1. Artinya, selain mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, daerah ini juga mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah lain bahkan ke provinsi lain. Sumber ekonomi lain yang dimiliki oleh Kabupaten Bone adalah Pelabuhan Bajoe yang merupakan perlintasan utama masyarakat Sulawesi Selatan yang akan menuju Sulawesi Tenggara. Sektor angkutan laut ini juga memberi sumbangsih yang tidak sedikit terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone.

4.2.3.2.2.3. Kabupaten Jeneponto

Setelah dilakukan perhitungan distribusi manfaat belanja pemerintah di sektor pendidikan terutama untuk Sekolah Dasar (SD) didapatkan bahwa desil kelima, dan desil kesembilan memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,58 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil pertama, kedua, ketiga dan kesepuluh sebesar 9,90 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil ketiga, keempat dan keenam yakni sebesar 10,22 %. Manfaat paling tinggi diperoleh oleh desil kedelapan sebesar 10,54 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 225 rumah tangga (313 murid), terdapat 42 rumah tangga (68 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 18,7 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Jeneponto. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil kedelapan. Jika melihat pada besaran persentase desil pertama yang merupakan kelompok rumah tangga yang memiliki pendapatan terendah dengan memperoleh manfaat yang sama dengan desil kesepuluh yang merupakan kelompok rumah tangga dengan pendapatan tertinggi dengan nilai sebesar 9,90 % maka ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat netral atau keberpihakan kepada rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya adalah sama.

Sedangkan distribusi manfaat belanja pendidikan untuk level Sekolah Menengah Pertama, desil pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, kedelapan, kesembilan dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,76 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil keempat dan ketujuh yakni sebesar 10,98 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 80 rumah tangga (82 murid), terdapat 8 rumah tangga (8 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 10 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Jeneponto. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama, desil kedua, desil ketiga, desil keempat dan desil kelima. Jika melihat pada besaran persentase yang diterima desil pertama yang merupakan kelompok rumah tangga yang memiliki pendapatan terendah dan desil kesepuluh yang merupakan kelompok rumah tangga dengan pendapatan tertinggi dengan manfaat yang sama sebesar 9,76 % hal ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat netral atau persentase keberpihakan kepada rumah tangga miskin dan kaya adalah sama. (lampiran 14).

Distribusi manfaat yang netral dari belanja pemerintah di sektor pendidikan di Kabupaten Jeneponto memberikan gambaran bahwa tingkat pendapatan masyarakat di daerah ini relatif merata sehingga kesempatan dan peluang untuk memperoleh pendidikan antara yang miskin dan kaya adalah sama. Hal ini juga disebabkan oleh adanya subsidi pemerintah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kedua jenjang pendidikan tersebut. Distribusi pendapatan yang merata tersebut disebabkan oleh karena mayoritas masyarakat di Kabupaten Jeneponto bekerja di sektor pertanian dan perdagangan. Walaupun hasil pertaniannya tidak besar akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan pangan di dalam wilayah Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan. Selain itu, pemanfaatan garis pantai sepanjang 75 km, banyak dipergunakan oleh masyarakat pesisir untuk membudidayakan rumput laut. Sedangkan di daerah pegunungan, masyarakat selain bekerja di sektor pertanian juga bekerja di sektor perkebunan yang menghasilkan sayur mayor. Masyarakat Jeneponto dikenal memiliki ethos kerja

yang tinggi, maklum karena kondisi alam yang kritis dan cenderung kering memaksa masyarakat untuk bekerja keras demi mendapatkan pendapatan bagi keluarganya.

4.2.3.2.2.4. Kabupaten Barru

Berdasarkan hasil perhitungan, desil keempat memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,38 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil pertama, kedua, kedelapan dan kesepuluh sebesar 9,77 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kelima, keenam, ketujuh dan kesembilan yakni sebesar 10,16 %. Manfaat paling tinggi diperoleh oleh desil ketiga sebesar 10,94 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 188 rumah tangga (256 murid), terdapat 14 rumah tangga (20 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 7,4 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Barru. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil ketujuh. Jika melihat pada besaran persentase manfaat yang diterima oleh desil pertama dan kesepuluh yang masing – masing sebesar 9,77 % maka ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat netral atau berpihak kepada rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya dengan persentase yang sama.

Sedangkan distribusi manfaat untuk belanja pendidikan di Sekolah Menengah Pertama, desil pertama, kelima dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,20 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh kedelapan dan kesembilan yakni sebesar 10,34%. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 81 rumah tangga (87 murid), terdapat 5 rumah tangga (6 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 6,1 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Barru. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama dan desil kedua. Sedangkan besaran persentase manfaat yang diterima oleh rumah tangga miskin di

desil pertama dan rumah tangga paling kaya di desil kesepuluh yang masing – masing memperoleh manfaat yang sama sebesar 9,20 % maka ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat netral artinya berpihak kepada rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin dengan persentase yang sama. (lampiran 15)

Manfaat belanja pemerintah di sektor pendidikan di Kabupaten Barru yang bersifat netral baik untuk tingkat SD maupun tingkat SMP lebih banyak disebabkan oleh tingkat pendapatan yang hampir merata bagi seluruh rumah tangga di Kabupaten Barru. Kondisi perekonomian di Kabupaten Barru banyak ditopang oleh sektor perdagangan karena merupakan daerah perlintasan bagi masyarakat dari arah utara yang akan menuju ke Kota Makassar. Selain itu, masyarakat banyak yang bekerja di sektor pertanian sehingga kebutuhan akan pangan dapat tertutupi secara mandiri.

4.2.3.2.2.5.Kota Pare – Pare

Distribusi manfaat belanja pemerintah di sektor pendidikan di Kota Pare – Pare menghasilkan kesimpulan bahwa desil pertama, keempat, dan kedelapan memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,71 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil kedua, kelima, keenam, kesembilan dan kesepuluh sebesar 10,03 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil ketiga, dan ketujuh yakni sebesar 10,36 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 213 rumah tangga (309 murid), terdapat 20 rumah tangga (38 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 9,4 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kota Pare – Pare. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil kelima. Jika dilihat pada besaran persentase manfaat yang diterima desil pertama yang merupakan kelompok masyarakat berpendapatan rendah sebesar 9,71 % dan desil kesepuluh yang merupakan kelompok rumah tangga yang berpendapatan tinggi dengan persentase manfaat sebesar 10,03 % maka hal ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat regresif atau distribusi manfaat

dari anggaran pendidikan tersebut lebih banyak dinikmati oleh orang yang berpendapatan tinggi.

Sedangkan untuk distribusi manfaat belanja pemerintah di sektor pendidikan pada level Sekolah Menengah Pertama, desil pertama, kedua, kelima, keenam, kedelapan, dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,57 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil ketiga, keempat, ketujuh dan kesembilan yakni sebesar 10,64 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 87 rumah tangga (94 murid), terdapat 7 rumah tangga (9 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 8 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Pare – Pare. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama, desil kedua dan keempat. Jika melihat pada besaran distribusi manfaat yang diterima oleh desil pertama dan kesepuluh yang memperoleh jumlah yang sama sebesar 9,57 % maka hal ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat netral artinya berpihak kepada rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin dengan persentase yang sama. (lampiran 16).

Kondisi regresif terjadi di level Sekolah Dasar karena jumlah rumah tangga miskin relatif sedikit di Kota Pare – Pare sementara rumah tangga yang memiliki pendapatan yang tinggi sangat banyak. Namun, untuk level Sekolah Menengah Pertama, bersifat netral karena banyak anak dari kalangan rumah tangga dengan pendapatan tinggi bersekolah di sekolah swasta yang dianggap memiliki mutu yang lebih baik. Hal ini tentu memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada anak dari rumah tangga miskin untuk menikmati pendidikan di level Sekolah Menengah Pertama. Distribusi pendapatan masyarakat di Kota Pare – Pare relatif merata karena daerah ini memiliki keunggulan disektor perdagangan dan jasa transportasi dimana daerah ini merupakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) karena memiliki daya dukung pelabuhan yang dapat disinggahi oleh kapal – kapal besar baik penumpang yang melayani rute Pare – Pare ke Balikpapan dan Samarinda di Kalimantan Timur. Hampir semua barang kebutuhan pokok warga Kalimantan

Timur dari Sulawesi Selatan melalui pelabuhan ini sehingga lalu lintas barang dan jasa serta perekonomian kota dapat berjalan dengan dinamis.

4.2.3.2.2.6. Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan bahwa desil pertama, keempat, dan kesembilan memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,67 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Namun manfaat rata-rata diperoleh oleh desil kedua, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan dengan nilai 10,04 %. Sedangkan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil ketiga dan kesepuluh yakni sebesar 10,41 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 190 rumah tangga (269 murid), terdapat 16 rumah tangga (25 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 8,4 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Bulukumba. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil kelima. Jika dilihat pada besaran persentase desil pertama yang merupakan kelompok rumah tangga yang memiliki pendapatan terendah memperoleh manfaat sebesar 9,67 % dan desil kesepuluh yang merupakan kelompok rumah tangga yang memiliki pendapatan tertinggi mendapat manfaat tertinggi sebesar 10,41 % maka dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat regresif dimana persentase manfaat yang diterima oleh rumah tangga kaya lebih banyak daripada rumah tangga miskin.

Sedangkan distribusi manfaat yang diterima oleh rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah bahwa desil pertama, kelima, kedelapan dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,09 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil kedua, ketiga, keempat, keenam, dan ketujuh sebesar 10,39 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kesembilan yakni sebesar 11,69 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 72 rumah tangga (77 murid), terdapat 5 rumah tangga (6 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 6,9 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah

Pertama di Kabupaten Bulukumba. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama, desil kedua, desil keempat dan desil ketujuh. Jika dilihat pada besaran persentase manfaat yang diterima desil pertama yang merupakan kelompok rumah tangga berpendapatan terendah dan desil kesepuluh yang merupakan kelompok rumah tangga yang memiliki pendapatan tertinggi sebesar 9,09 % maka hal ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat netral atau keberpihakan manfaat anggaran terhadap rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya adalah sama. (lampiran 17)

Hal ini terjadi karena di Kabupaten Bulukumba jumlah rumah tangga kaya relatif lebih banyak dari jumlah rumah tangga yang berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini menyebabkan jumlah murid SD dari kalangan rumah tangga kaya banyak menikmati subsidi pendidikan di Sekolah Dasar. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama, manfaat anggaran pendidikan bersifat netral karena rumah tangga kaya menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan baik di dalam wilayah Kabupaten Bulukumba maupun di luar Kabupaten Bulukumba. Hal ini menyebabkan kesempatan dan peluang yang dimiliki oleh murid dari rumah tangga miskin untuk menikmati manfaat belanja di sektor pendidikan lebih banyak jika dibandingkan dengan Sekolah Dasar. Distribusi pendapatan masyarakat juga agak merata untuk seluruh rumah tangga. Hal ini terjadi karena mayoritas rumah tangga tersebut bekerja di sektor pertanian. Selain ini daerah ini juga memiliki kawasan/destinasi wisata yang mengagumkan yakni Pantai Bira yang merupakan satu – satunya pantai berpasir putih yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan terbukanya lapangan kerja dan usaha baru bagi masyarakat selain bekerja di sektor pertanian.

4.2.3.2.2.7. Kabupaten Pangkep

Distribusi manfaat belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar menghasilkan kesimpulan bahwa desil pertama sampai dengan desil kesepuluh memperoleh manfaat yang sama sebesar 10 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 245 rumah tangga (350 murid), terdapat 43 rumah tangga (69 murid)

yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 17,6 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Pangkep. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil kelima. Persentase yang sama antara desil pertama dan desil kesepuluh sebesar 10 % berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat netral artinya keberpihakan anggaran pendidikan terhadap rumah tangga dengan pendapatan rendah dan rumah tangga yang memiliki pendapatan tinggi adalah sama.

Sedangkan manfaat belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pangkep menghasilkan kesimpulan bahwa desil pertama dan ketiga memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 8,99 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil kedua, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan dan kesepuluh sebesar 10,11 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil keempat yakni sebesar 11,24%. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 80 rumah tangga (89 murid), terdapat 16 rumah tangga (19 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 20 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pangkep. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama, desil kedua, desil ketiga, desil keempat, desil kelima, desil keenam dan desil ketujuh. Jika melihat pada manfaat yang diterima desil pertama yang hanya sebesar 8,99 % sedangkan desil kesepuluh memperoleh manfaat sebesar 10,11 % maka hal ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat regresif artinya berpihak kepada rumah tangga kaya. (lampiran 18).

Belanja pendidikan di SD bersifat netral karena adanya subsidi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap level pendidikan dasar tersebut. Namun, kondisi lain terjadi di SMP dimana kebijakan anggaran bersifat regresif yang berpihak terhadap kalangan rumah tangga kaya karena jumlah rumah tangga miskin di daerah ini relatif agak kurang. Selain itu, animo masyarakat Kabupaten Pangkep terutama kalangan rumah tangga yang berpenghasilan rendah untuk memasukkan anaknya ke sekolah agama seperti pesantren membuat belanja pendidikan di SMP lebih banyak dinikmati oleh kalangan rumah tangga kaya.

Pendapatan rumah tangga di daerah ini cenderung merata karena adanya industri Semen Tonasa yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat aktif sebagai pekerja. Selain itu, daerah ini juga dikenal sebagai kawasan pembibitan tanaman unggulan mulai dari padi, jagung dan lain – lain. Selain itu, sumber daya manusia di daerah ini relatif tinggi karena adanya Politeknik Pertanian. Selain industri semen, daerah ini juga menghasilkan marmer yang berkualitas.

4.2.3.2.3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Untuk memudahkan pembahasan, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ini akan dibagi berdasarkan lokasi yakni Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Selatan – Tengah dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Utara.

4.2.3.2.3.1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Selatan – Tengah

Adapun hasil perhitungan distribusi manfaat belanja pemerintah 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Selatan – Tengah adalah sebagai berikut :

4.2.3.2.3.1.1. Kabupaten Kepulauan Selayar

Setelah melakukan perhitungan, maka didapatkan hasil distribusi manfaat belanja pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar yakni desil pertama, ketiga, keempat, kelima, kedelapan, dan kesembilan memperoleh manfaat yang sama yakni sebesar 10,07 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Namun manfaat terkecil diperoleh oleh desil kedua, keenam, dan kesepuluh dengan nilai 9,71 %. Sedangkan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil ketujuh yakni sebesar 10,43 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 195 rumah tangga (278 murid), terdapat 26 rumah tangga (45 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 13,3 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Selayar. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil kedelapan. Jika dilihat pada besaran distribusi manfaat di desil pertama yang merupakan

kelompok rumah tangga yang memiliki pendapatan terendah memperoleh manfaat sebesar 10,07 % sedangkan desil kesepuluh memperoleh manfaat sebesar 9,71 %. Hal ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat progresif atau berpihak kepada masyarakat miskin.

Sedangkan distribusi manfaat belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama, desil ketiga, dan kelima memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 8,22 %. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil pertama, ketujuh, kedelapan dan kesepuluh sebesar 9,59 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil keempat, keenam dan kesembilan yakni sebesar 10,96 %. Manfaat paling tinggi diperoleh oleh desil kedua sebesar 12,33 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 63 rumah tangga (73 murid), terdapat 7 rumah tangga (7 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 11,1 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kepulauan Selayar. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama, desil kedua, desil ketiga dan desil keenam. Jika dilihat pada besaran persentase manfaat yang diterima oleh desil pertama dan kesepuluh dimana memperoleh nilai manfaat yang sama sebesar 9,59 % maka ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat netral atau keberpihakan kepada rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin adalah sama. (lampiran 19).

Hal ini berarti bahwa kondisi geografis Kepulauan Selayar yang terdiri dari banyak pulau tidak menyurutkan langkah murid SD dan SMP baik dari kalangan rumah tangga miskin maupun rumah tangga kaya untuk tetap menikmati pendidikan. Hal ini juga berarti bahwa moda transportasi laut sangat lancar di daerah ini sehingga akses mereka untuk mendapatkan pendidikan juga merata. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sudah menjangkau daerah pulau yang terpencil ikut memberi andil. Hal yang paling penting adalah bahwa subsidi pendidikan yang diberikan terutama dana BOS yang dialokasikan untuk transportasi murid SD dan SMP mendapat perhatian utama dari pemerintah. Daerah ini sangat surplus dengan adanya Pelabuhan Laut Pamattata dan Bandara Aroepala serta lokasi wisata terutama Taka Bonerate yang terkenal dengan

pemandangan bawah lautnya tercantik di Asia Tenggara setelah Bunaken dan Wakatobi. Hal ini menjadi pilar utama perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar selain kopra dan perikanan tangkap.

4.2.3.2.3.1.2. Kabupaten Bantaeng

Distribusi manfaat belanja pemerintah di sektor pendidikan untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng menghasilkan hasil perhitungan bahwa desil pertama, kedua, keempat, kelima, ketujuh, kedelapan, kesembilan dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,92 %. Sedangkan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil ketiga dan keenam yakni sebesar 10,31 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 191 rumah tangga (262 murid), terdapat 20 rumah tangga (36 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 12,4 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil ketujuh. Desil pertama yang merupakan kelompok rumah tangga yang berpendapatan terendah memiliki persentase manfaat yang sama dengan desil kesepuluh yang memiliki pendapatan tertinggi yakni sebesar 9,92 % yang berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat netral atau berpihak kepada rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya dengan proporsi yang sama.

Sedangkan distribusi manfaat untuk Sekolah Menengah Pertama adalah bahwa desil kelima memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 8,64 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil pertama, kedua, ketiga, ketujuh, kedelapan, kesembilan dan kesepuluh sebesar 9,88 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil keempat dan keenam yakni sebesar 11,11%. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 76 rumah tangga (81 murid), terdapat 3 rumah tangga (3 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 3,9 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantaeng. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama, desil ketiga, dan desil keenam. Jika dilihat besaran persentase

desil pertama dan desil kesepuluh yang masing – masing memperoleh manfaat sebesar 9,88 % maka hal ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut juga bersifat netral atau berpihak kepada rumah tangga kaya dan miskin dengan jumlah dan proporsi manfaat yang sama. (lampiran 20).

Olehnya itu dapat disimpulkan bahwa manfaat belanja pemerintah di sektor pendidikan untuk SD dan SMP di Kabupaten Bantaeng bersifat netral, hal ini terjadi karena kedua level pendidikan tersebut di subsidi oleh pemerintah. Selain itu, tingkat pendapatan rumah tangga relatif merata untuk semua masyarakat. Hal ini disebabkan oleh mayoritas penduduk di daerah tersebut bekerja disektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu, jumlah rumah tangga miskin relatif sedikit. Sektor perdagangan juga memberikan andil yang tidak sedikit dalam kemajuan daerah ini.

4.2.3.2.3.1.3. Kabupaten Sinjai

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi manfaat, dapat di jelaskan bahwa desil kedua, kelima dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,73 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil pertama, keempat, keenam, ketujuh, dan kesembilan sebesar 10,03 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil ketiga dan kedelapan yakni sebesar 10,33 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 236 rumah tangga (329 murid), terdapat 29 rumah tangga (47 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 12,3 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Sinjai. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil ketujuh. Sedangkan jika melihat pada besaran manfaat yang diterima oleh desil pertama sebagai kelompok rumah tangga yang berpendapatan terendah memperoleh manfaat sebesar 10,03 % dan desil kesepuluh yang merupakan kelompok rumah tangga dengan pendapatan tertinggi memperoleh manfaat sebesar 9,73 %. Hal ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat progresif atau berpihak kepada rumah tangga miskin.

Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama didapatkan hasil bahwa desil pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan dan kesepuluh memperoleh manfaat yang sama sebesar 10 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 105 rumah tangga (110 murid), terdapat 7 rumah tangga (8 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 6,6 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sinjai. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama, desil kedua, desil ketiga, desil keempat dan desil ketujuh. Jika melihat besaran persentase manfaat yang diterima oleh desil pertama dan kesepuluh dengan jumlah dan proporsi yang sama yakni sebesar 10 %, hal ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat netral artinya keberpihakan kepada rumah tangga miskin dan kaya adalah sama. (lampiran 21).

Manfaat anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar bersifat progresif karena besaran rumah tangga yang berada dibawah garis kemiskinan mencapai 12 %. Hal ini berarti kebijakan anggaran di Kabupaten Sinjai sudah mengakomodir kepentingan rumah tangga miskin. Selain itu, karena adanya subsidi maka memberikan peluang kepada rumah tangga termiskin untuk tetap memiliki akses terhadap pendidikan. Sementara untuk Sekolah Menengah Pertama, manfaat tersebut bersifat netral yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua murid SMP tanpa melihat latar belakang pendapatan rumah tangganya. Hal ini juga mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sinjai pendapatan rumah tangga relatif merata karena mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan kelautan. Sektor jasa dan perdagangan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat.

4.2.3.2.3.1.4. Kabupaten Soppeng

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa desil pertama dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,60 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kedua,

ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan yakni sebesar 10,10 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 155 rumah tangga (198 murid), terdapat 14 rumah tangga (22 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 9 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Soppeng. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil keenam. Jika melihat besaran manfaat yang diterima oleh desil pertama yang merupakan kelompok rumah tangga yang berpendapatan terendah dan desil kesepuluh yang merupakan kelompok rumah tangga yang berpendapatan tertinggi yakni sebesar 9,60 % yang berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat netral atau berpihak kepada rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya dengan persentase dan proporsi yang sama.

Sementara distribusi manfaat untuk Sekolah Menengah Pertama dapat disimpulkan bahwa desil kedelapan memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 8,89 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kesembilan dan kesepuluh sebesar 10,00 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil ketujuh yakni sebesar 11,11%. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 82 rumah tangga (90 murid), terdapat 5 rumah tangga (5 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 6,1 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Soppeng. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama dan desil kedua. Jika melihat besaran desil pertama dan desil kesepuluh yang memiliki proporsi yang sama sebesar 10 % maka dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat netral artinya berpihak kepada rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin dengan proporsi yang sama. (lampiran 22)

Manfaat yang diterima belanja pendidikan untuk SD dan SMP bersifat netral karena adanya subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada kedua level pendidikan tersebut sehingga berapapun pendapatan rumah tangga tetap memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif merata di daerah ini disebabkan karena mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian. Salah satu lumbung pangan Sulawesi Selatan adalah di daerah ini.

4.2.3.2.3.1.5. Kabupaten Wajo

Jika berdasarkan pada hasil perhitungan distribusi manfaat untuk Kabupaten Wajo, dapat disimpulkan bahwa desil kesembilan memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,52 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil pertama, kedua, keempat, kelima dan ketujuh sebesar 9,89 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil ketiga, keenam, kedelapan dan kesepuluh yakni sebesar 10,26 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 199 rumah tangga (273 murid), terdapat 20 rumah tangga (29 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 10,1 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Wajo. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil kelima. Desil pertama yang merupakan kelompok rumah tangga dengan pendapatan terendah memperoleh manfaat sebesar 9,89 % sedangkan desil kesepuluh yang merupakan kelompok rumah tangga dengan pendapatan tertinggi memperoleh manfaat terbesar sebesar 10,26 %. hal ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat regresif atau berpihak kepada rumah tangga kaya.

Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama, kelompok desil pertama, kedelapan dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 8,82 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh sebesar 10,29 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kesembilan yakni sebesar 11,76 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 66 rumah tangga (68 murid), terdapat 5 rumah tangga (6 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 7,5 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Wajo. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil

pertama, desil kedua dan desil ketiga. Desil pertama dan kesepuluh memperoleh manfaat yang sama sebesar 8,82 % yang berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat netral artinya manfaat yang dirasakan oleh rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin adalah sama. (lampiran 23).

Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat yang diterima oleh kelompok rumah tangga kaya dari belanja pendidikan di level pendidikan Sekolah Dasar sangat besar. Sedangkan untuk manfaat belanja pendidikan untuk SMP bersifat netral karena adanya bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada tingkat pendidikan SD dan SMP sehingga memperbesar peluang dan kesempatan rumah tangga untuk memiliki akses terhadap pendidikan. Selain itu, persentase rumah tangga kaya yang lebih banyak di daerah ini. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi terjadi karena dukungan sumber daya alam yang subur dan merupakan salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan.

4.2.3.2.3.1.6. Kabupaten Sidrap

Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat disimpulkan bahwa desil pertama, kelima dan kesembilan memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,67 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil kedua, ketiga, keenam ketujuh dan kesepuluh sebesar 10,04 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil keempat dan kedelapan yakni sebesar 10,41 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 199 rumah tangga (269 murid), terdapat 13 rumah tangga (18 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 6,5 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Sidrap. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil keenam. Jika melihat besaran persentase desil pertama sebesar 9,67 % dan desil kesepuluh yang sebesar 10,04 % maka dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat regresif atau berpihak kepada rumah tangga kaya.

Namun untuk Sekolah Menengah Pertama didapatkan hasil bahwa desil pertama, keenam dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,20 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, kedelapan dan kesembilan yakni sebesar 10,34 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 83 rumah tangga (87 murid), terdapat 9 rumah tangga (9 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 10,8 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sidrap. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama, desil kedua, desil ketiga, desil keempat, desil kelima dan desil keenam. Jika melihat besaran persentase desil pertama dan desil kesepuluh yang sama yakni sebesar 9,20 % yang berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat netral artinya berpihak kepada rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya dengan persentase yang sama. (lampiran 24)

Sama dengan Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap juga merupakan lumbung pangan di Sulawesi Selatan sehingga tingkat pendapatan masyarakat relatif merata. Hal ini berimplikasi terhadap akses rumah tangga kaya terhadap pendidikan semakin besar sehingga kebijakan anggaran untuk SD lebih memihak kepada rumah tangga kaya. Namun, untuk Sekolah Menengah Pertama, lebih bersifat netral yang disebabkan oleh kemampuan rumah tangga kaya untuk menyekolahkan anaknya disekolah yang tidak disubsidi oleh pemerintah sehingga memberikan peluang dan kesempatan kepada rumah tangga miskin untuk sama – sama menikmati pendidikan.

4.2.3.2.3.2.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Utara

Adapun hasil perhitungan distribusi manfaat belanja pemerintah 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Utara adalah sebagai berikut :

4.2.3.2.3.2.1. Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa desil pertama, keempat dan kedelapan memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,77 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kesembilan dan kesepuluh yakni sebesar 10,10%. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 223 rumah tangga (307 murid), terdapat 12 rumah tangga (20 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 5,4 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Pinrang. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil keempat. Jika dilihat pada besaran persentase manfaat yang diterima oleh desil pertama yang merupakan kelompok rumah tangga yang memiliki pendapatan yang terendah sebesar 9,77 % dan desil kesepuluh yang merupakan kelompok rumah tangga yang memiliki pendapatan tertinggi memperoleh manfaat sebesar 10,10 % maka hal ini bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat regresif atau berpihak kepada rumah tangga kaya.

Sedangkan manfaat belanja untuk Sekolah Menengah Pertama di dapatkan hasil bahwa desil pertama dan kesembilan memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,26 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan kesepuluh yakni sebesar 10,19 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 105 rumah tangga (108 murid), terdapat 5 rumah tangga (5 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 4,7 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pinrang. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama, desil kedua, desil ketiga, dan desil ketujuh. Jika melihat besaran persentase manfaat yang diterima desil pertama yang merupakan kelompok rumah tangga yang berpendapatan rendah sebesar 9,26 % dan desil kesepuluh yang merupakan kelompok rumah tangga yang berpendapatan tinggi memperoleh manfaat sebesar 10,19 % hal ini berarti bahwa

anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat regresif artinya berpihak kepada rumah tangga kaya. (lampiran 25)

Kebijakan anggaran dan distribusi manfaat yang diterima oleh kelompok rumah tangga kaya yang lebih dominan daripada rumah tangga miskin ini disebabkan oleh karena jumlah rumah tangga termiskin di Kabupaten Pinrang sangat kecil jika dibandingkan dengan rumah tangga yang memiliki pendapatan yang tinggi. Hal ini terjadi karena Kabupaten Pinrang adalah kabupaten yang sangat maju baik dari sisi pembangunan pertanian maupun perdagangan dan jasa – jasa. Selain itu, Kabupaten Pinrang juga merupakan jalur perlintasan utama menuju ke Provinsi Sulawesi Barat setelah Kota Pare – Pare. Hal ini memberikan implikasi yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pinrang.

4.2.3.2.3.2.2. Kabupaten Enrekang

Untuk distribusi manfaat belanja pendidikan di Kabupaten Enrekang didapatkan hasil bahwa desil ketiga, keenam dan kedelapan memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,71 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil pertama, kedua, kelima, dan kesembilan sebesar 10,00 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil keempat, ketujuh dan kesepuluh yakni sebesar 10,29 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 211 rumah tangga (350 murid), terdapat 35 rumah tangga (70 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 16,6 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Enrekang. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil ketujuh. Selain itu, jika melihat pada besaran persentase manfaat yang diterima oleh desil pertama yang sebesar 10,00 % dan desil kesepuluh yang sebesar 10,29 % maka hal ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat regresif atau berpihak kepada rumah tangga kaya.

Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama dapat dijelaskan bahwa desil pertama, ketiga, ketujuh dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling

rendah sebesar 9,38 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kedua, keempat, kelima, keenam, kedelapan dan kesembilan yakni sebesar 10,42 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 89 rumah tangga (96 murid), terdapat 9 rumah tangga (11 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 10,1 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Enrekang. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama, desil kedua, desil ketiga, desil keempat dan desil kelima. Jika melihat besaran persentase manfaat yang diterima oleh desil pertama sebagai kelompok rumah tangga yang berpendapatan terendah dan desil kesepuluh yang memperoleh manfaat yang sama sebesar 9,38 % berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat netral artinya persentase keberpihakan kepada rumah tangga miskin dan kaya adalah sama. (lampiran 26).

Manfaat regresif yang diterima dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar mengindikasikan bahwa jumlah rumah tangga kaya relatif lebih besar daripada jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Enrekang. Sedangkan untuk belanja pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang bersifat netral mengindikasikan bahwa rumah tangga kaya banyak menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta yang memiliki mutu pendidikan yang lebih baik atau bisa jadi kemampuan rumah tangga miskin untuk mengakses pendidikan di level SMP semakin besar dengan adanya jaminan dari pemerintah berupa subsidi atau dana BOS. Selain itu, tingkat pendapatan rumah tangga di daerah ini relatif merata karena mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan dengan hasil utama padi, kopi dan cengkeh.

4.2.3.2.3.2.3. Kabupaten Luwu

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi manfaat belanja pendidikan Sekolah Dasar didapatkan bahwa desil kedua memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,60 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil ketiga, keempat, keenam, ketujuh

dan kesembilan sebesar 9,87 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kedelapan dan kesepuluh yakni sebesar 10,13 %. Manfaat paling tinggi dirasakan oleh desil pertama dan kelima sebesar 10,40 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 246 rumah tangga (375 murid), terdapat 45 rumah tangga (80 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 18,3 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Luwu. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil kedelapan. Jika melihat pada besaran persentase manfaat yang diterima desil pertama yang merupakan kelompok rumah tangga yang berpendapatan terendah sebesar 10,40 % dan desil kesepuluh yang merupakan kelompok rumah tangga yang berpendapatan tertinggi memperoleh manfaat sebesar 10,13 % yang berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat progresif atau berpihak kepada rumah tangga miskin.

Hal lain terjadi pada level Sekolah Menengah Pertama dimana desil pertama, keempat, ketujuh dan kesembilan memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,43 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kedua, ketiga, kelima, keenam, kedelapan dan kesepuluh yakni sebesar 10,38 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 96 rumah tangga (106 murid), terdapat 12 rumah tangga (16 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 12,5 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Luwu. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama, desil kedua, desil keempat, desil kelima dan desil keenam. Jika melihat besaran persentase manfaat yang diterima oleh desil pertama sebagai kelompok masyarakat berpendapatan terendah sebesar 9,43 % dan desil kesepuluh yang merupakan kelompok rumah tangga yang berpendapatan tertinggi memperoleh manfaat sebesar 10,38 % maka hal ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat regresif artinya berpihak rumah tangga kaya. (lampiran 27).

Manfaat yang diterima dari belanja pendidikan untuk SD bersifat progresif karena jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Luwu sangat tinggi mencapai

angka 18 % sehingga jumlah anak yang menikmati layanan pendidikan tersebut juga tinggi. Namun, untuk SMP hal ini berbanding terbalik karena jumlah rumah tangga kaya relatif lebih banyak daripada rumah tangga miskin. Hal ini terjadi karena distribusi pendapatan yang kurang merata akibat dari penguasaan lahan perkebunan oleh kelompok rumah tangga kaya di daerah tersebut. Kelompok rumah tangga miskin hanya menjadi pekerja atau penggarap lahan saja sehingga pendapatan mereka agak terbatas. Daerah ini merupakan penghasil utama kakao, cengkeh dan sagu serta padi.

4.2.3.2.3.2.4. Kabupaten Tana Toraja

Setelah dilakukan perhitungan terhadap distribusi manfaat belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar, didapatkan kesimpulan bahwa desil pertama dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,60 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil keempat, keenam dan ketujuh sebesar 9,91 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kedua, ketiga, kelima, kedelapan dan kesembilan yakni sebesar 10,22 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 224 rumah tangga (323 murid), terdapat 31 rumah tangga (53 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 13,8 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Tana Toraja. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil kedelapan. Jika melihat besaran persentase desil pertama dan kesepuluh yang memiliki persentase yang sama sebesar 9,60 % maka hal ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat netral atau berpihak kepada rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya dengan proporsi yang sama.

Hal yang sama terjadi di Sekolah Menengah Pertama dimana desil ketujuh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,01 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, kesembilan dan kesepuluh sebesar 9,91 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil keenam dan kedelapan yakni sebesar 10,81 %. Jika berdasarkan pada pendapatan

perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 103 rumah tangga (111 murid), terdapat 7 rumah tangga (8 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 6,8 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tana Toraja. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama, desil ketiga, dan desil kedelapan. Jika melihat besaran persentase manfaat yang diterima oleh desil pertama dan kesepuluh yang masing – masing memperoleh manfaat sebesar 9,91 % maka ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat netral atau berpihak kepada rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya dengan proporsi yang sama. (lampiran 28)

Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Tana Toraja relatif kecil karena kemajuan daerah tersebut yang merupakan kawasan pariwisata budaya andalan di Sulawesi Selatan selain hasil alam lain berupa hasil pertanian dan perkebunan. Hasil perkebunan yang paling terkenal adalah Kopi Toraja yang sangat enak dan memiliki ciri khas tersendiri. Sumber – sumber pendapatan tersebut memberikan implikasi yang positif terhadap tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tana Toraja.

4.2.3.2.3.2.5. Kabupaten Luwu Utara

Manfaat yang diterima oleh kelompok rumah tangga yang memiliki anak usia Sekolah Dasar adalah bahwa desil keempat memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,61 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil pertama, kedelapan dan kesepuluh sebesar 9,87 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh dan kesembilan yakni sebesar 10,13 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 275 rumah tangga (385 murid), terdapat 41 rumah tangga (62 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 14,9 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Luwu Utara. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil keenam. Jika melihat besaran persentase manfaat yang diterima oleh desil pertama dan

kesepuluh dengan proporsi yang sama sebesar 9,87 % maka hal ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat netral atau berpihak kepada rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya dengan proporsi yang sama.

Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama didapatkan hasil bahwa desil kedelapan memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 8,70 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam dan kesepuluh sebesar 9,78 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil keempat, ketujuh dan kesembilan yakni sebesar 10,87 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 82 rumah tangga (92 murid), terdapat 13 rumah tangga (19 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 15,8 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Luwu Utara. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama, desil kedua, desil ketiga, desil keempat, desil kelima dan desil kesembilan. Jika melihat besaran persentase manfaat yang diterima oleh desil pertama dan kesepuluh dengan proporsi yang sama sebesar 9,78 % maka hal ini berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat netral atau berpihak kepada rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya dengan proporsi yang sama. (lampiran 29)

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat yang diterima oleh rumah tangga baik miskin maupun kaya yang bersifat netral disebabkan karena subsidi pendidikan yang diberikan oleh pemerintah sehingga memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada murid dari rumah tangga miskin dan murid dari rumah tangga kaya untuk memperoleh akses terhadap pendidikan. Selain itu, pendapatan masyarakat yang meningkat karena dukungan sumber daya alam yang diberkahi dengan lahan perkebunan yang luas memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai pekerja di perkebunan. Daerah ini merupakan daerah surplus perkebunan dengan hasil utama kopi, cengkeh dan kakao yang memiliki harga yang sangat kompetitif di pasaran dunia karena berkualitas ekspor. Selain itu, daerah ini juga merupakan perlintasan menuju ke Provinsi Sulawesi Tengah.

4.2.3.2.3.2.6. Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan hasil dimana desil kedua, keempat, ketujuh dan kesembilan memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,78 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil pertama, ketiga, kelima, keenam dan kesepuluh sebesar 10,09 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil kedelapan yakni sebesar 10,41 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 231 rumah tangga (317 murid), terdapat 22 rumah tangga (37 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 9,5 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Luwu Timur. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil keenam. Jika dilihat pada besaran persentase manfaat yang diterima oleh desil pertama sebagai kelompok rumah tangga yang memiliki pendapatan terendah dan desil kesepuluh yang merupakan kelompok rumah tangga dengan pendapatan tertinggi masing – masing sebesar 10,09 % maka dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar tersebut bersifat netral atau berpihak kepada rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya dengan proporsi yang sama.

Hal lain terjadi pada level Sekolah Menengah Pertama dimana desil pertama, kedua, keempat, ketujuh dan kesembilan memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,48 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil kelima, keenam, kedelapan dan kesepuluh sebesar 10,34 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil ketiga yakni sebesar 11,21 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 101 rumah tangga (116 murid), terdapat 10 rumah tangga (11 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 9,9 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Luwu Timur. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama, desil kedua, desil kelima dan desil keenam. Manfaat yang diterima oleh desil pertama sebagai kelompok rumah tangga yang

memiliki pendapatan terendah memperoleh manfaat sebesar 9,48 % sedangkan desil kesepuluh yang merupakan kelompok rumah tangga yang memiliki pendapatan tertinggi memperoleh manfaat sebesar 10,34 % yang berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat regresif artinya berpihak kepada rumah tangga kaya. (lampiran 30)

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk belanja pendidikan di level SD masih bersifat netral karena adanya subsidi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan untuk level SMP, lebih bersifat regresif karena jumlah rumah tangga yang berpendapatan tinggi lebih banyak daripada rumah tangga yang berpendapatan rendah. Hal ini disebabkan karena adanya industri pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk di daerah ini sehingga tingkat pendapatan masyarakat meningkat karena keberadaan industri tambang tersebut. Selain itu, daerah ini juga merupakan daerah perlintasan menuju ke Sulawesi Tenggara sehingga tingkat perekonomian masyarakat cenderung dinamis.

4.2.3.2.3.2.7. Kabupaten Toraja Utara

Manfaat yang diterima oleh rumah tangga dari anggaran pendidikan untuk Sekolah Dasar dapat dijelaskan bahwa desil pertama, kedua, kelima, ketujuh, kedelapan dan kesepuluh memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,85 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil ketiga, keempat dan kesembilan sebesar 10,15 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil keenam yakni sebesar 10,46 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 179 rumah tangga (325 murid), terdapat 35 rumah tangga (85 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 19,6 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Toraja Utara. Rumah tangga miskin tersebut tersebar di desil pertama sampai dengan desil keenam. Besaran persentase manfaat yang diterima oleh desil pertama dan kesepuluh yang memperoleh manfaat sebesar 9,85 % berarti bahwa anggaran pendidikan untuk

Sekolah Dasar tersebut bersifat netral atau berpihak kepada rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya dengan proporsi yang sama.

Sementara untuk belanja pendidikan di level Sekolah Menengah Pertama didapatkan hasil bahwa desil pertama, dan kedelapan memperoleh manfaat yang paling rendah sebesar 9,24 % dari belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat rata – rata (sedang) diperoleh oleh desil kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kesembilan dan kesepuluh sebesar 10,08 % dan manfaat tertinggi diperoleh oleh desil ketujuh yakni sebesar 11,92 %. Jika berdasarkan pada pendapatan perkapita rumah tangga, maka dapat dijelaskan bahwa dari 108 rumah tangga (119 murid), terdapat 20 rumah tangga (23 murid) yang berada dibawah garis kemiskinan atau sebesar 18,5 persen yang menikmati layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Toraja Utara. Rumah tangga miskin tersebut berada di desil pertama, desil kedua, desil ketiga, desil keempat dan desil kelima. Desil pertama sebagai kelompok rumah tangga yang berpendapatan terendah memperoleh manfaat sebesar 9,24 % sedangkan desil kesepuluh memperoleh manfaat sebesar 10,68 % yang berarti bahwa anggaran pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama tersebut bersifat regresif artinya berpihak kepada rumah tangga kaya. (lampiran 31).

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk Sekolah Dasar (SD) dari 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan maka dapat disimpulkan bahwa manfaat belanja pendidikan untuk Sekolah Dasar yang bersifat progresif terjadi di 3 kabupaten yakni Kabupaten Kepulauan Selayar, Sinjai dan Luwu. Sedangkan manfaat belanja pendidikan Sekolah Dasar yang bersifat netral terjadi di 12 kabupaten dan 2 kota yakni Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jenepono, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar dan Kota Palopo. Selain itu, manfaat belanja pendidikan Sekolah Dasar yang bersifat regresif terjadi di 6 kabupaten dan satu kota yakni Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang dan Kota Pare - Pare.

Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan maka dapat disimpulkan bahwa manfaat belanja pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama yang bersifat progresif terjadi di satu kabupaten dan satu kota yakni di Kabupaten Bone dan Kota Makassar. Sedangkan manfaat belanja pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang bersifat netral terjadi di 14 kabupaten dan 1 Kota yakni Kabupaten Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Barru, Soppeng, Wajo, Sidrap, Enrekang, Tana Toraja, Luwu Utara dan Kota Pare - Pare. Selain itu, manfaat belanja pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang bersifat regresif terjadi di 6 kabupaten dan 1 kota yakni Kabupaten Maros, Pangkep, Pinrang, Luwu, Luwu Timur, Toraja Utara dan Kota Palopo.

Selain itu jika di gabungkan antara manfaat belanja Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di 24 kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun kabupaten yang memiliki manfaat yang bersifat progresif untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan manfaat yang bersifat netral untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama terjadi di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Barru, Soppeng, Tana Toraja dan Luwu Utara. Untuk manfaat yang bersifat regresif untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama terjadi di Kabupaten Pinrang.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. KESIMPULAN

Dari pembahasan terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dari distribusi pendapatan rumah tangga yang tersebar di 24 kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga usia sekolah dasar (7 – 12 tahun) tertinggi dengan persentase sebesar 30 persen terjadi di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar dan Kota Palopo. Sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Selayar, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Tana Toraja dengan persentase sebesar 20 persen.
2. Sedangkan ketimpangan pendapatan untuk rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama (13 – 15 tahun), ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi di Kabupaten Gowa dengan 40 persen dan ketimpangan pendapatan terendah di Kabupaten Tana Toraja dengan persentase 18 persen.
3. Manfaat belanja pemerintah di sektor pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) dari 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan maka dapat disimpulkan bahwa yang bersifat progresif terjadi di 3 kabupaten yakni Kabupaten Kepulauan Selayar, Sinjai dan Luwu. Sedangkan manfaat belanja pendidikan sekolah dasar yang bersifat netral terjadi di 12 kabupaten dan 2 kota yakni Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar dan Kota Palopo. Selain itu, manfaat belanja pendidikan sekolah dasar yang bersifat regresif terjadi di 6 kabupaten dan satu kota yakni Kabupaten Bulukumba,

Kabupaten Gowa, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang dan Kota Pare - Pare.

4. Manfaat belanja pendidikan untuk sekolah menengah pertama yang bersifat progresif terjadi di 3 kabupaten dan 1 kota yakni Kabupaten Pangkep, Sidrap, Luwu Utara dan Kota Palopo. Sedangkan manfaat belanja pendidikan sekolah menengah pertama yang bersifat netral terjadi di 7 kabupaten yakni Kabupaten Jeneponto, Sinjai, Maros, Bone, Enrekang, Luwu, dan Toraja Utara. Selain itu, manfaat belanja pendidikan sekolah menengah pertama yang bersifat regresif terjadi di 11 kabupaten dan 2 kota yakni Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Takalar, Gowa, Barru, Soppeng, Wajo, Pinrang, Tana Toraja, Luwu Timur, Kota Makassar dan Pare – Pare.
5. Selain itu jika di gabungkan antara manfaat belanja sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di 24 kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun kabupaten yang memiliki manfaat yang bersifat progresif untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sedangkan manfaat yang bersifat netral untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terjadi di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Barru, Soppeng, Tana Toraja dan Luwu Utara. Untuk manfaat yang bersifat regresif untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terjadi di Kabupaten Pinrang.

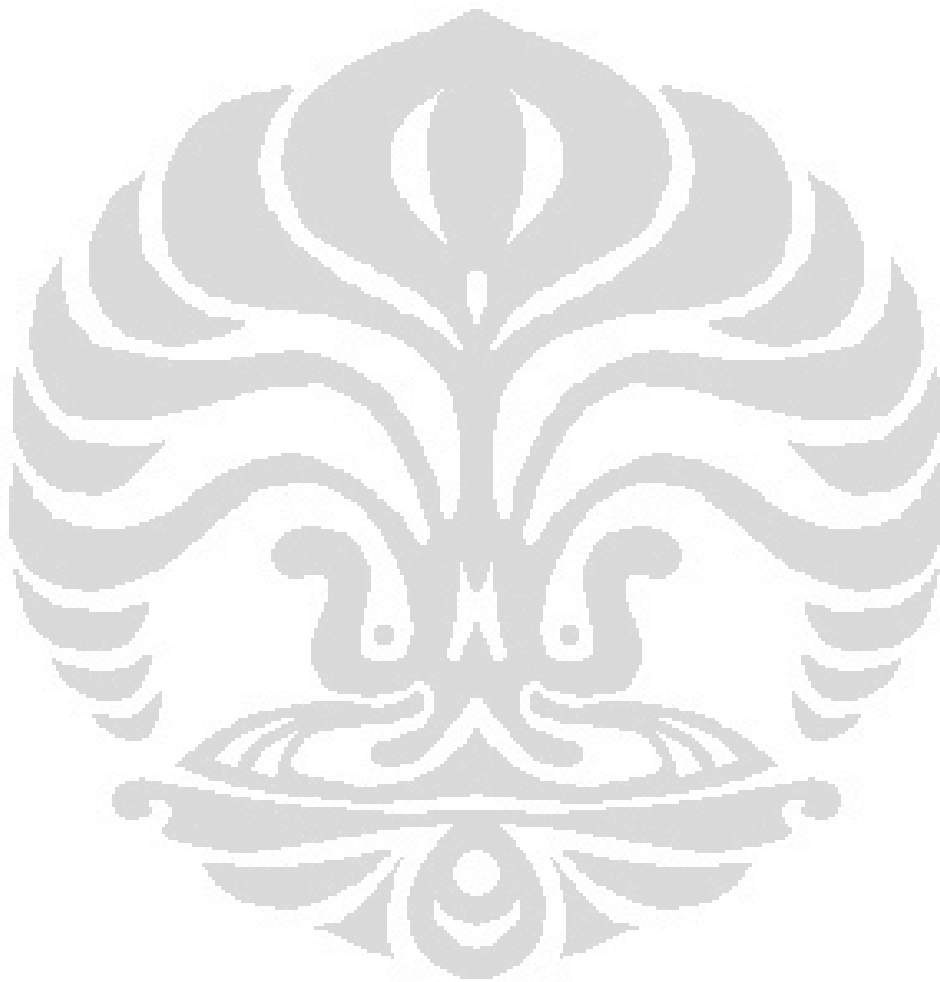
5.2. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dari kesimpulan yang ditarik diatas, maka dapat dibuat rekomendasi kebijakan sebagai berikut :

1. Tingkat ketimpangan pendapatan untuk rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 – 12 tahun) dapat dikurangi dengan memperluas akses rumah tangga miskin terhadap sektor permodalan usaha mereka. Selain itu, peningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dengan menjadikan rumah tangga miskin sebagai sasaran utama program terutama bantuan langsung kepada rumah tangga miskin.

2. Untuk wilayah Kabupaten Gowa yang ketimpangan pendapatannya tertinggi, maka perlu dilakukan upaya pembangunan dan perekonomian masyarakat dengan memberikan perhatian yang lebih serius terhadap warga Kabupaten Gowa yang ada di daerah timur Kabupaten Gowa. Selain itu, daerah – daerah yang selama ini menjadi lumbung kemiskinan di daerah tersebut harus memperoleh perhatian terutama akses mereka untuk mendapatkan permodalan sehingga usaha mereka dapat meningkat.
3. Untuk manfaat belanja pendidikan SD yang bersifat progresif harus tetap dipertahankan sehingga akses rumah tangga termiskin terhadap pendidikan tetap terbuka. Sedangkan yang bersifat netral, daerah yang bersangkutan harus membuat kebijakan anggaran yang berpihak kepada rumah tangga miskin terutama bantuan langsung terhadap murid miskin dan alokasi dana BOS yang mengutamakan murid miskin sebagai sasaran utama program kegiatan. Bahkan, untuk manfaat yang bersifat regresif, pemerintah daerah tetap perlu melakukan kebijakan seperti yang dilakukan pada anggaran pendidikan yang bersifat netral dengan tambahan utamanya adalah membuat kebijakan dan program kegiatan dengan murid miskin sebagai prioritas utama. Dalam hal ini memperbesar jumlah murid dan besaran anggaran yang ditujukan untuk bantuan langsung terhadap murid termiskin.
4. Hal yang sama perlu dilakukan terhadap murid SMP yang berasal dari rumah tangga miskin dengan memberikan bantuan khusus murid miskin dengan proporsi dan jumlah yang lebih besar. Bantuan khusus tersebut dapat berupa uang transpor, baju seragam, dan lain – lain yang sifatnya dibutuhkan oleh murid dari rumah tangga miskin untuk keperluan pendidikannya.
5. Memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada murid dari rumah tangga miskin untuk memperoleh akses yang lebih besar terhadap dunia pendidikan sehingga kedepan alokasi anggaran pendidikan yang direncanakan lebih banyak yang sifatnya progresif daripada netral dan regresif. Hal ini membutuhkan campur tangan dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar, tepat sasaran dan tepat tujuan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat terutama rumah

tangga miskin berupa sosialisasi dan penyuluhan serta informasi yang benar agar rumah tangga termiskin tetap menyekolahkan anaknya karena subsidi pemerintah telah menjamin keberlangsungan pendidikan anak usia sekolah SD dan SMP.



DAFTAR REFERENSI

- Afridian Wirahadi Ahmad, 2008. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Bidang Kesehatan: Studi Empiris Kabupaten/Kota di Sumatera Barat*. Politeknik Negeri Padang.
- Ahmad Nurdin, 2006. *Efektifitas Belanja Daerah Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kasus : Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Jalan di Kota Magelang)*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Aya Aoki dkk, 2001. *Education. Macroeconomic And Sectoral Approach. Volume 2*.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2010. *Statistik Sosial Ekonomi Rumah tangga Sulawesi Selatan Tahun 2010*. Makassar.
- Brodjonegoro, 2011. *Proyeksi Ekonomi Tahun 2011 dan Tantangan Jangka Menengah*. Makalah Pada Seminar Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia. Kerjasama FE UI dan ADB.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Renstra Pendidikan Nasional 2005 – 2009*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Desi Dwi Bastias, 2010. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969 – 2009*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Dominique Van De Walle, 1992. *The Distribution Of Benefits From Social Services In Indonesia 1978 – 1987*. A Journal Of Country Economics Department Of World Bank.
- Dominique van De Walle, 1996. *Assessing The Welfare Impacts of Public Spending*. The World Bank, Policy Research Department, Public Economic Division.
- Florenca CL dkk, 1999. *Public Social Spending In Africa: Do The Poor Benefit? The World Bank Research Observer Vol. 14 No. 1*. The International Bank for Reconstruction And Development/The World Bank.

- Galata Conda Prihastanto, 2011. *Benefit Incidence Analysis Pada Belanja Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2009*. Tesis. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Janet S. Cuenca, 2008. *Benefit Incidence Analysis Of Public Spending On Education In The Philippines; A Methodological Note*. Philippine Institute For Development Studies.
- Kementerian Riset dan Teknologi, 2011. *Menyoal Desentralisasi Anggaran Pendidikan*. Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Jakarta.
- Latifah Hanum Daulay, 2008. *Evaluasi Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Pada Program SMK Kecil di SMP Wilayah Sumatera Utara)*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Lionel Demery, 2000. *Analyzing The Incidence Of Public Spending*.
- Michael P. Todaro & Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Jilid Satu. Sebuah Terjemahan.
- Mutiara Maemunah, 2006. *Plypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. STIE Musi Palembang.
- Nina Toyamah dan Syaikhu Usman, 2004. *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*. Lembaga Penelitian Smeru. Jakarta.
- Noeroso L. Wahyudi, 2004. *Dampak Sosial Ekonomi dan Evaluasi Belanja Daerah dan Proyek Pembangunan. Studi Kasus : Sektor Pendidikan*. Bunga Ranpai Hasil Penelitian.
- Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008 – 2013, 2008.* Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sekretariat Negara RI, 2011, *Anggaran Pendidikan Dalam APBN*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Susiyati B. Hirawan, 2007. *Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (bagi orang miskin) di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar FE Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sulton Mawardi & Sudarno Sumarto, 2003. *Kebijakan Publik Yang Memihak Orang Miskin (Fokus Pro Poor Budgeting)*. Lembaga Penelitian SMERU.
- Syahrudin, 2006. *Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi Yang Konsisten*. Universitas Andalas Padang
- Thomas M. Shelden & Michael J. Wasylengko, 1992. *Benefit Incidence Analysis In Developing Countries*. Policy Research Working Paper Series, The World Bank.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.
- Wasitohadi, 2008. *Implikasi Paradigma Baru Pendidikan Terhadap Model Perencanaan Pendidikan Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Makalah. Simposium Tahunan Penelitian Pendidikan 2008 di Jakarta. Jakarta.
- Wawan Juswanto, 2010. *Distribution of Government Expenditure and Demand For Education Service: The Case Of Indonesia*. Jakarta.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sebaran Jumlah Penduduk Yang Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Di Sulawesi Selatan Tahun 2010

NAMA KABUPATEN/ KOTA	TIDAK/ BELUM PERNAH SEKOLAH	PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN					TOTAL
		TIDAK PUNYA IJAZAH	SD	SMP	SMU/SMK	D1 - S3	
SELAYAR	7,320	29,078	27,380	13,098	11,059	5,776	93,711
BULUKUMBA	33,215	81,453	90,436	49,879	46,023	14,431	315,437
BANTAENG	24,706	42,637	34,831	17,282	14,350	6,901	140,707
JENEPONTO	47,942	72,523	65,923	38,274	29,738	11,600	266,000
TAKALAR	28,339	60,660	49,211	31,129	30,637	7,232	207,208
GOWA	70,093	104,694	115,901	78,058	88,913	31,934	489,593
SINJAI	20,594	45,667	54,935	22,611	23,499	11,040	178,346
MAROS	34,039	62,308	66,755	34,313	37,025	7,287	241,727
PANGKEP	27,709	64,276	78,982	27,476	32,934	10,716	242,093
BARRU	13,088	29,008	42,156	21,224	19,017	7,911	132,404
BONE	75,630	144,972	181,449	70,400	64,369	29,508	566,328
SOPPENG	21,039	41,265	57,926	30,389	28,216	11,326	190,161
WAJO	44,465	70,889	114,574	38,187	32,471	15,227	315,813
SIDRAP	23,715	49,750	58,104	34,345	30,676	7,900	204,490
PINRANG	22,443	64,432	90,234	46,147	43,035	11,663	277,954
ENREKANG	13,977	32,325	36,089	25,297	24,441	9,875	142,004
LUWU	21,651	51,932	75,674	48,220	46,565	8,222	252,264
TANA TORAJA	22,189	45,076	45,991	32,502	28,689	7,177	181,624
LUWU UTARA	18,846	65,014	86,176	40,367	28,144	12,129	250,676
LUWU TIMUR	10,126	43,428	52,512	32,390	33,134	11,548	183,138
TORAJA UTARA	22,189	45,076	45,991	32,502	28,689	7,176	181,624
MAKASSAR	28,659	130,952	187,281	172,807	353,055	143,657	1,016,411
PARE – PARE	3,994	15,125	19,327	19,969	26,612	9,268	94,295
PALOPO	3,152	16,858	25,297	24,081	34,170	12,232	115,790
JUMLAH	639,120	1,409,398	1,703,135	980,947	1,135,461	411,736	6,279,798

Lampiran 2 : Jumlah Murid di masing-masing Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010.

KABUPATEN/KOTA	MURID					
	TK	SD	SMP	SMU	SMK	TOTAL
KEPULAUAN SELAYAR	3869	15271	4682	2024	1131	26977
BULUKUMBA	13386	60961	15702	11396	2338	103783
BANTAENG	1624	25946	6267	2424	2166	38427
JENEPONTO	3163	52446	12840	4840	1705	74994
TAKALAR	4100	35543	11748	6488	2260	60139
GOWA	5483	80357	23425	7729	3678	120672
SINJAI	4772	33086	10473	2813	1686	52830
MAROS	2953	42640	12909	6251	1846	66599
PANGKEP	2071	42402	16528	4952	1851	67804
BARRU	2003	21002	8634	3320	834	35793
BONE	17917	92532	27911	13091	1706	153157
SOPPENG	2673	27524	10007	4800	1802	46806
WAJO	6177	41468	13544	6999	1781	69969
SIDRAP	3567	33846	11713	4860	2266	56252
PINRANG	4458	48833	20352	7970	5271	86884
ENREKANG	5660	30600	9575	5428	1542	52805
LUWU	4027	49098	19106	10476	1099	83806
TANA TORAJA	1940	35379	12429	5124	5069	59941
LUWU UTARA	2529	43397	16208	6688	2662	71484
LUWU TIMUR	5461	32898	11029	8348	900	58636
TORAJA UTARA	2444	35037	13638	1919	4562	57600
MAKASSAR	13934	146536	55312	42812	21016	279610
PARE – PARE	1010	15950	6612	5526	3678	32776
PALOPO	2156	18932	7731	5411	5319	39549
JUMLAH	117377	1061684	358375	181689	78168	1797293

Lampiran 3 : Proporsi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

NAMA KABUPATEN/ KOTA	BELANJA 2010 (Juta Rupiah)			TOTAL PENDAPATAN (Juta Rupiah)
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	TOTAL BELANJA	
KEPULAUAN SELAYAR	38,602	45,222	83,825	371,221
BULUKUMBA	208,080	58,325	266,405	597,732
BANTAENG	76,294	39,551	115,845	371,535
JENEPONTO	140,230	29,800	170,030	443,580
TAKALAR	112,298	44,106	156,404	425,095
GOWA	209,860	74,355	284,216	602,704
SINJAI	126,606	33,775	160,382	453,956
MAROS	102,395	59,734	162,129	564,902
PANGKEP	150,508	43,892	194,401	549,223
BARRU	97,910	56,730	154,640	414,893
BONE	131,907	90,780	222,687	831,200
SOPPENG	69,684	48,757	118,441	475,336
WAJO	96,422	68,393	164,815	573,507
SIDRAP	114,877	67,413	182,290	518,631
PINRANG	127,359	48,701	176,060	543,657
ENREKANG	79,492	39,657	119,150	423,609
LUWU	128,447	48,127	176,575	449,321
TANA TORAJA	25,041	47,994	73,035	429,825
LUWU UTARA	105,160	57,160	162,320	474,289
LUWU TIMUR	79,784	102,971	182,755	461,849
TORAJA UTARA	186,119	1,120,	187,239	359,321
MAKASSAR	401,082	88,028	489,110	1,214,272
PARE – PARE	82,449	27,035	109,485	398,441
PALOPO	86,745	26,574	113,320	354,221
JUMLAH	2,977,361	1,248,210,	4,225,572	12,302,330

Lampiran 4 : Persentase Anggaran Dinas Pendidikan 24 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Total Pendapatan

NAMA KABUPATEN/KOTA	TOTAL PENDAPATAN	PERSENTASE ANGGARAN PENDIDIKAN (%)
KEPULAUAN SELAYAR	371,221,054,000	22
BULUKUMBA	597,732,556,712	44
BANTAENG	371,535,594,238	31
JENEPONTO	443,580,305,888	28
TAKALAR	425,095,979,960	36
GOWA	602,704,046,693	47
SINJAI	453,956,350,344	35
MAROS	564,902,898,500	28
PANGKEP	549,223,991,826	35
BARRU	414,893,266,180	37
BONE	831,200,788,864	26
SOPPENG	475,336,176,427	24
WAJO	573,507,063,590	28
SIDRAP	518,631,357,000	35
PINRANG	543,657,184,602	32
ENREKANG	423,609,039,774	28
LUWU	449,321,163,000	39
TANA TORAJA	429,825,201,303	16
LUWU UTARA	474,289,443,100	34
LUWU TIMUR	461,849,482,490	39
TORAJA UTARA	359,321,886,550	52
MAKASSAR	1,214,272,865,100	40
PARE – PARE	398,441,341,000	27
PALOPO	354,221,846,950	32

Lampiran 5 : Belanja Pendidikan Permud SD dan SMP di 24 Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Sulawesi Selatan

No.	NAMA KABUPATEN/KOTA	Total Belanja (Juta Rupiah)	Jumlah Murid		Belanja Pendidikan Permud	
			SD	SMP	SD	SMP
1	KEPULAUAN SELAYAR	26,193,981,000	15271	4682	1,044,316	1,217,316
2	BULUKUMBA	99,454,971,000	60961	15702	1,035,865	1,208,865
3	BANTAENG	41,618,256,000	25946	6267	1,119,031	1,292,031
4	JENEPONTO	84,419,586,000	52446	12840	1,147,456	1,320,456
5	TAKALAR	62,420,793,000	35543	11748	1,088,961	1,261,961
6	GOWA	135,761,937,000	80357	23425	1,147,033	1,320,033
7	SINJAI	57,314,256,000	33086	10473	1,120,254	1,293,254
8	MAROS	72,858,630,000	42640	12909	1,126,327	1,299,327
9	PANGKEP	78,763,662,000	42402	16528	1,171,425	1,344,425
10	BARRU	39,777,522,000	21002	8634	1,137,881	1,310,881
11	BONE	157,933,422,000	92532	27911	1,084,458	1,257,458
12	SOPPENG	49,893,054,000	27524	10007	1,107,636	1,280,636
13	WAJO	72,548,628,000	41468	13544	1,088,245	1,261,245
14	SIDRAP	60,339,816,000	33846	11713	1,112,113	1,285,113
15	PINRANG	92,962,023,000	48833	20352	1,110,304	1,283,304
16	ENREKANG	52,817,850,000	30600	9575	1,063,829	1,236,829
17	LUWU	91,146,978,000	49098	19106	1,122,063	1,295,063
18	TANA TORAJA	63,389,979,000	35379	12429	1,102,026	1,275,026
19	LUWU UTARA	79,401,507,000	43397	16208	1,137,506	1,310,506
20	LUWU TIMUR	58,041,108,000	32898	11029	1,056,903	1,229,903
21	TORAJA UTARA	65,050,047,000	35037	13638	1,149,894	1,322,894
22	MAKASSAR	271,256,400,000	146536	55312	1,046,749	1,221,749
23	PARE – PARE	30,545,700,000	15950	6612	1,021,302	1,196,302
24	PALOPO	36,054,375,000	18932	7731	1,007,759	1,182,759

Lampiran 6 : Komposisi Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Usia Sekolah		Jml	Jumlah RT		Jml	Persentase		Total Persentase
		7 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun		SD	SMP		SD	SMP	
1	KEPULAUAN SELAYAR	278	73	351	195	63	258	79.2	20.8	100
2	BULUKUMBA	269	77	346	190	72	262	77.1	22.9	100
3	BANTAENG	262	81	343	161	76	237	76.3	23.7	100
4	JENEPONTO	313	82	395	225	80	305	79.2	20.8	100
5	TAKALAR	304	81	385	234	79	313	78.9	21.1	100
6	GOWA	303	117	420	241	113	354	72.1	27.9	100
7	SINJAI	329	110	439	236	105	341	74.9	25.1	100
8	MAROS	359	107	466	255	102	357	77	23	100
9	PANGKEP	350	89	439	245	80	325	79.7	20.3	100
10	BARRU	256	87	343	188	81	269	74.6	25.4	100
11	BONE	327	78	405	228	71	299	80.7	19.3	100
12	SOPPENG	198	90	288	155	82	237	68.7	31.3	100
13	WAJO	273	68	341	199	66	265	80	20	100
14	SIDRAP	269	87	356	199	83	282	75.5	24.5	100
15	PINRANG	307	108	415	223	105	328	73.9	26.1	100
16	ENREKANG	350	96	446	211	89	300	78.4	21.6	100
17	LUWU	375	106	481	246	96	342	77.9	22.1	100
18	TANA TORAJA	323	111	434	224	103	327	74.4	25.6	100
19	LUWU UTARA	385	92	477	275	82	357	80.7	19.3	100
20	LUWU TIMUR	317	116	433	231	101	332	73.2	26.8	100
21	TORAJA UTARA	325	119	444	179	108	287	73.1	26.9	100
22	MAKASSAR	269	102	371	192	93	285	72.5	27.5	100
23	PARE – PARE	309	94	403	213	87	300	76.6	23.4	100
24	PALOPO	326	79	405	210	72	282	80.4	19.6	100
	JUMLAH	7376	2250	9626	5155	2089	7244			

Lampiran 7 : Komposisi Rumah Tangga dan Murid Miskin di 24 Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan Berdasarkan Garis Kemiskinan 2010

No	Kabupaten/ Kota	Garis Kemisk.	RT Miskin		Jml	Murid Miskin		Jml	% RT Miskin		% Murid Miskin	
			SD	SMP		SD	SMP		SD	SM P		
1	KEPULAUAN SELAYAR	203,726	26	7	33	45	7	52	13.3	11.1	16.2	9.6
2	BULUKUMBA	200,907	16	5	21	25	6	31	8.4	6.9	9.3	7.8
3	BANTAENG	161,499	20	3	23	36	3	39	12.4	3.9	13.7	3.7
4	JENEPONTO	213,188	42	8	50	68	8	76	18.7	10.0	21.7	9.8
5	TAKALAR	203,319	22	8	30	30	8	38	9.4	10.1	9.9	9.9
6	GOWA	220,780	17	10	27	25	10	35	7.1	8.8	8.3	8.5
7	SINJAI	189,004	29	7	36	47	8	55	12.3	6.7	14.3	7.3
8	MAROS	237,119	36	13	49	53	15	68	14.1	12.7	14.8	14.0
9	PANGKEP	207,420	43	16	59	69	19	88	17.6	20.0	19.7	21.3
10	BARRU	216,585	14	5	19	20	6	26	7.4	6.2	7.8	6.9
11	BONE	189,320	29	7	36	48	9	57	12.7	9.9	14.7	11.5
12	SOPPENG	180,352	14	5	19	22	5	27	9.0	6.1	11.1	5.6
13	WAJO	208,293	20	5	25	29	6	35	10.1	7.6	10.6	8.8
14	SIDRAP	196,410	13	9	22	18	9	27	6.5	10.8	6.7	10.3
15	PINRANG	186,920	12	5	17	20	5	25	5.4	4.8	6.5	4.6
16	ENREKANG	204,861	35	9	44	70	11	81	16.6	10.1	20.0	11.5
17	LUWU	198,336	45	12	57	80	16	96	18.3	12.5	21.3	15.1
18	TANA TORAJA	185,785	31	7	38	53	8	61	13.8	6.8	16.4	7.2
19	LUWU UTARA	206,944	41	13	54	62	19	81	14.9	15.9	16.1	20.7
20	LUWU TIMUR	198,494	22	10	32	37	11	48	9.5	9.9	11.7	9.5
21	TORAJA UTARA	249,111	35	20	55	85	23	108	19.6	18.5	26.2	19.3
22	MAKASSAR	233,815	13	6	19	23	7	30	6.8	6.5	8.6	6.9
23	PARE – PARE	199,796	20	7	27	38	9	47	9.4	8.0	12.3	9.6
24	PALOPO	199,811	35	13	48	62	18	80	16.7	18.1	19.0	22.8

Lampiran 8 : Distribusi Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kota Makassar Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.67	1,043,703	27,215,474	9.67
2	10.41	1,365,453	29,308,972	10.41
3	9.67	1,579,340	27,215,474	9.67
4	10.41	1,821,340	29,308,972	10.41
5	9.67	2,085,835	27,215,474	9.67
6	10.04	2,415,616	28,262,223	10.04
7	10.04	2,886,034	28,262,223	10.04
8	10.04	3,639,972	28,262,223	10.04
9	10.41	5,056,507	29,308,972	10.41
10	9.67	9,211,059	27,215,474	9.67
Total	100.00		281,575,481	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.80	1,240,388	12,217,490	9.80
2	9.80	1,566,640	12,217,490	9.80
3	9.80	1,772,493	12,217,490	9.80
4	10.78	2,012,184	13,439,239	10.78
5	9.80	2,419,568	12,217,490	9.80
6	8.82	2,885,879	10,995,741	8.82
7	11.76	3,526,248	14,660,988	11.76
8	9.80	4,347,940	12,217,490	9.80
9	10.78	5,524,970	13,439,239	10.78
10	8.82	10,165,840	10,995,741	8.82
Total	100.00		124,618,398	100.00

Lampiran 9 : Distribusi Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Maros Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.75	951,460	39,421,445	9.75
2	10.03	1,280,863	40,547,772	10.03
3	10.31	1,521,048	41,674,099	10.31
4	9.75	1,771,123	39,421,445	9.75
5	10.31	1,942,192	41,674,099	10.31
6	9.75	2,210,068	39,421,445	9.75
7	10.03	2,570,326	40,547,772	10.03
8	10.03	2,994,940	40,547,772	10.03
9	10.31	3,588,257	41,674,099	10.31
10	9.75	5,757,439	39,421,445	9.75
Total	100.00		404,351,393	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah –tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.35	1,019,471	12,993,270	9.35
2	10.28	1,273,737	14,292,597	10.28
3	10.28	1,459,719	14,292,597	10.28
4	10.28	1,715,894	14,292,597	10.28
5	9.35	1,938,728	12,993,270	9.35
6	11.21	2,184,256	15,591,924	11.21
7	9.35	2,393,235	12,993,270	9.35
8	10.28	2,851,109	14,292,597	10.28
9	9.35	3,481,224	12,993,270	9.35
10	10.28	4,694,707	14,292,597	10.28
Total	100.00		139,027,989	100.00

Lampiran 10: Distribusi Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Gowa Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.57	899,394	33,263,957	9.57
2	10.23	1,197,790	35,558,023	10.23
3	10.23	1,394,597	35,558,023	10.23
4	10.23	1,556,149	35,558,023	10.23
5	9.57	1,719,096	33,263,957	9.57
6	10.23	1,933,776	35,558,023	10.23
7	9.90	2,274,006	34,410,990	9.90
8	10.23	2,893,456	35,558,023	10.23
9	9.90	3,680,418	34,410,990	9.90
10	9.90	6,184,466	34,410,990	9.90
Total	100.00		347,550,999	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.40	861,105	14,520,363	9.40
2	10.26	1,324,339	15,840,396	10.26
3	10.26	1,564,965	15,840,396	10.26
4	10.26	1,735,315	15,840,396	10.26
5	9.40	1,949,609	14,520,363	9.40
6	10.26	2,105,945	15,840,396	10.26
7	10.26	2,423,744	15,840,396	10.26
8	10.26	3,124,641	15,840,396	10.26
9	10.26	3,890,769	15,840,396	10.26
10	9.40	10,469,726	14,520,363	9.40
Total	100.00		154,443,861	100.00

Lampiran 11: Distribusi Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Takalar Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.87	839,338	32,668,830	9.87
2	9.87	1,058,041	32,668,830	9.87
3	10.20	1,213,250	33,757,791	10.20
4	9.87	1,348,693	32,668,830	9.87
5	10.20	1,511,799	33,757,791	10.20
6	9.87	1,751,555	32,668,830	9.87
7	10.20	2,046,644	33,757,791	10.20
8	9.87	2,256,122	32,668,830	9.87
9	10.20	2,867,925	33,757,791	10.20
10	9.87	5,140,918	32,668,830	9.87
Total	100.00		331,044,144	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.88	915,300	10,095,688	9.88
2	9.88	1,165,271	10,095,688	9.88
3	9.88	1,337,753	10,095,688	9.88
4	9.88	1,434,341	10,095,688	9.88
5	9.88	1,584,365	10,095,688	9.88
6	11.11	1,781,290	11,357,649	11.11
7	9.88	1,982,060	10,095,688	9.88
8	9.88	2,283,746	10,095,688	9.88
9	9.88	3,295,688	10,095,688	9.88
10	9.88	5,107,521	10,095,688	9.88
Total	100.00		102,218,841	100.00

Lampiran 12: Distribusi Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kota Palopo Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.82	816,836	32,248,288	9.82
2	10.12	1,104,925	33,256,047	10.12
3	10.12	1,272,331	33,256,047	10.12
4	9.82	1,403,885	32,248,288	9.82
5	10.12	1,596,403	33,256,047	10.12
6	9.82	1,878,204	32,248,288	9.82
7	10.12	2,259,875	33,256,047	10.12
8	10.12	2,674,765	33,256,047	10.12
9	10.12	3,312,961	33,256,047	10.12
10	9.82	6,453,211	32,248,288	9.82
Total	100.00		328,529,434	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	8.86	944,816	8,279,313	8.86
2	10.13	1,169,831	9,462,072	10.13
3	11.39	1,294,851	10,644,831	11.39
4	8.86	1,432,752	8,279,313	8.86
5	10.13	1,598,055	9,462,072	10.13
6	10.13	2,090,102	9,462,072	10.13
7	10.13	2,537,910	9,462,072	10.13
8	10.13	3,174,148	9,462,072	10.13
9	10.13	3,513,036	9,462,072	10.13
10	10.13	4,304,076	9,462,072	10.13
Total	100.00		93,437,961	100.00

Lampiran 13: Distribusi Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Bone Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.79	724,332	34,702,656	9.79
2	10.09	955,164	35,787,114	10.09
3	10.09	1,122,884	35,787,114	10.09
4	10.09	1,254,062	35,787,114	10.09
5	9.79	1,428,150	34,702,656	9.79
6	10.40	1,630,621	36,871,572	10.40
7	9.79	1,838,014	34,702,656	9.79
8	10.09	2,205,675	35,787,114	10.09
9	10.09	2,581,073	35,787,114	10.09
10	9.79	4,254,935	34,702,656	9.79
Total	100.00		354,617,766	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah –tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	10.26	836,188	10,059,664	10.26
2	8.97	1,000,155	8,802,206	8.97
3	10.26	1,144,972	10,059,664	10.26
4	10.26	1,280,134	10,059,664	10.26
5	10.26	1,396,135	10,059,664	10.26
6	10.26	1,576,755	10,059,664	10.26
7	10.26	1,901,398	10,059,664	10.26
8	10.26	2,174,166	10,059,664	10.26
9	10.26	2,559,744	10,059,664	10.26
10	8.97	3,351,580	8,802,206	8.97
Total	100.00		98,081,724	100.00

Lampiran 14: Distribusi Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.90	837,864	35,558,023	9.90
2	9.90	1,015,979	35,558,023	9.90
3	10.22	1,133,489	36,705,056	10.22
4	10.22	1,257,926	36,705,056	10.22
5	9.58	1,345,729	34,410,990	9.58
6	10.22	1,494,867	36,705,056	10.22
7	9.90	1,653,265	35,558,023	9.90
8	10.54	1,896,009	37,852,089	10.54
9	9.58	2,328,892	34,410,990	9.58
10	9.90	3,857,300	35,558,023	9.90
Total	100.00		359,021,329	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.76	951,683	10,563,648	9.76
2	9.76	1,092,314	10,563,648	9.76
3	9.76	1,279,914	10,563,648	9.76
4	10.98	1,386,978	11,884,104	10.98
5	9.76	1,497,351	10,563,648	9.76
6	9.76	1,606,785	10,563,648	9.76
7	10.98	1,726,794	11,884,104	10.98
8	9.76	1,933,677	10,563,648	9.76
9	9.76	2,200,692	10,563,648	9.76
10	9.76	3,192,306	10,563,648	9.76
Total	100.00		108,277,392	100.00

Lampiran 15: Distribusi Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Barru Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.77	908,728	28,447,025	9.77
2	9.77	1,095,221	28,447,025	9.77
3	10.94	1,220,910	31,860,668	10.94
4	9.38	1,369,436	27,309,144	9.38
5	10.16	1,489,350	29,584,906	10.16
6	10.16	1,707,558	29,584,906	10.16
7	10.16	1,996,109	29,584,906	10.16
8	9.77	2,359,463	28,447,025	9.77
9	10.16	2,700,619	29,584,906	10.16
10	9.77	3,906,462	28,447,025	9.77
Total	100.00		291,297,536	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.20	952,477	10,487,048	9.20
2	10.34	1,105,249	11,797,929	10.34
3	10.34	1,258,806	11,797,929	10.34
4	10.34	1,428,660	11,797,929	10.34
5	9.20	1,563,001	10,487,048	9.20
6	10.34	1,761,955	11,797,929	10.34
7	10.34	2,066,364	11,797,929	10.34
8	10.34	2,348,084	11,797,929	10.34
9	10.34	2,709,365	11,797,929	10.34
10	9.20	3,922,373	10,487,048	9.20
Total	100.00		114,046,647	100.00

Lampiran 16: Distribusi Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kota Pare – Pare Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.71	901,500	30,639,060	9.71
2	10.03	1,211,175	31,660,362	10.03
3	10.36	1,371,008	32,681,664	10.36
4	9.71	1,571,377	30,639,060	9.71
5	10.03	1,723,905	31,660,362	10.03
6	10.03	2,032,652	31,660,362	10.03
7	10.36	2,377,342	32,681,664	10.36
8	9.71	2,668,273	30,639,060	9.71
9	10.03	3,236,176	31,660,362	10.03
10	10.03	5,770,996	31,660,362	10.03
Total	100.00		315,582,318	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.57	961,258	10,766,718	9.57
2	9.57	1,240,491	10,766,718	9.57
3	10.64	1,387,988	11,963,020	10.64
4	10.64	1,601,948	11,963,020	10.64
5	9.57	1,848,352	10,766,718	9.57
6	9.57	2,124,130	10,766,718	9.57
7	10.64	2,385,110	11,963,020	10.64
8	9.57	2,595,791	10,766,718	9.57
9	10.64	3,589,953	11,963,020	10.64
10	9.57	6,922,804	10,766,718	9.57
Total	100.00		112,452,388	100.00

Lampiran 17: Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.67	786,129	26,932,490	9.67
2	10.04	1,021,222	27,968,355	10.04
3	10.41	1,186,877	29,004,220	10.41
4	9.67	1,340,675	26,932,490	9.67
5	10.04	1,489,843	27,968,355	10.04
6	10.04	1,678,058	27,968,355	10.04
7	10.04	1,918,873	27,968,355	10.04
8	10.04	2,167,453	27,968,355	10.04
9	9.67	2,840,751	26,932,490	9.67
10	10.41	5,110,971	29,004,220	10.41
Total	100.00		278,647,685	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.09	808,671	8,462,055	9.09
2	10.39	1,086,433	9,670,920	10.39
3	10.39	1,270,863	9,670,920	10.39
4	10.39	1,387,755	9,670,920	10.39
5	9.09	1,489,152	8,462,055	9.09
6	10.39	1,733,054	9,670,920	10.39
7	10.39	1,887,808	9,670,920	10.39
8	9.09	2,165,493	8,462,055	9.09
9	11.69	2,498,213	10,879,785	11.69
10	9.09	3,194,641	8,462,055	9.09
Total	100.00		93,082,605	100.00

Lampiran 18: Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Pangkep Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	10.00	820,299	40,999,875	10.00
2	10.00	1,057,867	40,999,875	10.00
3	10.00	1,226,124	40,999,875	10.00
4	10.00	1,430,953	40,999,875	10.00
5	10.00	1,618,033	40,999,875	10.00
6	10.00	1,735,517	40,999,875	10.00
7	10.00	1,893,126	40,999,875	10.00
8	10.00	2,214,704	40,999,875	10.00
9	10.00	2,650,112	40,999,875	10.00
10	10.00	4,307,403	40,999,875	10.00
Total	100.00		409,998,750	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	8.99	837,810	10,755,400	8.99
2	10.11	1,064,025	12,099,825	10.11
3	8.99	1,279,126	10,755,400	8.99
4	11.24	1,436,392	13,444,250	11.24
5	10.11	1,592,268	12,099,825	10.11
6	10.11	1,715,216	12,099,825	10.11
7	10.11	1,850,147	12,099,825	10.11
8	10.11	2,280,534	12,099,825	10.11
9	10.11	2,831,055	12,099,825	10.11
10	10.11	6,220,154	12,099,825	10.11
Total	100.00		119,653,825	100.00

Lampiran 19: Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (Desil)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	10.07	767,680	29,240,848	10.07
2	9.71	958,917	28,196,532	9.71
3	10.07	1,148,434	29,240,848	10.07
4	10.07	1,321,710	29,240,848	10.07
5	10.07	1,428,741	29,240,848	10.07
6	9.71	1,596,785	28,196,532	9.71
7	10.43	1,747,481	30,285,164	10.43
8	10.07	1,992,910	29,240,848	10.07
9	10.07	2,306,468	29,240,848	10.07
10	9.71	3,466,293	28,196,532	9.71
Total	100.00		290,319,848	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.59	866,535	8,521,212	9.59
2	12.33	1,244,571	10,955,844	12.33
3	8.22	1,366,069	7,303,896	8.22
4	10.96	1,515,793	9,738,528	10.96
5	8.22	1,630,008	7,303,896	8.22
6	10.96	1,873,074	9,738,528	10.96
7	9.59	2,116,886	8,521,212	9.59
8	9.59	2,477,293	8,521,212	9.59
9	10.96	2,735,194	9,738,528	10.96
10	9.59	4,061,839	8,521,212	9.59
Total	100.00		88,864,068	100.00

Lampiran 20: Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.92	665,852	29,094,806	9.92
2	9.92	807,944	29,094,806	9.92
3	10.31	920,555	30,213,837	10.31
4	9.92	1,063,382	29,094,806	9.92
5	9.92	1,201,984	29,094,806	9.92
6	10.31	1,391,613	30,213,837	10.31
7	9.92	1,658,650	29,094,806	9.92
8	9.92	1,987,683	29,094,806	9.92
9	9.92	2,457,408	29,094,806	9.92
10	9.92	4,149,855	29,094,806	9.92
Total	100.00		293,186,122	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.88	803,270	10,336,248	9.88
2	9.88	967,663	10,336,248	9.88
3	9.88	1,166,692	10,336,248	9.88
4	11.11	1,325,756	11,628,279	11.11
5	8.64	1,464,293	9,044,217	8.64
6	11.11	1,666,520	11,628,279	11.11
7	9.88	1,828,785	10,336,248	9.88
8	9.88	2,059,504	10,336,248	9.88
9	9.88	2,606,875	10,336,248	9.88
10	9.88	3,818,175	10,336,248	9.88
Total	100.00		104,654,511	100.00

Lampiran 21: Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Sinjai Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	10.03	796,690	36,968,382	10.03
2	9.73	995,103	35,848,128	9.73
3	10.33	1,127,735	38,088,636	10.33
4	10.03	1,283,332	36,968,382	10.03
5	9.73	1,454,919	35,848,128	9.73
6	10.03	1,659,371	36,968,382	10.03
7	10.03	1,989,446	36,968,382	10.03
8	10.33	2,485,549	38,088,636	10.33
9	10.03	3,331,921	36,968,382	10.03
10	9.73	6,151,136	35,848,128	9.73
Total	100.00		368,563,566	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	10.00	799,354	14,225,794	10.00
2	10.00	1,022,045	14,225,794	10.00
3	10.00	1,238,537	14,225,794	10.00
4	10.00	1,470,088	14,225,794	10.00
5	10.00	1,671,676	14,225,794	10.00
6	10.00	1,977,241	14,225,794	10.00
7	10.00	2,303,975	14,225,794	10.00
8	10.00	2,961,288	14,225,794	10.00
9	10.00	4,280,111	14,225,794	10.00
10	10.00	9,249,659	14,225,794	10.00
Total	100.00		142,257,940	100.00

Lampiran 22: Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.60	705,688	21,045,084	9.60
2	10.10	952,687	22,152,720	10.10
3	10.10	1,085,962	22,152,720	10.10
4	10.10	1,254,718	22,152,720	10.10
5	10.10	1,406,444	22,152,720	10.10
6	10.10	1,591,791	22,152,720	10.10
7	10.10	1,783,837	22,152,720	10.10
8	10.10	2,019,301	22,152,720	10.10
9	10.10	2,311,788	22,152,720	10.10
10	9.60	3,230,336	21,045,084	9.60
Total	100.00		219,311,928	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	10.00	679,494	11,525,724	10.00
2	10.00	868,782	11,317,122	10.00
3	10.00	1,024,361	11,317,122	10.00
4	10.00	1,252,490	11,317,122	10.00
5	10.00	1,452,054	11,317,122	10.00
6	10.00	1,586,259	11,317,122	10.00
7	11.11	1,833,318	12,574,580	11.11
8	8.89	2,045,439	10,059,664	8.89
9	10.00	2,491,627	11,317,122	10.00
10	10.00	3,244,825	11,317,122	10.00
Total	100.00		113,379,822	100.00

Lampiran 23: Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Wajo Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.89	791,601	29,382,615	9.89
2	9.89	1,123,154	29,382,615	9.89
3	10.26	1,366,943	30,470,860	10.26
4	9.89	1,518,029	29,382,615	9.89
5	9.89	1,651,276	29,382,615	9.89
6	10.26	1,837,273	30,470,860	10.26
7	9.89	2,245,916	29,382,615	9.89
8	10.26	2,488,410	30,470,860	10.26
9	9.52	2,967,838	28,294,370	9.52
10	10.26	5,009,723	30,470,860	10.26
Total	100.00		297,090,885	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	8.82	900,635	7,567,470	8.82
2	10.29	1,098,976	8,828,715	10.29
3	10.29	1,405,003	8,828,715	10.29
4	10.29	1,612,250	8,828,715	10.29
5	10.29	1,834,866	8,828,715	10.29
6	10.29	2,260,099	8,828,715	10.29
7	10.29	2,428,144	8,828,715	10.29
8	8.82	2,682,509	7,567,470	8.82
9	11.76	3,356,263	10,089,960	11.76
10	8.82	6,874,739	7,567,470	8.82
Total	100.00		85,764,660	100.00

Lampiran 24: Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Sidrap Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.67	923,852	28,914,938	9.67
2	10.04	1,179,312	30,027,051	10.04
3	10.04	1,289,300	30,027,051	10.04
4	10.41	1,422,739	31,139,164	10.41
5	9.67	1,627,221	28,914,938	9.67
6	10.04	1,844,407	30,027,051	10.04
7	10.04	2,057,112	30,027,051	10.04
8	10.41	2,281,699	31,139,164	10.41
9	9.67	2,899,573	28,914,938	9.67
10	10.04	4,373,696	30,027,051	10.04
Total	100.00		299,158,397	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.20	968,663	10,280,904	9.20
2	10.34	1,160,413	11,566,017	10.34
3	10.34	1,313,236	11,566,017	10.34
4	10.34	1,411,610	11,566,017	10.34
5	10.34	1,708,057	11,566,017	10.34
6	9.20	1,880,098	10,280,904	9.20
7	10.34	2,158,790	11,566,017	10.34
8	10.34	2,525,511	11,566,017	10.34
9	10.34	3,194,257	11,566,017	10.34
10	9.20	4,545,421	10,280,904	9.20
Total	100.00		111,804,831	100.00

Lampiran 25: Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.77	815,797	33,309,120	9.77
2	10.10	1,044,612	34,419,424	10.10
3	10.10	1,187,141	34,419,424	10.10
4	9.77	1,313,614	33,309,120	9.77
5	10.10	1,431,222	34,419,424	10.10
6	10.10	1,616,703	34,419,424	10.10
7	10.10	1,848,943	34,419,424	10.10
8	9.77	2,214,243	33,309,120	9.77
9	10.10	2,745,242	34,419,424	10.10
10	10.10	5,113,860	34,419,424	10.10
Total	100.00		340,863,328	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.26	957,555	12,833,040	9.26
2	10.19	1,200,455	14,116,344	10.19
3	10.19	1,362,964	14,116,344	10.19
4	10.19	1,485,922	14,116,344	10.19
5	10.19	1,624,885	14,116,344	10.19
6	10.19	1,859,513	14,116,344	10.19
7	10.19	2,148,137	14,116,344	10.19
8	10.19	2,521,723	14,116,344	10.19
9	9.26	2,897,732	12,833,040	9.26
10	10.19	5,896,071	14,116,344	10.19
Total	100.00		138,596,832	100.00

Lampiran 26: Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	10.00	871,538	37,234,015	10.00
2	10.00	1,067,143	37,234,015	10.00
3	9.71	1,210,996	36,170,186	9.71
4	10.29	1,336,850	38,297,844	10.29
5	10.00	1,525,040	37,234,015	10.00
6	9.71	1,703,976	36,170,186	9.71
7	10.29	1,969,974	38,297,844	10.29
8	9.71	2,265,175	36,170,186	9.71
9	10.00	2,844,643	37,234,015	10.00
10	10.29	4,868,600	38,297,844	10.29
Total	100.00		372,340,150	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.38	902,964	11,131,461	9.38
2	10.42	1,202,048	12,368,290	10.42
3	9.38	1,403,146	11,131,461	9.38
4	10.42	1,538,972	12,368,290	10.42
5	10.42	1,680,392	12,368,290	10.42
6	10.42	1,976,591	12,368,290	10.42
7	9.38	2,167,620	11,131,461	9.38
8	10.42	2,589,918	12,368,290	10.42
9	10.42	3,091,433	12,368,290	10.42
10	9.38	5,367,365	11,131,461	9.38
Total	100.00		118,735,584	100.00

Lampiran 27: Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Luwu Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	10.40	804,946	43,760,457	10.40
2	9.60	1,025,921	40,394,268	9.60
3	9.87	1,133,886	41,516,331	9.87
4	9.87	1,275,344	41,516,331	9.87
5	10.40	1,430,841	43,760,457	10.40
6	9.87	1,558,666	41,516,331	9.87
7	9.87	1,722,369	41,516,331	9.87
8	10.13	1,897,361	42,638,394	10.13
9	9.87	2,186,539	41,516,331	9.87
10	10.13	4,068,808	42,638,394	10.13
Total	100.00		420,773,625	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah –tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.43	957,117	12,950,630	9.43
2	10.38	1,122,011	14,245,693	10.38
3	10.38	1,257,256	14,245,693	10.38
4	9.43	1,386,460	12,950,630	9.43
5	10.38	1,533,305	14,245,693	10.38
6	10.38	1,660,189	14,245,693	10.38
7	9.43	1,788,931	12,950,630	9.43
8	10.38	2,021,552	14,245,693	10.38
9	9.43	2,261,034	12,950,630	9.43
10	10.38	3,199,316	14,245,693	10.38
Total	100.00		137,276,678	100.00

Lampiran 28: Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.60	655,609	34,162,806	9.60
2	10.22	985,572	36,366,858	10.22
3	10.22	1,159,128	36,366,858	10.22
4	9.91	1,286,554	35,264,832	9.91
5	10.22	1,441,981	36,366,858	10.22
6	9.91	1,573,170	35,264,832	9.91
7	9.91	1,714,644	35,264,832	9.91
8	10.22	1,922,889	36,366,858	10.22
9	10.22	2,210,975	36,366,858	10.22
10	9.60	2,979,859	34,162,806	9.60
Total	100.00		355,954,398	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah –tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.91	804,661	14,025,286	9.91
2	9.91	1,089,144	14,025,286	9.91
3	9.91	1,288,399	14,025,286	9.91
4	9.91	1,410,806	14,025,286	9.91
5	9.91	1,520,090	14,025,286	9.91
6	10.81	1,644,329	15,300,312	10.81
7	9.01	1,802,236	12,750,260	9.01
8	10.81	1,971,275	15,300,312	10.81
9	9.91	2,298,859	14,025,286	9.91
10	9.91	2,967,588	14,025,286	9.91
Total	100.00		141,527,886	100.00

Lampiran 29: Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.87	752,975	43,225,228	9.87
2	10.13	977,886	44,362,734	10.13
3	10.13	1,167,468	44,362,734	10.13
4	9.61	1,344,223	42,087,722	9.61
5	10.13	1,483,781	44,362,734	10.13
6	10.13	1,638,694	44,362,734	10.13
7	10.13	1,812,140	44,362,734	10.13
8	9.87	2,099,769	43,225,228	9.87
9	10.13	2,758,485	44,362,734	10.13
10	9.87	5,623,496	43,225,228	9.87
Total	100.00		437,939,810	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.78	870,431	11,794,554	9.78
2	9.78	1,132,357	11,794,554	9.78
3	9.78	1,242,131	11,794,554	9.78
4	10.87	1,421,550	13,105,060	10.87
5	9.78	1,554,362	11,794,554	9.78
6	9.78	1,733,859	11,794,554	9.78
7	10.87	1,937,304	13,105,060	10.87
8	8.70	2,218,430	10,484,048	8.70
9	10.87	2,802,953	13,105,060	10.87
10	9.78	6,698,562	11,794,554	9.78
Total	100.00		120,566,552	100.00

Lampiran 30: Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	10.09	893,242	33,820,896	10.09
2	9.78	1,147,096	32,763,993	9.78
3	10.09	1,335,811	33,820,896	10.09
4	9.78	1,567,202	32,763,993	9.78
5	10.09	1,794,713	33,820,896	10.09
6	10.09	2,064,570	33,820,896	10.09
7	9.78	2,441,145	32,763,993	9.78
8	10.41	3,203,745	34,877,799	10.41
9	9.78	4,851,429	32,763,993	9.78
10	10.09	8,205,531	33,820,896	10.09
Total	100.00		335,038,251	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.48	855,118	13,528,933	9.48
2	9.48	1,206,883	13,528,933	9.48
3	11.21	1,507,251	15,988,739	11.21
4	9.48	1,756,007	13,528,933	9.48
5	10.34	1,946,431	14,758,836	10.34
6	10.34	2,148,955	14,758,836	10.34
7	9.48	2,568,298	13,528,933	9.48
8	10.34	3,293,377	14,758,836	10.34
9	9.48	4,634,715	13,528,933	9.48
10	10.34	8,809,932	14,758,836	10.34
Total	100.00		142,668,748	100.00

Lampiran 31: Manfaat Belanja SD dan SMP pada Tiap Kelompok Pendapatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010

a. Sekolah Dasar

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.85	1,185,517	36,796,608	9.85
2	9.85	1,371,578	36,796,608	9.85
3	10.15	1,551,516	37,946,502	10.15
4	10.15	1,696,507	37,946,502	10.15
5	9.85	1,946,420	36,796,608	9.85
6	10.46	2,153,995	39,096,396	10.46
7	9.85	2,378,322	36,796,608	9.85
8	9.85	2,905,278	36,796,608	9.85
9	10.15	3,894,529	37,946,502	10.15
10	9.85	6,349,623	36,796,608	9.85
Total	100.00		373,715,550	100.00

b. Sekolah Menengah Pertama

Kelompok Pendapatan (rendah -tinggi)	% Murid	Rata – Rata Pendapatan RT/Bulan	Total Belanja Pendidikan (juta rupiah)	% Manfaat
1	9.24	1,235,971	14,551,834	9.24
2	10.08	1,473,510	15,874,728	10.08
3	10.08	1,704,712	15,874,728	10.08
4	10.08	1,933,582	15,874,728	10.08
5	10.08	2,095,085	15,874,728	10.08
6	10.08	2,271,285	15,874,728	10.08
7	10.92	2,538,200	17,197,622	10.92
8	9.24	3,330,963	14,551,834	9.24
9	10.08	4,465,546	15,874,728	10.08
10	10.08	7,097,298	15,874,728	10.08
Total	100.00		157,424,386	100.00